

Buku “Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042: Apresiasi, Dukungan, dan Beberapa Masukan Ide Program-program dari Masyarakat” ini disusun dalam rangka untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat tentang arah kebijakan serta perencanaan Keistimewaan DIY tahun 2022 – 2042.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Paniradya Kaistimewan menyusun Grand Desain Keistimewaan DIY 2022 – 2042, yang merupakan rencana induk untuk pembangunan jangka panjang terkait pelaksanaan Keistimewaan DIY. Grand design yang disusun juga menjadi haluan, arah dan acuan kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan pembangunan DIY khususnya pada urusan keistimewaan selama 20 tahun kedepan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.



GRAND DESIGN KEISTIMEWAAN DIY 2022-2042



GRAND DESIGN KEISTIMEWAAN DIY 2022-2042

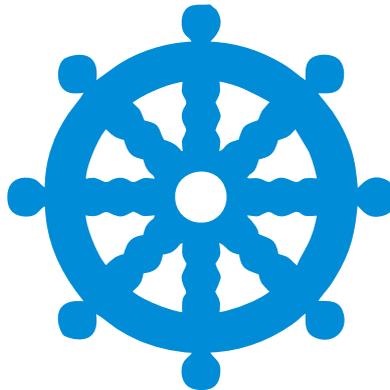
Apresiasi, Dukungan,
dan Beberapa Masukan
Ide Program-program
dari Masyarakat

Tim Penulis:
Haryadi Baskoro
Wawan Isnawan
Bahrul Fauzi Rosyidi
Livy Laurens



GRAND DESIGN KEISTIMEWAAN DIY 2022-2042

**Apresiasi, Dukungan,
dan Beberapa Masukan
Ide Program-program
dari Masyarakat**



**Haryadi Baskoro
Wawan Isnawan
Bahrul Fauzi Rosyidi
Livy Laurens**

GRAND DESIGN KEISTIMEWAAN DIY 2022-2042

**Apresiasi, Dukungan, dan Beberapa Masukan
Ide Program-program dari Masyarakat**

@Yogyakarta, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Kepengarangan

Penulis :

Haryadi Baskoro

Wawan Isnawan

Bahrul Fauzi Rosyidi

Livy Laurens

Editor :

Yulius Felicianus, S.E.

Layouter :

Matheus Dwi Rubiyanto

ISBN : 9786237120131

Halaman : x + 202 Hal.



Penerbit :

Best Publiser (Galangpress Group) Anggota Ikapi

Bekerjasama Dengan :

Paniradya Kaistimewan Yogyakarta

Percetakan :

Tandabaca Kinarya Cipta

Cetakan I : Februari 2022

Cetakan II : Agustus 2022



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Bagian I. Apresiasi dan Dukungan dari Masyarakat.....	1
BAB 1 Apresiasi untuk Sosialisasi dan Diskusi Publik	1
BAB 2 Apresiasi untuk Pengutamaan Filosofi.....	21
BAB 3 Apresiasi untuk Visi Pembangunan DIY	41
BAB 4 Apresiasi untuk Program-program Unggulan	51
Bagian II. Beberapa Masukan Ide tentang Program-program dari Masyarakat	83
BAB 5 Pusat Studi Keistimewaan DIY	83
BAB 6 Sekolah Pembangunan Keistimewaan DIY	99
BAB 7 Pengkaderan Milenial Keistimewaan DIY	109
BAB 8 Digitalisasi Keistimewaan DIY	127
BAB 9 Inovasi Pembangunan Keistimewaan DIY	169
BAB 10 Desa Keistimewaan DIY.....	191
BAB 11 Syiar Global Keistimewaan DIY	199

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sehingga buku “Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042 : Apresiasi, Dukungan, dan Beberapa Masukan Ide Program-program dari Masyarakat” ini dapat tersusun dengan baik.

Buku “Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042 : Apresiasi, Dukungan, dan Beberapa Masukan Ide Program-program dari Masyarakat” ini disusun dalam rangka untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat tentang arah kebijakan serta perencanaan Keistimewaan DIY tahun 2022-2042.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui *Paniradya Kaistimewan* menyusun Grand Desain

Keistimewaan DIY 2022-2042, yang merupakan rencana induk untuk pembangunan jangka panjang terkait pelaksanaan Keistimewaan DIY. Grand design yang disusun juga menjadi haluan, arah dan acuan kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan pembangunan DIY khususnya pada urusan keistimewaan selama 20 tahun kedepan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Dalam buku ini selain memuat tanggapan masyarakat terhadap Grand Desain Keistimewaan DIY tahun 2022-2024, juga memuat ide, gagasan serta saran masukan terhadap kebijakan dan arah perencanaan program kegiatan urusan keistimewaan yang dapat dikembangkan dalam kurun waktu tersebut dan diharapkan dapat lebih mewarnai Keistimewaan DIY kedepan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada para penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyusun buku ini. Kepada

pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini kami haturkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pengantar dari Tim Penulis

Dalam rangka mengimplementasikan Keistimewaan DIY secara berkelanjutan, pada 2020-2021 Paniradya Kaistimewan DIY menyusun Grand Design Keistimewaan DIY untuk periode 2022 - 2042. Grand Design ini merupakan rencana induk untuk pembangunan jangka panjang terkait pelaksanaan Keistimewaan DIY.

Grand Design Tahun 2022-2042 disusun dengan maksud sebagai haluan, arahan, dan acuan kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 tahun. Grand Design Tahun 2022-2042 menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta Kalurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun rencana pembangunan

Grand Design Tahun 2022-2042 disusun dengan tujuan untuk memberikan haluan, arah, dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan keistimewaan yang disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindakan.

Buku ini disusun untuk membantu sosialisasi tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042 tersebut. Tim Penulis menjaring aspirasi dari

masyarakat luas untuk menanggapi rencana induk ini dan hasil tanggapan itu ditulis dalam buku ini. Bagian pertama berisi apresiasi dan dukungan masyarakat terhadap rencana induk pembangunan jangka panjang tersebut. Bagian kedua berisi beberapa masukan dari berbagai kalangan masyarakat berupa ide-ide tentang program-program yang diharapkan dilakukan dalam rentang pembangunan Keistimewaan DIY 2022-2042 tersebut.

Masukan berupa gagasan-gagasan tentang program program itu masih berupa curah gagasan sehingga ke depan perlu digali lebih dalam, perlu didiskusikan secara terarah (FGD), serta dirumuskan dan dituliskan secara rinci. Namun masukan-masukan itu menunjukkan bagaimana masyarakat mendukung Keistimewaan DIY.

Tim Penulis

BAGIAN I

Apresiasi dan Dukungan dari Masyarakat

Bab 1

Sosialisasi dan Diskusi Publik

Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh Tim Penulis, masyarakat memberi apresiasi dan dukungan terhadap Pemerintah Daerah DIY, khususnya Paniradya Kaistimewan, yang secara terbuka mensosialisasikan dan membuka ruang diskusi publik tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042. Dengan keterbukaan itu masyarakat merasa diajak untuk *urun rembug* dan berpartisipasi sehingga merasa ikut *handarbeni*.

Pada Bab ini disajikan review *podcast* “Rembag Kaistimewan” yang diadakan oleh Paniradya Kaistimewan mengenai Grand Design Keistimewaan DIY untuk periode 2022-2042. Melalui *podcast* ini masyarakat turut berpartisipasi dalam *rembugan* dan sampai hari ini masyarakat masih terus meresponnya.

Rembag Kaistimewan

Grand Design Keistimewaan DIY untuk periode 2022-2042.

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Thema : Grand Design Keistimewaan
: Strategi Perencanaan Kebijakan
menuju Kesejahteraan

Waktu : 30 September 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Nara sumber :

- Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec (Tenaga Ahli Grand Design Keistimewaan DIY)
- Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)
- GKR Mangkubumi (Parampara Praja DIY)

Moderator : Firman Putra, S.Sn.

Review:

Pada tahun 2020 dan 2021, Paniradya Kaistimewan bersama berbagai pihak terkait tengah berfokus untuk menyusun Rencana Induk atau Grand Design Keistimewaan DIY periode 2022-2042.

Pemahaman tentang Grand Design

Tenaga Ahli Grand Design Keistimewaan DIY Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Grand Design Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022-2042 adalah rencana induk atau *masterplan* pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian Grand Design ini menggambarkan kondisi ideal Keistimewaan DIY pada 20 tahun yang akan datang. Ancangannya harus jelas.

Grand Design DIY dapat diperbandingkan dengan misalnya *masterplan* pengembangan sebuah lembaga kampus. Dalam *masterplan* kampus itu, harus digambarkan secara konseptual tentang kondisi yang diharapkan terjadi pada 20 tahun ke depan. Misalnya pada 20 tahun kemudian kampus itu sudah punya gedung sendiri, ada sekian ribu lulusan, akreditasi terbaik, jaringan luar negeri, jumlah guru besar memadai, dan seterusnya, Dengan adanya tujuan yang terukur itu maka kita menyusun rencana-rencana untuk mewujudkan tujuan itu. Rencana-rencana itu diperiodisasi per lima tahun yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Keselarasan dan Arah dari Pusat

Prof Edy menekankan bahwa penyusunan Grand Design Keistimewaan DIY ini harus selaras dengan perencanaan-perencanaan pembangunan tentang DIY, Grand Design ini harus selaras betul dengan rencana pembangunan nasional dan juga rencana pembangunan DIY di luar lima urusan Keistimewaan DIY ini.

Tentang pentingnya keselarasan itu, Paniradya Pati Aris Eko Nugroho mengingatkan bahwa selama ini Pemda DIY telah mempunyai beberapa dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, buku biru,

Perda, Perdais, dan sebagainya. Dengan demikian Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042 itu merupakan sistem atau sekumpulan design-design tentang Keistimewaan DIY masa depan. Grand Design ini menjadi dokumen bersama dalam memberi arah dan haluan kebijakan pembangunan DIY masa depan.

Untuk meningkatkan keselarasan itu Pemda DIY juga menerima arahan dan masukan dari Pemerintah Pusat. Menurut Aris, Pemerintah Pusat sangat menekankan pentingnya tujuan-tujuan Keistimewaan DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUK DIY, itu yang harus menjadi sasaran Grand Design DIY 2022-2042.

Keistimewaan DIY Tak Sekadar Urusan Danais

Parampara Praja GKR Mangkubumi mewanti-wanti supaya masalah Keistimewaan DIY itu jangan hanya dibaca sebagai persoalan Dana Keistimewaan (Danais), Begitu juga dalam penyusunan Grand Design DIY 2022-2042 ini, kita harus visioner dan idealis.

Menurut GKR Mangkubumi, Grand Design DIY 2022-2042 ini adalah tonggak atau pilar untuk membangun Keistimewaan DIY secara berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat mengidentikkan Keistimewaan DIY itu hanya sekedar Danais. Keistimewaan DIY lebih luas dari hanya urusan dana. Secara teknis pun Danais bukan “bensin” bagi pembangunan DIY yang besar ini. Jika pembangunan DIY merupakan mobil, Danais itu ibarat “oli”-nya saja, yang secara volume kecil tetapi jika digunakan secara tepat maka berdampak pada percepatan.

Paniradya Pati Aris Eko Nugroho juga mengingatkan bahwa besaran Danais itu hanya 23 persen dibanding keseluruhan APBD. Jadi secara teknis tidak mungkin hanya dengan Danais maka semua pekerjaan di DIY ditangani. Danais harus dialokasikan sesuai peruntukannya menurut regulasi yang sudah digariskan.

GKR Mangkubumi mengatakan bahwa jangan mengukur Keistimewaan DIY dari Danais semata. Dulu sebelum diterbitkan UUK 2012, banyak sekali kegiatan kebudayaan yang mencerminkan Keistimewaan DIY dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya seperti kegiatan “Merti Desa”. Sekarang, jangan sampai kita malah tidak melakukan apa-apa jika tidak ada Danais yang dikucurkan.

Karena itu menurut GKR Mangkubumi, sambil menyusun perencanaan ini dan itu, kita harus terus mempelajari dan mendalami Keistimewaan DIY. Di lingkup Parampara Praja sendiri secara rutin ada kegiatan “Sinau Bareng UUK” di mana kita mencermati dan mendalami substansi-substansi Keistimewaan DIY bukan sekedar sebatas kulitnya saja.

Prof Edy Suandi Hamid menambahkan supaya kegiatan belajar tentang Keistimewaan DIY itu terus diperluas dan diintensifkan. Bukan hanya Parampara Praja tetapi juga semua ASN harus belajar. Masyarakat dan generasi muda juga harus mendalaminya. Kampus-kampus harus bergerak untuk memberikan pendidikan formal tentang Keistimewaan DIY seperti sudah

dilakukan di Universitas Widya Mataram. Pemahaman yang tepat dan mendalam mengurangi banyak kesalahpahaman akibat kedangkalan pengetahuan.

Pengarusutamaan Kebudayaan

Paniradya Pati Aris Eko Nugroho mengatakan bahwa pembangunan kebudayaan merupakan “kembangnya” Keistimewaan DIY. Ke depan kebudayaan dikembangkan bukan hanya untuk memajukan peradaban DIY namun juga mensejahterakan masyarakat yang merupakan tujuan Keistimewaan DIY itu.

GKR Mangkubumi mengingatkan pentingnya penguatan kebudayaan DIY yang berakar pada sejarah. Kita masih harus memperjuangkan supaya DIY untuk menjadi “heritage city” yang diakui dunia. Untuk itu sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Kasultanan dan Kadipaten harus diperkuat.

Karena Yogyakarta sebagai heritage city berbasis sejarah maka perkembangan budaya sejak Eyang Sultan Hamengku Buwono I harus kita pelajari kembali. Tata kota Yogyakarta dengan basis Sumbu Filosofi perlu diperdalam dan dibangun dengan cermat dan mendetil.

Menurut GKR Mangkubumi, pengutamaan pembangunan kebudayaan akan berdampak pada pemajuan ekonomi, bukan sebaliknya. Sebab, kalau kita hanya memulai dari pembangunan yang

berorientasi ekonomi semata, kebudayaan bisa terpinggirkan, terabaikan, dan tergadaikan. Kalau misalnya kita hanya membangun pariwisata supaya mendapat keuntungan besar, kita bisa malah mengabaikan atau malah menjual (komodifikasi) kebudayaan. Tetapi jika kita membangun kebudayaan secara sangat serius, pasti akan berdampak ekonomi karena Yogyakarta menjadi destinasi pariwisata. Prinsip “hamemayu hayuning bawana” berarti memperindah peradaban Yogyakarta yang sudah indah. Keindahan itu yang pada gilirannya akan membukakan berkah ekonomi bagi masyarakatnya.

Keindahan budaya dan alam Yogyakarta harus dibangun secara berkelanjutan. Dengan demikian keindahannya kelak masih akan bersinar setelah 100 bahkan 500 tahun lagi. Pelestarian alam itu berarti “jadikanlah gunung sebagaimana gunung” dan “jadikanlah laut sebagaimana laut”. Pengejaran pada ekonomi berpotensi untuk mengeksploitasi dan merusaknya. Pengarusutamaan kebudayaan akan melestarikan alam, memperindahkannya, dan akhirnya memberikan kesejahteraan,

Prof Edy Suandi Hamid mengingatkan bahwa masalah kesejahteraan di DIY masih harus banyak dibenahi, Ketimpangan dan kemiskinan harus diperbaiki. Karena itu pembangunan Keistimewaan DIY yang berbasis kebudayaan harus dipikirkan masak-masak supaya berdampak pada kesejahteraan.

Proses Penyusunan

Karena itu Prof Edy mengatakan bahwa penyusunan Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042 ini tidak bisa “*sak deg sak nyet*”. Desainnya harus holistik-komprehensif. Diperlukan masukan dari banyak pihak supaya tidak ada poin-poin yang kelewatan.

Paniradya Pati Aris melaporkan bahwa selama ini sudah dilakukan serangkaian FDG (*Focus Group Discussion*) dengan para nara sumber ahli. Paniradya Kaistimewan juga berkoordinasi dengan OPD-OPD sehingga penyusunan grand design ini bersifat holistik dan menjadi landasan sinergi dan kolaborasi lintas OPD.

Paniradya Kaistimewan juga menjaring aspirasi dari masyarakat luas. GKR Mangkubumi menekankan bahwa Keistimewaan DIY adalah milik kita semua, dari Yogyakarta untuk Yogyakarta, Musrenbang Keistimewaan harus dikembangkan, diluaskan, dan diintensifkan. Masyarakat jangan hanya komplain tetapi memberikan masukan-masukan yang solutif.

Diskusi Berlanjut

Sampai buku ini selesai ditulis, Paniradya Keistimewaan sedang terus menyempurnakan draft Grand Design Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042. Nantinya, rencana induk ini akan dijadikan sebagai Peraturan Gubernur DIY dengan nomor tertentu. Paniradya Kaistimewan terus menjaring aspirasi dari semua elemen masyarakat DIY untuk menyempurnakan rencana induk tersebut.

Berikut ini adalah poin-poin Grand Design Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042 yang sudah jelas namun dapat pula mendorong dan diskusi lebih lanjut untuk penyempurnaannya (sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2021).

- Kurun waktu Grand Design ini hadir diantara kurun waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025, RPJP Daerah 2012-2025, dan periodisasi. Pelaksanaan Grand Design Tahun 2022-2042 terbagi dalam 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yaitu Lima Tahun Pertama (2022-2027), Lima Tahun Kedua (2027-2032), Lima Tahun Ketiga (2032-2037), dan Lima Tahun Keempat (2037-2042).
- Grand Design digunakan sebagai haluan dalam menyusun RPJPD dan RPJMD dalam menguatkan urusan keistimewaan. Grand Design memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, program kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Grand Design sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam rencana pembangunan baik lima tahunan maupun sekala tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

- Dokumen Grand Design Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042 diharapkan menjadi haluan dan arahan sebagai kaidah umum teknik pembangunan keistimewaan ini mampu menjamin keterpaduan, sinergitas, efektivitas dan keefisienan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pemanfaatan dana keistimewaan dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga sebagai upaya untuk memberikan informasi yang sederhana diantaranya tentang Visi Pembangunan DIY, Tujuan Keistimewaan, Arah Kebijakan Keistimewaan, Ukuran Keberhasilan, Strategi Pelaksanaan, dan Road Map, serta keterkaitan Grand Design sendiri dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Grand Design DIY diproyeksikan memiliki lingkup waktu 20 tahun yang diuraikan dalam kurun waktu 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya yang terinternalisasi pada dokumen perencanaan urusan keistimewaan.
- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam grand design ini adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

- Grand Design Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042 adalah haluan, arahan dan pedoman pelaksanaan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan pokok program keistimewaan sesuai dengan tujuan keistimewaan
- Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Maksud disusunnya Grand Design DIY 2022-2042 adalah sebagai berikut. Grand Design Tahun 2022-2042 disusun dengan maksud sebagai haluan, arahan, dan acuan kerja bagi penyelenggaraan urusan keistimewaan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode 20 tahun. Dokumen ini juga sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun rencana pembangunan.
- Tujuan disusunnya Grand Design DIY 2022-2042 adalah sebagai berikut. Grand Design Tahun 2022-2042 disusun dengan tujuan untuk memberikan haluan, arah, dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan keistimewaan yang

disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

- Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Grand Design Tahun 2022-2042 adalah untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan keistimewaan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (5) mengoptimalkan partisipasi Kasultanan/Kadipaten, masyarakat, masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik, dan perguruan tinggi, sehingga menjadi produk kolektif (*budaya saling silang*).
- Tujuan Grand Design DIY 2022-2042 pada dasarnya sama dengan tujuan pengaturan Keistimewaan DIY menurut Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Tujuan yang hendak dicapai Grand Design Tahun 2022-2042 adalah: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mewujudkan kepastian hukum -

pemerintahan yang demokratis diwujudkan melalui pelaksanaan amanat masyarakat DIY oleh Pemerintah Daerah DIY. Kepastian hukum diperoleh melalui penerbitan aturan pelaksana bagi tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat – kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat, (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia – tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka- tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diwujudkan melalui pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah DIY dan pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah DIY dan masyarakat DIY, (4) menciptakan pemerintahan yang baik – Pemerintahan yang baik diwujudkan melalui pelaksanaan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakan hukum, (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

- Ruang lingkup Grand Design DIY 2022-2042 akan membahas poin-poin penting di antaranya (1) gambaran umum Keistimewaan DIY, (2) isu-isu strategis dalam pembangunan DIY, (3) haluan kebijakan Keistimeaaan DIY yang mencakup tujuan Keistimewaan DIY, arah kebijakan Keistimewaan DIY, indikator-indikator keberhasilan, dan peta jalan (*road map*).
- Yang dimaksud dengan isu-isu strategis dalam Grand Design DIY 2022-2042 adalah urusan-urusan khusus yang merupakan Kewenangan-kewenangan Istimewa DIY yaitu (1) urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, (2) urusan kelembagaan pemerintahan daerah, (3) urusan kebudayaan, (4) urusan pertanahan, dan (5) urusan tata ruang.
- Isu Strategis Grand Design DIY 2022-2042 yang berkaitan dengan urusan kelembagaan pemerintahan adalah sebagai berikut. Dalam proses penataan bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY sebagai konsekuensi yuridis diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 perlu memperhatikan, setidaknya, 4 (empat) aspek, yaitu: (1) aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli; (2) aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional; (3) aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan yang ideal; dan (4) aspek perbandingan dengan bentuk dan tata kelola

pemerintahan daerah lainnya yang bersifat khusus atau istimewa. Bentuk kelembagaan baru Pemerintah DIY harus mematuhi dan menerapkan tiga aspek yang pertama demi mewujudkan tujuan kelembagaan Pemerintah DIY yang lebih efektif, efisien, responsif, akuntabel, transparan, dan partisipatif, dengan tetap menghormati kearifan lokal dan dapat memberikan perlindungan terhadap kelompok marginal. Sedangkan perbandingan dengan bentuk dan tata kelola pemerintahan yang diterapkan pemerintah daerah yang juga bersifat khusus atau istimewa lainnya diperlukan untuk memperoleh lesson learned dari kelembagaan yang telah diterapkan demi mendapatkan bentuk kelembagaan yang lebih baik dan lebih implementatif. Dengan itu, kelembagaan baru Pemerintah DIY dapat terhindar dari kekurangan atau hambatan yang pernah atau sedang dihadapi oleh kelembagaan pemerintah daerah yang juga bersifat khusus atau istimewa. Konstruksi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebenarnya merupakan penerapan desentralisasi yang bersifat asimetris. Prinsip asimetris ini mengakibatkan kewenangan pelaksanaan urusan desentralisasi akan berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Tujuan ideal dari prinsip ini adalah untuk memberikan jaminan dan pengakuan terhadap kemajemukan dari setiap daerah dalam sebuah negara kesatuan. Oleh sebab itu, setiap daerah akan berbeda

kelembagaan dan kewenangan yang dimilikinya. Pola dasar inilah yang digunakan para founding fathers Indonesia dalam mengakomodasi keistimewaan dan kekhususan setiap daerah ataupun wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Isu strategis kebudayaan dalam Grand Design DIY 2022-2042 berkaitan dengan langkah kedepan yang harus dilakukan yaitu: (1) "mengembalikan" nilai-nilai yang memang harus dikembalikan karena nilai-nilai tersebut telah menjadi nilai-nilai keistimewaan budaya DIY, (2) "merehabilitasi", nilai-nilai keistimewaan budaya yang sudah menunjukkan tanda keredupan, (3) "menguatkan", nilai-nilai keistimewaan budaya yang mengalami pelemahan oleh nilai-nilai budaya baru dan oleh generasi baru Yogyakarta, dan (4) "mengembangkan", nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.
- Isu strategis tata ruang dalam Grand Design DIY 2022-2042 cukup kompleks. Salah satunya berkaitan dengan 18 Satuan Ruang Strategis dalam penataan ruang keistimewaan DIY, yaitu : (1) Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon : Karaton, Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Sumbu Filosofi dan Tugu Pal Putih sampai dengan

Panggung Krapyak, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagoro, Gunung Merapi, Pantai Samas – Parangtritis, (2) Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon yaitu: Kerto – Plered, Kotabaru, Candi Prambanan - Candi Ijo, Sukoliman, Perbukitan Menoreh, Karst Gunungsewu. Pantai Selatan Gunungkidul, (3) Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Keprabon yaitu Puro Pakualaman dan Makam Girigondo, (4) Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Bukan Keprabon yaitu Pusat Kota Wates dan Pantai Selatan Kulon Progo.

- Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tata ruang DIY adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun secara hirarkis: (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota).
- Rencana Tata Ruang merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. DIY dan kabupaten/Kota di DIY telah memiliki RT/RW, yang sudah mengakomodasi fungsi dan peruntukan kawasan sesuai dengan kedalaman skala masing-masing yaitu untuk Nasional 1 : 250.000, provinsi 1 : 100.000 , kota 1 : 25.000 dan Kabupaten 1:

50.000. sehingga pengaturan pemanfaatan ruang terkait dengan status kepemilikan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sudah diatur di dalamnya. Dengan demikian, fungsi dan peruntukan kawasan pemanfaatan ruang di atas tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten harus mengacu kepada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

- Dalam bidang tata ruang, terdapat 4 (empat) nilai dasar yang sangat perlu diletakkan sebagai “rujukan” sekaligus “panduan” dalam penataan ruang DIY dimasa datang yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ke 4 (empat) nilai dasar tersebut adalah: (a) hamemayu hayuning bawana, (b) sumbu Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak, (c) catur gatra tunggal, dan (d) pathok negara.
- Hamemayu hayuning bawana memberikan ajaran bahwa penataan ruang dan lingkungan harus menuju pada upaya menciptakan ruang wilayah Yogyakarta secara keseluruhan yang rahayu dengan membuang jauh-jauh prinsip-prinsip tindakan pembangunan yang eksploitatif. Sedangkan konsep Sumbu Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak berpesan secara simbolik bahwa bentuk dan susunan tata ruang Yogyakarta yang tersusun oleh poros inti Panggung Krapyak-Tugu Pal Putih adalah kawasan inti ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, yang harus dirawat dan dilindungi, karena kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi identitas Yogyakarta. Setiap upaya penataan kota, harus

berawal dan mengambil rujukan poros ini, sehingga kawasan yang membujur dari utara ke selatan dan diapit oleh Kali Code dan Kali Winongo harus menjadi kawasan inti Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Catur gatra tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar juga merupakan elemen-elemen identitas kota atau jati diri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota; dengan demikian, elemen-elemen ini menjadi kesatuan yang menyambung dengan kawasan inti yang berporos Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak.
- Pathok Negara, sebagai konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta memberikan ajaran bahwa pembatasan perkembangan fisik keruangan kota untuk melindungi fungsi-fungsi lahan pertanian dan perdesaan yang menjadi penyangganya adalah sangat penting. Pembangunan jalan lingkar (ring road) yang menempatkan Masjid Mlangi (barat kota) dan Ploso Kuning (utara kota) berada di luarnya merupakan suatu contoh yang baik. Sedangkan Masjid Babadan (timur kota) dan Masjid Dongkelan (selatan kota) yang sudah terlanjur berada dalam posisi di dalam ring road perlu kearifan dalam pengelolaan tata ruang sekitarnya terutama dalam aspek skala kepadatan dan ketinggian bangunan. Ajaran ini harus diikuti dengan dibangunnya perangkat pengendalian tata ruang yang kuat, teguh, konsisten dan dipercaya masyarakat.

- Dalam konteks Tata Ruang Wilayah DIY secara keseluruhan, keempat nilai dasar keistimewaan tata ruang tersebut diatas memberikan pelajaran bahwa tata ruang DIY adalah tata ruang yang berbasis budaya. Dengan demikian, maka tata ruang DIY kedepan adalah tata ruang yang tersusun oleh satuan-satuan budaya, termasuk di dalamnya Tata Ruang Budaya Karst (Gunung Kidul), Tata Ruang Budaya Pertanian Irigasi (Sleman Barat, Bantul Tengah), Tata Ruang Budaya Lereng Merapi, Tata Ruang Budaya Pantai, dan sebagainya). Dibawah payung UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka segala kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang harus didasarkan pada satuan-satuan ruang budaya.

Bab 2

Apresiasi untuk Pengutamaan Fillsofi

Menurut pengamatan Tim Penulis, masyarakat mengapresiasi dan mendukung Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042 karena mengedepankan keutamaan filosofi dan sistem nilai budaya sebagai basis perencanaan pembangunan. Sistem nilai yang menjadi pedoman perencanaan itu menjadi rambu-rambu pengontrol dan pengarah supaya Keistimewaan DIY yang berbasis sejarah dan kebudayaan itu tetap berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Apresiasi dan dukungan itu sekaligus mengindikasikan bahwa masyarakat Yogyakarta masih cukup kuat komitmennya pada kebudayaan. Hal ini positif sebab menjadi dasar bagi pengembangan kearifan lokal khas Yogyakarta.

Berikut ini adalah cuplikan konsep Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042 berbasis pada filosofi yang disusun oleh Paniradya Keistimewaan, yang setelah didiskusikan oleh Tim Penulis dengan beberapa elemen masyarakat, mendapat apresiasi dan dukungan yang positif.

Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042

Berbasis Filosofi dan Sistem Nilai Ngayogyakarta

“Hamemayu Hayuning Bawana” adalah “filosofi payung” bagi filosofi-filosofi lain karena maknanya

mampu melintas tema, konteks, ruang, dan waktu. Hamemayu Hayuning Bawana adalah filosofi yang maknanya bersifat universal, komprehensif, sekaligus holistik. Beberapa kata kunci yang memiliki substansi dan makna yang melekat erat dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana adalah: (1) Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa, (2) Dharmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara, (3) Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane, (4) Mangasah Mingising Budi, (5) Memasuh Malaning Bumi. Dengan demikian, di dalam deskripsi mengenai filosofi Hamemayu Hayuning Bawana ke lima filosofi yang disebutkan di atas akan secara implisit dibahas sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau saling mengkait.

Filosofi-filosofi yang juga melekat dalam pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain adalah (1) Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula- Gusti; (2) Tahta Untuk Rakyat; (3) Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh; (4) Catur Gatra Tunggal dengan sumbu imajiner Gunung Merapi - Laut Selatan dan sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak; (5) Pathok Negara, karena memiliki makna yang eksplisit berdiri sendiri dan masih berada di bawah payung Hamemayu Hayuning Bawana. Sistematika dan urutan penulisan “nilai dasar” atau “semangat keistimewaan” ini adalah:

1. Hamemayu Hayuning Bawana
2. Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti
3. Tahta Untuk Rakyat
4. Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh
5. Catur Gatra Tunggal dengan sumbu imajiner dan sumbu filosofis
6. Pathok Negara

Adapun penjelasan dari nilai-nilai dasar keistimewaan tersebut adalah:

1) Hamemayu Hayuning Bawana

Konsep Hamemayu Hayuning Bawana merupakan suatu konsep yang universal, komprehensif, sekaligus holistik. Dikatakan universal karena konsep ini mampu melintasi versi-versi nilai dari ruang dan waktu sejak HB I sampai saat ini. Dikatakan komprehensif karena konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari spiritual, budaya, tata ruang, lingkungan sampai ekonomi. Dikatakan holistik, karena konsep ini mencakup tidak hanya sekedar dua dimensi kehidupan saja (ruang dan waktu), melainkan mencakup dimensi ketiga yang berupa nilai-nilai transendental.

Falsafah Hamemayu Hayuning Bawana yang diyakini telah ada sejak lahirnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Bahkan konon Sejak Jaman Sultan Agung bertahta di kerajaan Mataram falsafah Hamemayu Hayuning Bawana ini telah ada bersama dengan falsafah Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi. Makna yang lebih dalam dari falsafah Hamemayu Hayuning Bawana ini adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu menjaga keseimbangan, keserasian, harmoni dan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan seru sekalian Alam, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna menjaga Bawana atau dunia ini tetap Hayu yang bermakna indah dan Rahayu yang bermakna lestari. Salah satu tugas manusia di dunia ini harus berfungsi sebagai rahmatan lil alamin (Sumber: Tim Dewan Kebudayaan DIY dan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya, Dinas Kebudayaan DIY, 2012: halaman 41).

Implikasi dari konsep Hamemayu Hayuning Bawana sangat luas, karena Bawana sendiri dipahami sebagai yang tangible dan intangible serta sebagai *bawana alit* dan *bawana ageng*. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi rujukan hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (Negara). Konsep ini

mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Implikasi-implikasi penting (prioritas) dari konsep Hamemayu Hayuning Bawana terhadap keistimewaan DIY dapat diwujudkan dalam berbagai aspek. Implikasi pada pembangunan lingkungan dan tata ruang fisik adalah pentingnya menciptakan ruang wilayah Yogyakarta yang rahayu dengan membuang jauh-jauh prinsip-prinsip tindakan pembangunan yang eksploitatif, serakah dan sewenang-wenang. Implikasi dalam pembangunan ekonomi menekankan pada hamemayu hayuning kawula dengan menekankan ekonomi yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, penguatan harga diri kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan dipinggirkan, serta mengayomi masyarakat dari rasa ketakutan dan ketidakamanan. Pembangunan sosial yang berbasis hamemayu hayuning bawana menekankan pada hamemayu hayuning bebrayan dengan selalu menyuburkan Yogyakarta sebagai wilayah terbuka untuk multi suku, multi ras, multi agama, multi budaya, dan multi warna kulit; dengan perkataan lain Yogyakarta adalah miniatur Indonesia dan bahkan dunia.

Praktek hamemayu hayuning bawana pada pembangunan pendidikan menekankan pada hamemayu hayuning rasa-cipta-karsa yang menyandang makna

bahwa pendidikan di Yogyakarta harus dikembangkan tidak hanya kearah kognitif, rasio, kecerdasan saja, melainkan pendidikan yang mengarah pada tumbuhnya rasa yang baik, kemampuan cipta yang baik, dan gerak karsa yang baik; etika, budi pekerti, tata karma, sopan santun, menghargai orang lain akan “dikembalikan” lagi sebagai “semangat keistimewaan” dalam sistem pendidikan di Yogyakarta.

Implikasinya pada pembangunan teknologi menekankan pada hamemayu hayuning karya dalam pengertian setiap karya teknologi yang diciptakan atau diintrodusir kepada masyarakat Yogyakarta hendaknya adalah teknologi yang tidak memperkosakan budaya dan identitas teritorial di Yogyakarta, karena Yogyakarta tersusun oleh satuan-satuan wilayah budaya yang berbasis teritori alam. Implikasi konsep tersebut pada pembangunan budaya menekankan pada hamemayu hayuning budaya yang bermakna memelihara, melindungi, menguatkan, mengembalikan, mencegah kerusakan, sekaligus mengembangkan budaya (dalam arti luas), sehingga generasi saat ini maupun saat nanti akan memiliki kesadaran budaya sebagai kesadaran peradaban karena budaya adalah “inti dari keistimewaan” Yogyakarta.

Hamemayu hayuning bawana dalam pembangunan hukum menekankan hamemayu hayuning kautaman yang memiliki pengertian bahwa pembangunan hukum tidak hanya sekedar menegakkan

sanksi hukum formal secara tegas saja, melainkan pembangunan hukum yang mengarah pada pembentukan karakter manusia Yogyakarta yang utama atau baik (*kautaman*). Pembangunan hukum juga harus mengaktualisasikan hukum adat, hukum masyarakat yang berbasis budaya, serta konsensus-konsensus warga yang arahnya membangun kebaikan hidup bersama. Dengan demikian, pembangunan hukum di Yogyakarta tidak hanya sekedar pelaksanaan hukum formal saja melainkan hukum yang mengarah pada pembangunan *kautaman* manusia Yogyakarta (santun berlalulintas, menghargai hak dan karya orang lain, tertib di tempat pelayanan publik, tunduk dan patuh kepada upaya ketertiban-kebersihan-keindahan ruang publik, malu melakukan tawuran dan perkelahian masal, serta *kautaman-kautaman* lain).

2) Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti

Konsep Sangkan Paraning Dumadi berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (*sangkan paraning dumadi*). Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (*mulihmulamulanira*). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (*jagadgedhé*; makrokosmos), termasuk manusia (*jagadcilik*; mikrokosmos), dengan keagungan cinta kasih-Nya.

Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (*tankenakinayaapa*).

Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara (*owahgingsiringkanyatan, mobahmosikingkahanan*), bahkan manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air (*urip iku bebasan mung mampir ngombé*), sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati (*Kasunyatan Jati*) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal pun pula tiada berakhir. Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketentraman.

Konsep ini menjadi inspirasi Manunggaling Kawula lan Gusti yang berdimensi vertikal dan

horizontal. Manunggaling Kawula Gusti dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai *piwulang* simbol ketataruangan. Manunggaling kawula gusti memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, berarti manunggaling kawula gusti adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Penataan letak bangunan antara Panggung Krapyak sampai Tugu Golong Gilig di tengah Kota Yogyakarta berada dalam suatu garis lurus yang disebut garis imajiner. Bentuk tata ruang yang demikian mengandung makna *piwulang* Sangkan Paraning Dumadi – Manunggaling Kawula Gusti. Dalam model kepemimpinan seperti itu, maka Keraton melalui HB I ingin mengajarkan suatu kepemimpinan yang demokratis di satu sisi dan di sisi lain mengajarkan kepemimpinan yang menekankan kepada loyalitas, kepercayaan dan keikhlasan. Model kepemimpinan semacam itu mampu menggerakkan lembaga dan birokrasi secara ringan, sederhana dan luwes. Hirarki kelembagaan dapat disederhanakan tetapi tetap dihormati. Prosedur dan proses birokrasi pelayanan kepada masyarakat menjadi sederhana dan mudah

tanpa meninggalkan kepercayaan dan kualitas. Proses kolektif dalam pengambilan keputusan sangat ditekankan, mulai dari tingkatan propinsi sampai ke tingkatan rukun tetangga. Dengan perkataan lain, model kepemimpinan ini akan memiliki kapasitas menganyam struktur formal kelembagaan pemerintahan dengan struktur-struktur non-formal yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta.

Agenda-agenda pembangunan pada level paguyuban, arisan, pengajian, persekutuan, rukun tetangga (RT) sampai rukun warga (RW) akan menjadi bagian integral dari agenda kelurahan, kecamatan dan propinsi. Seluruh lembaga formal pemerintahan dan seluruh lembaga non-formal kemasyarakatan “manunggal” dalam gerak kedepan kelembagaan keistimewaan DIY. Tidak ada satupun unsur insan warga DIY yang akan merasa tertinggal atau ditinggalkan oleh laju gerbong keistimewaan DIY, karena “*kemanunggalan*” akan mengundang “keterlibatan” siapapun yang peduli dengan DIY.

Dalam perspektif tata ruang (lihat kutipan kedua), konsep Manunggaling Kawula Gusti menyandang arti simbolik bentuk dan susunan tata ruang Kota Yogyakarta yang tersusun oleh poros inti Panggung Krapyak – Tugu Golong Gilig. Kata sangkan atau sankaning yang memiliki arti “asal” menunjuk arti pada penggal poros dari Panggung Krapyak sampai Kraton, memiliki makna perjalanan

“asa’l ovum dari rahim ibu yang berjumpa dengan sperma dari ayah (Tugu Golong Gilig) yang manunggal atau manunggaling kawula Gusti di pusat yakni Kraton. Sedangkan kata paran atau paraning dumadi menunjuk perjalanan sperma ayah meluncur ke bawah untuk menjumpai ovum ibu dan bertemu di pusat yakni Kraton.

Konsep tata ruang seperti itu mengajarkan kepada kita bahwa kota Yogyakarta memiliki konsep inti ruang yang harus dirawat dan dilindungi, karena di dalamnya identitas dari kota ini tersandang. Dengan demikian, pola pembangunan bangunan vertikal di kawasan inti ini memang harus dibatasi agar tidak menenggelamkan karakter ke horisontalan poros Panggung Krapyak-Tugu.

Setiap upaya penataan kota, harus berawal dan mengambil rujukan poros ini, sehingga kawasan yang membujur dari utara ke selatan dan diapit oleh Kali Code dan Kali Winongo harus menjadi kawasan inti Kota Yogyakarta. Konsep ini berpesan bahwa pola kota memang harus mengikuti pola poros arah utara-selatan (gunung-laut) karena pola ini memiliki rasionalitas ekologis, berkaitan dengan pola hidrologi atas dan bawah tanah kota ini. Pola-pola pembangunan yang melintang terutama pembangunan gedung-gedung dengan ruang bawah tanah (*basement*) akan sangat mengganggu ekologi air bawah tanah kota ini, karena pembangunan seperti itu akan memotong urat-urat air yang

sebagian besar berpola utara-selatan. Itulah tantangan saat ini dan ke depan dari konsep Manunggaling Kawula Gusti dari sisi tata ruang.

3) Tahta Untuk Rakyat

Konsep Tahta Untuk Rakyat (TUR) dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep Manunggaling Kawula Gusti (MKG), karena pada hakekatnya keduanya menyandang semangat yang sama yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Tekad ini melanjutkan tekad ayah beliau, Sultan HB IX, Tahta Untuk Rakyat. Peneguhan tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, adalah komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana Hamangku, Hamengku, Hamengkoni.

Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis Manunggaling Kawula Gusti. Keberadaan Kraton karena adanya

rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa Revolusi dulu.

Pada pernyataan Sultan HB X di atas, terdapat 4 (empat) sasaran dari keberpihakan Sultan kepada Rakyat yang menjadi inti dari Tahta Untuk Rakyat, yakni: kesejahteraan, keadilan, kebenaran, dan keterlindungan. Kesejahteraan dan keadilan memiliki implikasi pada konsep ekonomi yang berpihak kepada rakyat, sedangkan kebenaran dan keterlindungan adalah konsep hukum yang menitik beratkan pada hak dan rasa keterlindungan rakyat terutama kaitannya dengan pertanahan.

Tahta Untuk Rakyat telah diterjemahkan ke dalam beberapa konsep pemanfaatan dan penggunaan tanah Kraton oleh rakyat seperti: (1) tanah hak *Andarbe tan keno diliyerke* (hak mengelola tidak boleh dipindahtangankan) seperti tanah *bengkok/lungguh* (penghasilan pamong), tanah *pengarem-arem* (penghargaan pensiun), dan tanah *titisara* (untuk kepentingan desa/publik), (2) tanah hak *Anganggo* turun temurun yakni hak pemanfaatan tanah oleh individu.

4) Golong Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh

Falsafah Golong Gilig ini merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penjajahan. Konsep ini melambangkan menyatunya cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Falsafah tersebut juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau manunggaling Kawula-Gusti. Sawiji, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan YME dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. Greget, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. Sengguh, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. Ora Mingkuh, bermakna bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan Negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

5) Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Filosofis dan Imaginer

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. Caturgatratunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga. Apabila empat elemen tersebut ditiadakan atau tertiadakan maka Yogyakarta akan tertiadakan juga secara fisik. Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi – Laut Selatan. Kota Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema perennial (abadi) berupa alam (gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi humanism metaphoric di atasnya. Keberadaan sumbu imajiner dari Gunung Merapi – Laut Selatan dan sumbu filosofis antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan *cultural landscape* (pusaka saujana, sejauh mata memandang).

Yogyakarta yang tertuang dalam tata ruang kota ditata sangat istimewa dengan konsep yang sangat tinggi dan sarat makna. Tervisualisasikan dalam wujud cagar budaya yang meliputi Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan. Secara simbolis filosofis sumbu

imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablun min Allah*), manusia dengan manusia (*Hablun min Annas*), manusia dengan alam yang termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (*dahana*) dari gunung Merapi, tanah (*bantala*) dari bumi Ngayogyakarta, dan air (*tirta*) dari laut Selatan, angin (*maruta*) dan akasa (*either*).

Tugu Golong Gilig dan Panggung Krpyak merupakan simbol Lingga dan Yoni yang melambangkan kesuburan. Konsep yang Hinduistik ini oleh Sri Sultan Hamengku Buwana I diubah menjadi konsep Jawa Sangkan Paraning Dumadi. Tugu golong gilig bagian atasnya berbentuk bulatan (golong) dan bagian bawahnya berbentuk silindris (gilig) dan berwarna putih sehingga disebut juga Pal Putih. Tugu Golong Gilig ini melambangkan keberadaan Sultan dalam melaksanakan proses kehidupannya yang dilandasi dengan ketulusan dalam menyembah kepada Tuhan Yang maha Esa, disertai satu tekad menuju kesejahteraan rakyat (golong – gilig) dan didasari hati yang suci (warna putih).

Nilai filosofis yang dapat ditarik dari Panggung Krpyak ke utara merupakan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan anak¹. Sementara itu, dari Tugu Pal Putih ke arah selatan merupakan perjalanan manusia menghadap Sang Khaliq. Golong-Gilig melambangkan bersatunya cipta, rasa

dan karsadilandasi kesucian hati (warna putih) melalui Margotomo (jalan menuju keutamaan) ke selatan melalui Malioboro (memakai obor/ pedoman ilmu yang diajarkan para wali), terus ke selatan melalui Margomulyo (jalan menuju kemuliaan), kemudian melalui Pangurakan (mengusir nafsu yang negatip).

Jumlah pohon beringin di alun-alun Utara sebanyak 64 (enam puluh empat) termasuk dua ringin kurung di tengah-tengah alun-alun. Jumlah tersebut sesuai dengan usia Nabi Muhammad menurut perhitungan tahun Jawa. Dua ringin kurung mempunyai nama yang berbeda. Ringin kurung sebelah timur bernama Janadaru, dan yang sebelah barat bernama Dewadaru. Kedua ringin kurung tersebut melambangkan Manunggaling Kawula - Gusti. Posisi ringin Dewadaru di sebelah barat dan Janadaru di sebelah Timur melambangkan konsep *Hablum min Allah wa Hablum min Annas*.

Konsep Catur Gatra Tunggal yang tidak lepas dari konsep sumbu imajiner dan sumbu filosofis, bukan hanya sekedar meletakkan dasar identitas atau keabadian saja, melainkan juga memiliki kapasitas memandu dengan tersambungunya empat elemen kota ini dengan sumbu Kraton-Tugu yang memberikan arah panduan perkembangan kota menuju ke utara sampai Tugu dan melintang ke kiri (barat) ke arah Kali Winongo serta melintang ke kanan (timur) ke arah Kali Code. Konsep ini memberikan makna teks sekaligus konteks (ruang

dan waktu), dalam arti konsep ini telah memberikan “modal” awal bagi pembentukan kota dan sekaligus memberikan “bekal” pada perkembangan kota di masa depan.

Pola simbolik kota ini telah menjadi panduan sekaligus pemandu perkembangan Kota Yogyakarta sampai saat ini, sehingga keberadaan kota dari 1756 sampai 2012 menunjukkan suatu anyaman kemenerusan sekaligus keterikatan antara kesadaran ada transendental, kesadaran mengada intensional dan kesadaran berada eksistensial. Hakekat keberadaan Yogya terpelihara karena inti keberadaan kota terpelihara secara sadar. Inti keberadaan Yogya adalah bentang ruang memanjang dari utara ke selatan dan diapit oleh dua sungai yakni Code dan Winongo. Ketika keberadaan bentang kawasan ini dilukai dengan bangunan-bangunan tinggi menjulang, maka terlukalah Kota Yogya. Poros pandang sinewaka dari Siti Hinggil ke Tugu memang mengajarkan kesadaran transendental bahwa Kota Yogya adalah kota horisontal bukan kota vertical.

Yogyakarta memang memiliki “modal dasar budaya” yang menyatu ke dalam bentuk tata ruang atau tata keruangan. Tugas imperatif dari Perdas Tata Ruang adalah: melindungi, melestarikan, menguatkan, mempertahankan, meneguhkan, dan mengembangkan satuan-satuan keunikan tata ruang berbasis budaya tersebut.

Keistimewaan Yogyakarta dapat dilihat juga dari dimensi tata ruang kota yang sejak awal terbentuknya sudah mencerminkan catur gatra tunggal (kraton, masjid, alun-alun, pasar). Konsep ini memiliki nilai filosofis yang tinggi terkait dengan perkembangan kota ke depan yang memperhitungkan segala aspek yaitu fisik, ekonomi, sosial, agama, dan infrastruktur. Kekuatan catur gatra tunggal didukung pula oleh konsep pertahanan suatu kota dari pengaruh luar. Konsep ini diwujudkan dengan pertahanan fisik (beteng dan jagang) dan pertahanan non fisik (masjid pathok negara) sebagai pertahanan yang melibatkan peran aktif masyarakat.

6) Pathok Negara

Pathok Negara adalah salah satu konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta, yang tidak hanya sekedar ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang didalamnya secara implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam, dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, Pathok Negara telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat ini.

Pada sisi lain terdapat Masjid Pathok Negara yang tersebar di empat penjuru pinggiran kota Yogyakarta, yang berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena kawasan Masjid-masjid Pathok Negara tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di masjid pathok Negara tersebut adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Dengan demikian segala pengaruh sosial yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan terhadap anasir-anasir asing.

Secara spasial, konsep Pathok Negara sesungguhnya memberikan pesan dan pelajaran yang sangat berharga yakni pentingnya membatasi perkembangan fisik ke ruangan kota untuk melindungi fungsi-fungsi pertanian dan perdesaan yang menjadi penyangganya. Dalam perspektip pembangunan kota moderen konsep ini mirip dengan konsep *greenbelt*. Pembangunan jalan lingkaran (*ring road*) yang menempatkan Masjid Mlangi dan Ploso Kuning berada di luarnya merupakan suatu contoh yang baik. Namun, konsep ini telah mendapatkan tantangan yang luar biasa oleh lemahnya kendali tata ruang yang ditandai oleh munculnya satuan-satuan hunian baru yang merambah ke kawasan pertanian.

Bab 3

Apresiasi untuk Visi Pembangunan DIY

Dari pengamatan Tim Penulis, setelah masyarakat memberi apresiasi dan dukungan terhadap Paniradya Kaistimewan dalam hal visi pembangunan. Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042 cukup komprehensif karena visi yang ditetapkan dalam rencana induk itu sudah diolah dari visi-misi Gubernur DIY masa bakti 2008-2012, masa bakti 2012-2017, dan masa bakti 2017-2022 dengan visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 adalah mewujudkan DIY menjadi pusat pendidikan dan budaya.

Berikut ini adalah paparan Paniradya Kaistimewan DIY mengenai dasar visi pembangunan untuk perumusan Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042, sebagai berikut.

Grand Design DIY 2022-2042 ini tidak lepas dari perjalanan visi pembangunan yang telah diupayakan oleh Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam membangun Keistimewaan Yogyakarta dengan kontribusi menciptakan pra kondisi menuju 'manusia yang utama' (*jalma kang utama*) sebagai aktor utama dalam membentuk peradaban baru. Visi-misi tersebut dijabarkan melalui penjelasan singkat yang dimulai dari:

(1) Pergeseran Pusat Peradaban, dewasa ini, ada tanda-tanda lahirnya Abad Pasifik yang membawa pergeseran pusat gravitasi dunia dari Atlantik ke Pasifik. Banyak tokoh yang memprediksikan pergeseran itu, misalnya Nakasone, Toynbee serta Spengler, Roosevelt, Anwar Ibrahim serta Bung Karno. Tahun 1974, Overholt meramal kebangkitan Pasifik dari perspektif sejarah. Tentang sejarah, beberapa kawasan bergantian menjadi pusat dinamika ekonomi dunia dari China, Timur Tengah, Mediterania, Inggris, Laut Utara hingga Atlantik Utara. Krisis finansial di Eropa dan maraknya 'Arab Spring' di Timur Tengah mendukung tren perubahan geopolitik yang menggeser pusat peradaban dari Barat ke Timur. Gelombang demokrasi telah terjadi di Tunisia, Mesir, Libya, Bahrain dan kini tengah berlangsung di Suriah. Fenomena itu menimbulkan destabilisasi politik, ekonomi dan sosial di Eropa dan Timur Tengah. Krisis global itu mengakibatkan demistifikasi global atas kompetensi Barat. Implikasinya, Barat harus secara tegas meninggalkan kapitalisme pasar tanpa kekang, yang menjadi ciri dekade ini. Memang, masih terlalu pagi untuk memprediksi apakah ini penolakan sementara, atautkah perubana arah signifikan dalam jangka panjang. Trend serupa juga terjadi di dunia spiritualitas, 'Barat berkiblat ke Timur', yang diyakini, spiritualitas Timur bisa mengatasi krisis spiritual Barat sebagai reaksi balik atas dosa-dosa sains, kapitalisme,

imperialisme yang eksploitatif atas manusia, lingkungan dan masyarakat. Dulu, bangkitnya Barat mengubah dunia. Tetapi sekarang, Barat menjadi bagian dari solusi sekaligus masalah. Bangkitnya Timur sekarang akan membawa perubahan signifikan serupa.

(2) BRICS dan Peran Indonesia, kebangkitan Timur juga ditandai kekuatan ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) yang berperan dalam ekonomi global. Kita menunggu bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS untuk memperkuat dunia Timur, yang akan membawa perubahan lanskap internasional. Beberapa ahli Barat menangkap implikasi atas perubahan itu. Pertama, akan mencapai titik akhir era dominasi Barat, tetapi bukan akhir Barat, yang tetap sebagai kekuatan peradaban besar untuk beberapa dekade ke depan. Kedua, kita akan menyaksikan renaissance Asia yang menakjubkan, yakni derap langkah 'Asia Menuju Modernitas' (*Asian march to modernity*). Sekarang, ekonomi terbesar kedua dan ketiga berada di Asia, China dan Jepang. Jika pada 2012, prediksi IMF terbukti, China menjadi negara adidaya ekonomi terbesar, hal ini mengukuhkan pergeseran gravitasi ekonomi global dari Barat ke Timur.

(3) Putar Kemudi ke Visi Maritim, Majapahit sebagai negara maritim utama, pernah memiliki armada maritim 2.800 perahu, melebihi jumlah rata-rata kapal dalam satu ekspedisi yang hanya 100 perahu, juga

lebih besar daripada Makassar yang memiliki 200 perahu. Dalam transkrip Marcopolo, ketika tahun 1271 ia ke Sumatera, walau tidak ke Jawa, ia menulis, "Pulau Jawa itu kaya sekali." Negarakertagama menceritakan: Ada 98 tempat di nusantara yang membayar pajak kepada Majapahit, termasuk 16 di semenanjung Melayu, Pahang, Langkawi, Kelantan, Trengganu, Tumasik (Singapura), Kelang serta Kedah. Pramoedya Ananta Toer dalam Arus Balik menggambarkan kekuatan maritim Nusantara pernah berpendaran damai ke Utara. Tetapi arus zaman berbalik, saat kekuasaan laut menjadi kekuasaan darat di pedalaman, kemuliaan menukik dalam kemerosotan, kejayaan berubah ke kekalahan, kecemerlangan cendekia menjadi kemandegan penalaran, kesatuan menjadi perpecahan. Mundur bukan dalam arti geografis saja tetapi mundur ke pedalaman diri sendiri, ke pedalaman nurani dan kenalurian yang mengganti nalar rasional. Bertolak dari refleksi sejarah itu, kita harus meneguhkan kembali jati diri bangsa sebagai penghuni negara Maritim, beranjak dengan visi dan strategi cerdas keluar dari paradigma agraris tradisional ke paradigma maritim rasional berwawasan global, memutar kemudi ke arah visi negara maritim. Arus Balik itu yang harus menjadi motivasi membangun peradaban baru unggul yang menghasilkan 'manusia Indonesia yang utama', yang berasaskan Ketuhanan, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan', dengan

mengandalkan modal dasar 'kebudayaan dan pendidikan'.

(4) Dari 'Among Tani' ke 'Dagang Layar', mengikuti trend pergeseran peradaban ke Timur, Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya yang unggul juga dengan strategi budaya: membalik paradigma 'among tani' menjadi 'dagang layar'. Dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman. Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan. Perubahan paradigmatis ini paralel, bahkan terdukung oleh kebijakan ekonomi nasional dengan ditematkannya wilayah Kulonprogo dalam program MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia) berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk dalam 'Koridor Delapan' seluas 3500-3700 ha. Konsekuensinya, perlu melakukan kaji ulang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara komprehensif, menyeluruh dan lengkap, dengan menempatkan Jawa bagian selatan untuk penyebaran pertumbuhan. Mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari wilayah Panturea ke Pantai Selatan dengan berkembangnya klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim, yang didukung infrastruktur jalan selatan-selatan, menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.

(5) Renaisans Yogyakarta, renaissans atau pembangkitan kembali budaya lama digunakan sebagai strategi kebudayaan untuk membangun peradaban baru Yogyakarta. Dengan mengadopsi Renaisans Eropa, mengadaptasi Renaisans Asia dan menyempurnakan Renaisans Jawa, Renaisans Yogyakarta diawali dengan menggali, mengkaji dan mengembangkan sumber-sumber ilmu pengetahuan canggih yang menghasilkan candi Borobudur dan Prambanan. Bersamaan dengan itu, mencermati karya-karya susastra, seperti Serat Pararaton, Negarakertagama, Centhini, Wedhatama, Wulangreh. Dengan cara itu, selain guna memperkaya nilai-nilai filosofis yang mengajarkan kebajikan bagi bangsa, juga mencerahkan nalar, agar tercipta kondisi kondusif, berkembangnya seni dan sains seperti sejarah Renaisans Eropa. Tetapi, keberhasilan membangun Borobudur itu, tidak dengan sendirinya menghadirkan wawasan kreatif tentang arsitektur dan teknologi bangunan canggih di masa kini. Bangsa yang pernah membangun Borobudur, dapat menciptakan ‘Borobudur-Borobudur’ baru, atau historiografi setaraf Pararaton dan Negarakertagama, ensiklopedi selengkap Babad Tanah Jawa, atau pitutur luhur sekelas Wedhatama dan Wulangreh, selama bangsa ini tekun membuka diri terhadap sains dan teknologi baru, beradaptasi dengan kemajuan zaman. Saat ini Yogyakarta menjadi pusat seni lukis dan patung di Asia Tenggara, yang menandai kebangkitan seni, seperti

dulu Renaisans Eropa. Jika melihat Biennale Yogyakarta, seakan mengikuti jejak Michelangelo dengan karya masterpiecenya patung Pieta yang mengawali zaman Renaisans Eropa. Di Yogyakarta, kita temukan karya-karya patung terbesar di berbagai ruang publik yang ‘mengejutkan’ khalayak, sekaligus dinikmati pendatang. Renaisans Yogyakarta yang dipayungi filosofi hamemayu hayuning bawana, dihidupi semangat gotong royong yang mengacu konsep manunggaling kawula-gusti dan golongan gilig, diekspresikan oleh sikap satriya: sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, memberikan vitalitas dan ruh baru dari pergeseran peradaban yang bergerak menuju ke Timur.

Melalui Renaisans Yogyakarta adalah upaya dengan mengembalikan nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan jati diri berbangsa yang kini tidak lagi menjadi penuntun gerak bernegara, gerak pemimpin dan kerja birokrasi, serta gerak kehidupan seluruh elemen bangsa untuk menuju Indonesia yang bermartabat. Arah Renaisans Yogyakarta dipayungi kebijakan pembangunan kebudayaan dalam arti luas, sekaligus menjadikannya arus utama pembangunan. Riset global oleh Harvard Academy for International and Area Studies tahun 1990-an menguatkan bahwa, “Budaya menentukan kemajuan dari setiap masyarakat, negara, bangsa di seluruh dunia, baik di tinjau dari sisi politik, sosial, maupun ekonomi. Renaisans Kebudayaan

hendaknya memanfaatkan tren pergeseran pusat peradaban ke timur, dengan menjadikan Yogyakarta laboratorium pengembangan budaya-budaya etnik nusantara untuk penguatan ke-Indonesia-an. Melalui Renaisans Kebudayaan itulah yang mengantarkan “Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru”.

(6) “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”, kemuliaan dalam visi Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia, yakni terpenuhinya kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas. Rumusan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Panca Mulia kemudian dirumuskan ke dalam Misi pembangunan DIY dengan mengakomodir dua substansi yakni Panca Mulia 1, 2, dan 3 dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban; dan substansi Panca Mulia 4 dan 5 yakni mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Sehingga penempatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan

RPJMD masuk dalam misi pertama yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban” dengan tujuan “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”.

Dalam menguatkan haluan visi-misi di atas tersebut, perlu sebuah estafet ideologis dan filosofis sebagai upaya untuk menyambung satu tarikan nafas Keistimewaan DIY. Oleh karena itu, estafet tersebut bernama Grand Design Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya Grand Design berisi arah kebijakan pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kurun waktu mendatang. Rencana Induk harapannya memberikan jaminan terhadap Road Map dan atau Master Plan sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan tujuan keistimewaan dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Grand Design berisi haluan, arahan, dan pedoman sebagai kaidah umum teknik pelaksanaan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kurun waktu 2022-2042. Sedangkan Road Map dan

atau Master Plan adalah bentuk operasionalisasi Grand Design yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan tujuan keistimewaan dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design ditetapkan melalui Peraturan Gubernur, agar memungkinkan memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu *living document*.

Bab 4

Apresiasi untuk Program-program Unggulan

Dalam serangkaian diskusi yang dilakukan oleh Tim penulis bersama beberapa tokoh masyarakat, diperoleh respon positif dan apresiatif dari masyarakat tentang program-program unggulan dalam pembangunan Keistimewaan DIY. Masyarakat berharap supaya program-program itu dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang dalam rangka Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042 itu.

Berikut ini adalah data tentang program-program unggulan Keistimewaan DIY dari Paniradya Kaistimewan DIY, yang mendapat apresiasi masyarakat itu.

Penyelesaian JJLS Untuk Merevitalisasi Kawasan Selatan DIY

Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) mulanya merujuk pada kesepakatan 5 Gubernur yaitu Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur pada tahun 2004. Kesepakatan tersebut mempunyai maksud untuk mengembangkan potensi Pulau Jawa Bagian Selatan. Sedangkan tujuan kesepakatan bersama tersebut adalah untuk mengembangkan Pulau Jawa Bagian Selatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah antara lain di Bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri dan Perdagangan serta Pariwisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing – masing wilayah. Jaringan

Jalan Lintas Selatan (JJLS) adalah solusi berkelanjutan terhadap upaya untuk menekan ketimpangan pembangunan wilayah selatan. JJLS dibangun membentang dari Kulon Progo, Bantul, hingga Gunungkidul, sepanjang 116,07 km. JJLS merupakan infrastruktur strategis yang diharapkan mampu merevitalisasi kawasan selatan DIY menjadi lebih berdaya guna secara ekonomi, sosial, dan berkelanjutan. Keberadaan akses berupa jalan yang memadai untuk 4 lajur ini, dimungkinkan sebagai pengungkit terhadap akses wisata atau sarana pendukung lainnya, seperti bandara atau pelabuhan dengan spot-spot pertumbuhan lainnya di selatan Jawa.

JJLS memiliki harapan untuk menumbuh kembangkan kawasan disekitarnya menjadi lebih berkembang, sebagaimana diketahui tiga kabupaten yang dilewati JJLS merupakan kawasan yang rentan miskin. Adanya JJLS memberikan harapan keniscayaan terhadap pertumbuhan kawasan selatan secara lebih baik. Untuk itu, keberadaan JJLS harus dimaknai sebagai kebangkitan wilayah selatan, yang diharapkan seiring dengan pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo dan Pelabuhan Tanjung Adikarta, serta pengembangan wisata pantai selatan sepanjang pesisir Bantul & Gunungkidul. Adanya JJLS mengakibatkan kawasan selatan menjadi semakin terbuka terhadap kawasan sekitarnya, termasuk Jawa Tengah bagian selatan, sehingga keberadaan jalan yang memiliki lebar 24-60 meter itu, menjadi penting untuk segera diwujudkan.

Pembiayaan pengadaan tanah JJLS, dimulai sejak 2005 merupakan kolaborasi dari APBD Pemerintah Daerah DIY dan APBD kabupaten setempat. Pembiayaan melalui Dana Keistimewaan (urusan tata ruang) pada tahun 2014 hingga saat ini. Alokasi dana keistimewaan untuk pembangunan JJLS, terutama pada alokasi pengadaan tanahnya, menjadi titik ungit dalam melakukan percepatan pembangunan JJLS di DIY.

Pengadaan tanah untuk dua lajur telah selesai pada tahun 2020, sedangkan untuk empat lajur diharapkan selesai pada tahun 2025. Artinya, pada tahun 2020 Kebutuhan tanah untuk 2 lajur sudah selesai terbebaskan sepanjang trase JJLS. Jalan Pantai Lintas Utara (PANTURA) merupakan Jalan Nasional yang menjadi *Backbone* sarana prasarana transportasi yang mempunyai trase sejajar dengan Pantai Utara. Keberadaan Jalan PANTURA menjadi salah satu faktor dalam perkembangan ekonomi yang pesat pada sisi utara di Pulau Jawa. Senada dengan hal tersebut, tujuan pembangunan JJLS mempunyai Roh yang sama dengan Jalan PANTURA yaitu sebagai *Backbone* sarana dan prasarana transportasi di sisi selatan Pulau Jawa, dengan fungsi Jalan arteri primer dan dari segi aspek keselamatan jalan, pembebasan tanah untuk kebutuhan 4 lajur JJLS dirasa sangat diperlukan. Sehingga diharapkan pada Tahun 2025 pembebasan tanah untuk 4 lajur sepanjang JJLS dapat terbebaskan.

Pembangunan JJLS merupakan kolaborasi, dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Keduanya menyepakati pembagian tanggung jawab dan kewajiban masing – masing dalam rangka terwujudnya pengembangan wilayah Pantai Selatan khususnya pembangunan jalan JJLS. Pemerintah Daerah baik kabupaten setempat maupun DIY sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, tanaman/tumbuhan/karangkitri maupun bangunan. Sedangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) berkewajiban membangun fisik konstruksi jalan berikut dengan bangunan pelengkapinya pada lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh pemerintah daerah.

Meskipun penyediaan lahan untuk 2 lajur telah terselesaikan di tahun 2020 ini, namun jaringan jalan JJLS belum tersambung sepenuhnya. Terdapat 3 titik penting yang masih belum terbangun untuk menyambungkan JJLS sesuai trase yang direncanakan. Adapun titik – titik adalah: (1) Jembatan Srandakan 3, (2) Jembatan Kretek 2, (3) Ruas Parangtritis – Giri jati (Kelok 18).

Jembatan Srandakan 3 berada di antara ruas Ngremang - Pandansimo dan ruas Pandansimo - Samas. Jembatan ini direncanakan memiliki bentang sepanjang 240 m dan lebar 21 m (4 lajur). Jembatan ini menjadi sangat penting karena dapat menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul dan meningkatkan aksesibilitas pengguna jalan menuju Bandara YIA. Sampai dengan tahun 2020 ini, desain Jembatan Srandakan 3 masih

dalam tahap *review design* oleh Kementerian PUPR.

Jembatan Kretek 2 berada di ruas Samas - Parangtritis dan melintasi Sungai Opak. Jembatan ini direncanakan memiliki bentang 139 m dan lebar jalan 14 m. Jembatan Kretek 2 mempunyai tipe *cable stayed* dan telah mendapatkan sertifikat persetujuan pelaksanaan konstruksi oleh Menteri PUPR No. JB.02.02- Mn/2165 tanggal 31 Desember 2018. Jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan antara pantai Samas dan Pantai Parangtritis yang terbelah oleh keberadaan sungai Opak. Progress pembangunan jembatan Kretek 2 sampai dengan tahun 2020 ini masih dalam tahap tender oleh Kementerian PUPR dan direncanakan terselesaikan pada tahun 2022.

Ruas Parangtritis - Girijati, atau lebih dikenal dengan kelok 18, mempunyai Panjang mencapai 5.3 KM. Nama Kelok 18 sendiri muncul merujuk pada lokasi pembangunan jalan yang berbukit sehingga mempunyai 18 kelokan agar dapat memenuhi persyaratan perencanaan teknis dan keselamatan jalan. Pembangunan ruas jalan Parangtritis - Girijati ini dilakukan oleh Pemerintah Nasional dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk proses konstruksinya.

Pelaksanaan Konstruksi JJLS di DIY dilakukan secara bertahap. Pembebasan lahan selebar 30 m telah dilakukan untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur. Tahap pertama telah dibangun jalan dengan tipe jalan 2 lajur dan lebar 7 m. Sampai dengan akhir tahun 2018, dari target pembebasan tanah seluas 3.771.128 m² telah

dapat dibebaskan seluas 2.969.354 m² (78.7%). Pada pembangunan konstruksi jalan, telah diselesaikan sepanjang 74,39 km (64,09%) dari target 116,07 km. Sepanjang 2,5 km diantaranya telah mempunyai lebar 14 m (dari Congot ke arah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0,5 km), sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m. Status realisasi masing-masing segmen dari JJLS sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Table Realisasi JJLS Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

No.	Ruas	Tanah (m ²)		Jalan 2 lajur (km)		Jalan 4 lajur (km)		Jembatan (Unit)	
		Rencana	Realisasi	Ren cana	Reali sasi	Ren cana	Reali sasi	Ren cana	Reali sasi
1.	Cogot-Bugel/ Ngremang	300.473	114.868	19,35	17,35	19,35	2,00	4	1
2.	Ngremang-Srandakan3 (Pandansimo)	95.035	93.381	3,80	3,80	3,80	0	1	0
3.	Pandansimo-Samas	96.442	96.442	6,28	4,58	6,28	0	0	0
4.	Samas-Parangtritis	139.934	139.934	5,00	2,64	5,00	0	3	2
5.	Parangtritis-Girijati	284.868	164.457	5,30	0,00	5,30	0	4	0
6.	Girijati-Legundi	436.478	236.064	17,20	17,20	17,20	0	0	0
7.	Legundi-Planjan	445.640	346.262	17,14	12,44	17,14	0	0	0
8.	Planjan-Baron-Tepus	600.208	600.208	13,00	3,30	13,00	0	0	0
9.	Tepus-Jerukwudel	821.892	821.892	17,90	0,00	17,90	0	1	0
10.	Jerukwudel-Baran-Duwet	442.240	442.240	11,10	0,00	11,10	0,5	0	0
JUMLAH		3.663.210	3.055.748	116,07	61,31	116,07	2,5	13	3

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2020

Target penyelesaian JJLS hingga tersambung dua lajur pada bentang wilayah DIY diperkirakan dapat selesai pada tahun 2021. Pelebaran menjadi empat lajur diharapkan bisa selesai pada tahun 2023. Artinya, JJLS pada akhir tahun perencanaan jangka menengah, yakni tahun 2022 sudah bisa tersambung dari Kulon Progo hingga perbatasan Gunungkidul-Wonogiri.

Pembangunan JJLS secara berkelanjutan menunjukkan bahwa alokasi dana keistimewaan benar-benar digunakan untuk menyelesaikan problem keruangan, terutama terhadap upaya penyelesaian penggunaan ruang untuk JJLS dan kawasan pendukungnya. Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam membangun ruas JJLS sangat kuat, terutama dalam hal pembangunannya yang perlu segera diikuti dengan penataan ruang sekitar JJLS agar tidak menjadi liar, sehingga memerlukan langkah pengelolaan kawasan sekitar JJLS yang terpadu dengan mengintegrasikan semua kepentingan secara berkelanjutan.

JJLS diharapkan sebagai pengungkit yang menegaskan bahwa kawasan selatan adalah pintu gerbang baru bagi DIY. Kawasan selatan akan menjadi daerah yang terbuka sekaligus menjadi pusat peradaban baru. JJLS adalah pengungkit perekonomian agraris sekaligus maritime yang bertopang pada perdagangan dan pariwisata, sehingga semangat *among tani dagang layar*, yang diinisiasi melalui terbangunnya JJLS akan cepat terwujud. Masyarakat

kawasan selatan yang menjadi lebih sejahtera adalah impian untuk menekan ketimpangan dan kemiskinan, melalui tersambungannya JJLS dari barat hingga timur wilayah DIY atau tersambungannya koridor perekonomian pada wilayah Jawa bagian selatan.

Revitalisasi Kawasan Sumbu Filosofi

(Penataan Kawasan Malioboro Terpadu dan Berkelanjutan)

Sumbu filosofi merupakan garis nyata yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih atau Tugu Golong-Gilig, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Panggung Krapyak. Keberadaan sumbu filosofi jelas ada dan nampak berbeda dengan garis imajiner. Sumbu filosofi pada dasarnya adalah aset yang harus dijaga dengan hati-hati untuk eksistensi Keistimewaan Yogyakarta dan masa depan DIY. Makna dari sumbu filosofi ini adalah bagaikan perjalanan manusia sejak bayi dilahirkan, tumbuh besar, dewasa, menikah hingga kematian tiba. Perjalanan tersebut dimulai dari Panggung Krapyak menuju Tugu Jogja. Secara filosofis dari Panggung Krapyak ke Kraton dan Tugu memberikan gambaran konsep sangkan paraning dumadi (dari mana asal manusia dan arah kemana yang akan dituju). Gambaran manusia dari embrional, lahir, berproses, berkembang, eksis, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Apabila dirinci maka Panggung Krapyak Kraton merepresentasikan makna Sangkan Paran yaitu asal

muasal manusia untuk berproses menuju eksistensi. Tugu-Kraton merepresentasikan makna Paraning Dumadi, yaitu manusia yang eksis berproses untuk menjalankan kehidupannya. Proses itu untuk mendapatkan kehidupan dalam Jalan Keutamaan, Jalan Kesejahteraan, Jalan Kemuliaan, dan mampu membebaskan diri dari berbagai halangan, godaan, serta nafsu angkara murka. Manunggaling Kawula Gusti atau kesatupaduan antara Kawula dan Gusti atau antara rakyat dan raja (mikrokosmos) serta antara manusia dengan Tuhan (makrokosmos) dapat menjadi jalan kehidupan yang baik terutama dalam tataran untuk selalu menjalankan konsep hamemayu hayuning bawana. Makna konsep tersebut yaitu memperindah kehidupan di dunia atau menjaga kehidupan dunia secara baik.

Keberadaan Tugu Jogja menjadi simbol hubungan manusia dengan Tuhannya. Golong-giling dapat dimaknai bersatunya cipta, rasa, dan karsa dimana manusia tumbuh dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Adanya Jalan Marga Utama (Tugu Jogja ke selatan) melintasi Kawasan Malioboro dapat diartikan sebagai jalan menuju keutamaan. Di antara Kraton Jogja dengan Tugu Jogja terdapat Pasar Beringharjo dimaknai sebagai godaan duniawi atau syahwat yang harus dijaga. Secara ringkas, keberadaan sumbu filosofi ini diharapkan dapat menyadarkan manusia untuk senantiasa berbuat baik dan jangan sampai mengotori hati dengan perbuatan yang tercela.

Eksistensi Sumbu Filosofi yang sarat makna dalam

memahami keberadaan Kraton Yogyakarta adalah warisan leluhur yang patut dilestarikan, dikembangkan, dan direvitalisasi. Apabila tidak dilakukan upaya revitalisasi, maka pertumbuhan kota dan dinamika perekonomian perkotaan yang masif akan semakin mengaburkan makna sumbu filosofi pada perspektif masa kini dan masa mendatang. Itulah pentingnya melestarikan keberadaan simbol-simbol yang menjadi bagian dari sumbu filosofi sebagai bagian dari tanggung jawab sejarah Keistimewaan DIY.

Penataan sumbu filosofi memiliki tujuan: 1) Merevitalisasi keberadaan simbol-simbol sumbu filosofi (Panggung Krapyak, Kawasan Kraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, hingga Tugu Jogja) sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup; 2) Menata Kawasan Malioboro untuk mengurai problematika dinamika perkotaan yang terkesan tidak nyaman, semrawut, macet, kumuh, dan kotor; serta 3) Menata dan mengelola SDM yang memiliki kepentingan dalam kawasan sumbu filosofi agar memiliki rasa kepemilikan secara berkelanjutan.

Progres pembangunan atau revitalisasi sumbu filosofi pada konteks ini adalah pembangunan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemda DIY. Komponen Pemda DIY yang terlibat dalam menata sumbu filosofi, setidaknya terdiri dari unsur Dinas PUP ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, dan Dinas Kebudayaan DIY. Progres penanganan atau pembangunan pada kawasan sumbu filosofi dimulai sejak tahun 2014 yang terus berlanjut hingga tahun 2020.

Pembangunan Taman Budaya

DIY dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan seni budaya yang cukup kaya dari jenis variasi dan jumlahnya. Pelaksanaan Even seni dan budaya di DIY cukup semarak, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat secara mandiri. Pembinaan kesenian membutuhkan penyediaan ruang seni yang representatif dengan segala pendukungnya untuk mendukung terwujudnya even seni yang berkualitas. Mulai tahun 2014 Pemda DIY telah melakukan pembangunan ruang seni yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY antara lain dalam bentuk balai budaya di desa-desa budaya serta Taman Budaya di kabupaten/kota. Pembangunan Taman Budaya di kabupaten/kota menjadi prioritas pemerintah daerah karena memiliki arti penting bagi pemajuan kesenian di kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kuantitas dan kualitas even seni yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY.

Keberadaan Taman Budaya yang tersebar pada kabupaten/kota di wilayah DIY diharapkan dapat menumbuhkembangkan aktivitas kebudayaan lokal dan mengenalkan ruang ekspresi yang lebih leluasa untuk mewujudkan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka. Taman Budaya yang tersebar memungkinkan kegiatan berdimensi kebudayaan bisa tersebar lebih merata dan mendukung aktivitas perekonomian wilayah melalui ekspresi kebudayaan yang mendidik, mengedukasi, mencerahkan, dan menginspirasi.

Taman Budaya bukan hanya bangunan prestisius, tetapi keberadaan Taman Budaya lebih dari sekadar identitas, melainkan pusat aktivitas kebudayaan yang diharapkan bisa tersebar merata pada seluruh wilayah DIY. Taman Budaya merupakan fasilitas budaya yang dibangun untuk mendukung aktivitas kebudayaan dalam rangka melindungi, melestarikan, merevitalisasi, mengembangkan, dan menumbuh- kembangkan kebudayaan pada skala luas. Megahnya bangunan pusat kebudayaan diharapkan juga diimbangi dengan aktivitas seni dan kegiatan sosial serta pendidikan yang diharapkan munculnya pelaku-pelaku seni lokal untuk mengekspresikan diri dalam rangka mendukung terwujudnya peradaban. Artinya, pusat kebudayaan bukan monopoli daerah pusat perkotaan tetapi harus menyebar hingga ke daerah. Diharapkan Taman Budaya mampu menumbuhkembangkan dinamika kebudayaan dan perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

Konektivitas Prambanan-Gading/Wonosari Sebagai Solusi untuk

Mengatasi Ketimpangan Wilayah

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya menunjang perkembangan suatu daerah. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan. Oleh karena itu, Pemda DIY berencana mengembangkan Jaringan Jalan di DIY, yang memiliki nilai strategis dan istimewa. Pembangunan jaringan jalan baru Prambanan-Gading sebagai jalan

alternatif di sisi utara jalan nasional Yogyakarta-Piyungan - Patuk - Gading - Wonosari direncanakan tersambung dari Prambanan ke Gading pada akhir tahun 2025, dimana kawasan tersebut sangat kaya dengan destinasi wisata sisa peradaban Mataram Hindu, yang sangat layak untuk dikunjungi sebagai destinasi unggulan.

Gunung Sewu atau Pegunungan Sewu adalah serangkaian gunung yang membentang di sepanjang pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Pacitan, Jawa Timur membentuk deretan bukit-bukit berbentuk kerucut dengan ketinggian beberapa puluh meter. Demikian banyaknya bukit-bukit atau deretan gunung kecil itu sehingga masyarakat menamainya sebagai “gunung sewu” yang berarti gunung seribu atau seribu gunung.

Gunung-gunung ini memiliki bentang alam kawasan karst yang unik, ditandai dengan fenomena di permukaan (eksokarst) dan bawah permukaan (endokarst). Di antara bukit-bukit karst Gunung Sewu yang cantik dan eksotik ini dijumpai telaga, luweng (sink holes), dan gua karst serta aliran sungai bawah tanah di bawah permukaannya. Kawasan Karst Gunung Sewu ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Geopark Nasional dan telah dinobatkan menjadi anggota Global Geopark oleh UNESCO pada tahun 2015. Penetapan ini mengundang para turis domestik maupun mancanegara untuk

menikmati keindahan karst yang spektakuler. Aksesibilitas yang baik menuju kawasan tersebut menjadi kebutuhan utama agar potensi wisata yang ada dapat semakin berkembang dan mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal.

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kawasan wisata Sleman timur yang kaya akan destinasi budaya peninggalan Mataram Hindu (Candi Ijo, Candi Ratu Boko, Candi Miri, Candi Sojiwan) akan lebih mudah diakses hingga ke wilayah selatan (Nglanggeran) yang tembus ke Kabupaten Gunungkidul. Terlebih, kondisi arus lalu lintas yang meningkat pada ruas jalan Yogyakarta-Piyungan-Patuk-Gading-Wonosari sekarang ini. Yogyakarta-Piyungan-Patuk-Gading-Wonosari merupakan jalan kolektor primer berstatus jalan Nasional yang sekarang ini berperan sebagai jalan utama yang menghubungkan ibukota Sleman, DIY dan Ibu Kota Gunungkidul. Kondisi eksisting jalan dengan arus lalu lintas 2 jalur 2 lajur mempunyai kekurangan pada ketersediaan lahan untuk menyiap menjadikan jalan tersebut rawan terhadap kemacetan. Dengan harapan dapat mengurangi waktu tempuh dari Yogyakarta menuju Wonosari sekaligus membuka akses perekonomian untuk menekan ketimpangan pada wilayah Gunungkidul bagian utara dan sebagai jalan alternatif bagi ruas jalan Yogyakarta-Piyungan-Patuk-Gading-Wonosari sehingga destinasi wisata pada kabupaten Sleman Timur - Gunung kidul mendapatkan akses

yang lebih mudah merupakan maksud dari rencana pembangunan jaringan Jalan ruas Prambanan - Gading.

Konektivitas Prambanan-Gading melalui infrastruktur jalan diharapkan tidak sekedar membangun jalan untuk membuka akses keterisolasian wilayah utara Gunungkidul, melainkan membuka akses wisata alternatif ke wilayah DIY langsung dari Sleman. Pembukaan akses melalui pembangunan jalan adalah cara paling jitu untuk membuka akses perekonomian wilayah. Upaya ini dilakukan bertahap, mengingat beratnya aspek teknis yang perlu direkayasa berkaitan dengan kondisi geografis. Hal itu merupakan tantangan yang harus diselesaikan karena pertimbangan teknis sebagai berikut: 1) Kondisi geometrik; Kondisi geologi; dan 3) Analisis Volume lalu lintas.

Pengembangan Konektivitas Prambanan (Sleman)-Gading (Gunungkidul) memiliki tujuan mempersiapkan infrastruktur jalan sebagai alternatif aksesibilitas untuk mendukung potensi Kabupaten Gunungkidul yang sesuai dengan kriteria teknis sehingga dapat memberikan manfaat berupa: 1) Mengurangi waktu tempuh dari Yogyakarta-Wonosari; 2) Mengembangkan jalur konektivitas antar-Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni KSPN Cagar Budaya Prambanan-Kawasan Gunung Api Purba-KSPN Karst Gunungkidul; 3) Membuka akses perekonomian antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul; 4) Meningkatkan aksesibilitas dalam rangka mendukung

pertumbuhan dan membangkitkan ekonomi di area yang dilalui (Prambanan- Patuk-Gedangsari) serta mendukung pengentasan kemiskinan; dan 5) Sebagai *feeder Jogja Outer Ring Road (JORR)*.

Ruas Jalan Prambanan-Gading direncanakan memiliki panjang kurang lebih 28 km. Untuk merealisasikan rencana pembangunan jalan tersebut, pada tahun 2017 Pemda DIY telah melaksanakan pembangunan konstruksi Ruas Jalan Gayamharjo-Tawang sepanjang 3 km dan Jembatan Sembada Handayani sepanjang 90 m.

Dalam rangka penyelesaian Ruas Jalan Prambanan-Gading telah terjalin kerjasama yang baik antara Pemda DIY dengan Pemkab Sleman dan Gunungkidul, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut. Pembangunan konektifitas Prambanan-Gading adalah strategi untuk menumbuhkan nilai strategis wilayah yang sarat makna menjadi lebih terbuka, sehingga mudah diakses. Sebaran situs sisa peradaban Mataram Kuno yang tersebar pada wilayah perbukitan Boko hingga perbatasan Gunungkidul, sangat potensial untuk dikembangkan dalam konteks keistimewaan, sehingga pengelolaan kawasan diharapkan juga memperhatikan keberlanjutan situs cagar budaya dan lingkungan secara lestari.

Pembangunan Ruas Jalan Prambanan - Gading merupakan kolaborasi, dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Keduanya menyepakati

pembagian tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam rangka terwujudnya pengembangan wilayah Karst Gunung sewu khususnya pembangunan Jalan Prambanan - Gading. Pemerintah kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, tanaman/tumbuhan/karangkitri maupun bangunan. Sedangkan pemerintah DIY dalam hal ini lewat DPUP-ESDM berkewajiban membangun fisik konstruksi jalan berikut dengan bangunan pelengkap pada lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten.

Konektivitas Temon – Borobudur (Bedah Menoreh) Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Ketimpangan Wilayah

Perbukitan Menoreh adalah kawasan pegunungan yang membentang di wilayah barat Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah timur Kabupaten Purworejo, dan sebagian Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah; sekaligus menjadi batas alamiah bagi ketiga kabupaten tersebut. Perbukitan Menoreh atau Pegunungan Kulonprogo dikenalkan oleh van Bemmelen (1949) sebagai jajaran bangunan tubuh gunung api tua, jajaran dari tua ke muda yaitu G. Gajah di bagian tengah, G. Idjo di bagian selatan, dan G. Menoreh di sisi utara.

Dalam Perda DIY tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039, Perbukitan Menoreh merupakan Kawasan

keistimewaan (Kawasan Strategis Kasultanan). Puncak Suroloyo sebagai puncak tertinggi dari Perbukitan Menoreh di Kabupaten Kulonprogo ini mempunyai kaitan sejarah dengan Kerajaan Mataram. Dalam Kitab Cabolek karya Ngabehi Yasadipura pada abad ke-18 dikisahkan mengenai Mas Rangsang (Sultan Agung Haryokusumo) yang mendapat wangsit agar berjalan kaki dari Keraton Kotagede ke arah barat hingga sampai ke Puncak Suroloyo sejauh 40 Km. Di Puncak itu Sultan Agung kembali mendapat wangsit agar membangun tapa di tempat tersebut. Hal ini dilakukan sebagai syarat agar ia bisa menjadi penguasa yang adil dan bijaksana. Peristiwa ini meninggalkan situs sejarah yang masih ada hingga kini. Peninggalan tersebut berupa sebuah batu besar dan arca yang berada di Puncak Suroloyo yang digunakan untuk ritual Jamasan Pusaka Keraton setiap awal bulan Suro.

Dibangunnya Bandara YIA di Temon, Kulonprogo maka perlu dibangun akses yang dapat menghubungkan Bandara menuju KSPN Candi Borobudur yang berada di sisi utara Kabupaten Kulonprogo. Di sisi lain, di Perbukitan Menoreh ini juga terdapat banyak lokasi wisata yang masih belum optimal karena keterbatasan aksesibilitas. Aksesibilitas yang ada saat ini mempunyai kondisi medan jalan yang berada di daerah perbukitan dengan kondisi alinyemen vertikal maupun horizontal yang kurang memenuhi kriteria persyaratan teknis jalan yang berkeselamatan.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Daerah DIY menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berencana untuk membangun jalan penghubung dari Bandara di Temon menuju Candi Borobudur melalui Perbukitan Menoreh. Akses ini juga akan menjadi jalur wisata dan diharapkan mengurangi ketimpangan wilayah di daerah perbukitan Menoreh akibat kurangnya aksesibilitas. Jalur ini dikenal dengan nama Bedah Menoreh atau Ruas Jalan Temon – Borobudur.

“SATRIYA” Sebagai Manifestasi Peningkatan Kapasitas Organisasi

SATRIYA merupakan *tiwikrama* dari budaya pemerintahan, yang terinspirasi atas upata reformasi birokrasi sejak Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tentang Perubahan *Pangreh Praja* menjadi *Pamong Praja*. Substansi dari maklumat itu, tidak sekedar merubah istilah, melainkan juga tata pemerintahannya dari birokrasi sebagai pengauasa (*pangreh*) menjadi birokrasi yang melayani (*pamong yang ngemong ngayomi*). Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagaimana dikukuhkan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008, merupakan kelanjutan dari upaya melakukan reformasi birokrasi yang digaungkan sejak 1946 itu. Hal itu tentunya memerlukan perubahan pola pikir dan mentalitas di tubuh aparatur birokrasi, karena sebaik apapun konsep, bila semangat dan mentalitas masih menggunakan paradigma lama, hasilnya tentu akan meleset dari harapan.

Mewujudkan aparatur sipil negara yang berwatak dan berperilaku SATRIYA perlu dilakukan dalam rangka pembaharuan dalam sikap dan tindakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Diterbitkanlah regulasi Pergub DIY Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan, yang aktualisasinya tercermin pada: 1) pemahaman terhadap makna bekerja; 2) sikap terhadap pekerjaan; 3) sikap terhadap lingkungan pekerjaan; 4) sikap terhadap waktu; 5) sikap terhadap alat untuk bekerja; 6) etos kerja; dan 7) perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan. Itulah watak sosok SATRIYA yang patut diteladani, baik sebagai abdi masyarakat, maupun selaku pribadi yang dijiwai filosofi *hamemayu hayuning bawana*, dengan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh* serta dengan semangat *golong gilig*.

Pemerintah Daerah menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan kritis dengan banyaknya tuntutan pelayanan. Laju perkembangan Informasi dan teknologi sedemikian pesat, sehingga mempengaruhi pola komunikasi yang semakin cepat berubah, sehingga apabila kita tidak ikut memanfaatkan potensi ini dengan baik, maka tentu saja skema pelayanan pemerintah daerah akan semakin jauh tertinggal atau justru terlibas oleh perubahan itu sendiri. Perilaku SATRIYA diharapkan menjadi jawaban, dengan akronim

dari: Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin Percaya Diri, dan Ahli Profesional; untuk merubah mindset perilaku aparatur birokrasi menjadi lebih resposif, efisien, profesional, dan demokratis. Kesadaran tersebut harus senantiasa didasari oleh kearifan *sawiji greget sengguh ora mingkuh*.

Menanamkan sosok SATRIYA ke dalam jiwa sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sebuah budaya pemerintahan, baik di tingkat Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot hingga tingkat kalurahan se-DIY merupakan suatu kebutuhan. Melalui dukungan alokasi dana keistimewaan secara rutin, dilakukan internalisasi nilai-nilai SATRIYA, membentuk agen perubahan budaya pemerintahan SATRIYA, dan menumbuh kembangkan perilaku SATRIYA melalui fasilitasi agen perubahan di tingkat provinsi ayau kabupaten/kota, dan membagi pin untuk senantiasa diapaki ketika bekerja. Internalsiasi dan sosialisasi dilakukan terus menerus, secara berjenjang, pada semua tingkat pemerintahan daerah baik di level provinsi, maupun kabupaten/kota.

SATRIYA saat ini sudah menjadi materi muatan lokal dalam semua Diklat, sebagaimana arahan Bapak Gubernur DIY, baik untuk CPNS maupun PNS, diklat intern maupun peserta dari luar provinsi. Sedangkan mengenai kurikulum akan dikemas oleh Yayasan Bagong Kussudiarjo bekerjasama dengan Pemda DIY (melalui Bandiklat). Termasuk ide untuk perlunya memasukkan materi SATRIYA ke dalam pemahaman bagi semua calon Bupati/Walikota. Apabila hal itu sudah terlembagakan

secara internal dalam diri setiap elemen di wilayah DIY, maka perubahan sosok ASN menjadi personal yang *pangreh praja* akan segera terwujud secara merata, sehingga lembaga pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem yang baik dan benar itu tidaklah cukup, melainkan yang jauh lebih penting adalah memastikan orang yang menjalankan sistem itu, adalah orang yang baik dan benar. Untuk itulah, menginternalisasi nilai SATRIYA sangat penting untuk dilakukan.

Jogja Kota Batik Dunia Sebagai Bentuk Revitalisasi Warisan Budaya

Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintang menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekak lilin batik berupa canting tulis dan atau canting cap yang membentuk corak tertentu yang memiliki makna (SNI 0239:2014). Tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan Batik sebagai *Masterpieces of the Oral and intangible Heritage of Humanity* atau Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non Bendawi. Batik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Yogyakarta, hal ini diperkuat dengan dinobatkannya Yogyakarta sebagai “Kota Batik Dunia” oleh WCC (*World Craft Council*) pada tahun 2014. Batik sebagai bentuk budaya tradisional memiliki keunikan tersendiri dalam perkembangan fashion dunia saat ini. Unsur nilai tradisi, dengan nilai estetika adiluhung, menjadikan batik bisa bersaing di pasar internasional. Dengan identitas batik yang kental tanpa mengabaikan

acuan trend dunia, diharapkan hadir karya *ready to wear* menuju pasar dunia. Dengan modifikasi kearifan lokal dari batik tradisional, terbentuk pengembangan, menjadikan lahirnya identitas yang lebih jelas dari batik itu sendiri sebagai sarana yang kuat untuk media utama pembuatan busana dalam: produk fashion, pameran batik, pagelaran busana batik, Yogya Batik Parade, lomba desain pakaian batik tren internasional, lomba batik motif Yogya istimewa dan lomba souvenir turunan batik.

Setiap tahun Pemda DIY mengadakan even JOGJA KOTA BATIK DUNIA, yang bertujuan bertujuan melestarikan batik sebagai warisan budaya, sekaligus meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui industri batik. Sebagai kota batik dunia, Jogja selalu dievaluasi setiap empat tahun sekali, dengan setiap dua tahunnya diwajibkan menyelenggarakan *Batik Biennale* yang akan dilaksanakan pada 2018 mendatang. Event bertajuk *Batik to The Moon* pada tahun 2017 ini merupakan pra acara dalam menyambut event tersebut. Dalam gelaran festival ini juga akan ditonjolkan tujuh kriteria kota kerajinan dunia yang dipersyaratkan oleh WCC, yaitu nilai historis, orisinalitas, konservasi melalui regenerasi, nilai ekonomi, ramah lingkungan, reputasi internasional dan konsistensi.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan dengan menggunakan alokasi dana keistimewaan pada urusan kebudayaan ini, diarahkan agar kain batik Indonesia

dan turunannya dapat dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia serta digunakan dalam berbagai keperluan. Even Jogja Kota Batik Dunia ini juga melibatkan seluruh usaha batik dari penjuru daerah, agar semua pengusaha batik dapat menampilkan kekhasannya masing-masing sekaligus sebagai upaya untuk memperluas pasar. Penetapan Jogja sebagai Kota Batik Dunia tidak terlepas dari aktifitas kehidupan wilayahnya yang sangat familier dengan batik. Batik sudah sebagai warisan budaya yang terus tumbuh dan berkembang dalam denyut nadi kehidupan masyarakat DIY, dimanapun dan kapanpun. Hal itu terbukti adanya sentra-sentra ekonomi yang berbasis pada batik, seperti Pasar Beringharjo, Jalan Malioboro, Mirota Batik, Kampung Batik dan Desa Krebet.

Penerapan *e-Performance Based Budgeting*

Penerapan *e-performance based budgeting* (anggaran berbasis kinerja) menjadi sebuah kebutuhan untuk menjawab dinamika pelayanan kepada masyarakat yang menunjukkan transparansi, kecepatan, kepekaan terhadap perubahan, optimalisasi informasi teknologi (IT), dan menekankan kebijakan penganggaran berbasis kinerja atau juga dikenal sebagai *program follow result*. Selain itu penggunaan *e-performance based budgeting*, telah menjadi komitmen nyata dalam menerapkan reformasi birokrasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berdampak langsung pada penyelesaian problematika masyarakat.

Kegiatan riil *e-performance based budgeting* di Pemda DIY meliputi integrasi manajemen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis IT, dengan pengelolaan sistem perencanaan (JOGJAPLAN), penganggaran (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/SIPKD), dan monitoring evaluasi (SENGGUH) setiap tahun sebagai sebuah siklus pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam fase perencanaan yang menggunakan sistem *e-planning* (JOGJAPLAN), semua usulan program dan kegiatan dipastikan harus selaras dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dipastikan alokasi anggaran sesuai dengan pagu indikatif dalam RPJMD, program dan kegiatan dipastikan menunjang sasaran indikator dalam RPJMD, termasuk alokasi kewilayahan maupun sektoral. Ketika telah menjadi APBD, maka tata kelola keuangannya menggunakan SIPKD yang mengatur uraian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan aliran kas-nya.

Melalui *warehouse system*, data dari SIPKD dikoneksikan dengan sistem SENGGUH (Sistem Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah) untuk dinilai kesesuaian pelaksanaannya, yang meliputi: kesesuaian dengan Indikator Kinerja Utama, kesesuaian dengan Renstra SKPD, kesesuaian dengan Perjanjian Kinerja untuk Eselon II (Capaian IKU), Eselon III (Capaian Program), Eselon IV (Capaian Kegiatan) yang dihitung berdasarkan capaian kinerja fisik, kinerja keuangan, dan kinerja *outcome* serta secara berkala (setiap tiga bulan sekali) akan diberikan raport kinerja kepada semua SKPD.

Komitmen untuk menerapkan kebijakan *e-government* sudah menjadi garis kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur DIY sejak tahun 2008. Konkretnya, Pemda DIY telah menerbitkan Pergub No. 69 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pergub No. 45 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Pergub No. 37.1 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja. Selain itu, Gubernur DIY secara langsung memberikan rapor bagi SKPD yang terbaik dan terburuk sebagai bentuk *reward and punishment* tiap triwulan.

Perubahan *mindset* merupakan kunci penerapan *e-performance based budgeting*. Proses yang terus dan senantiasa dilakukan agar setiap ASN peka terhadap dinamika perubahan yang sedemikian cepat pada era digital. Hal itu dilakukan dengan: (1) memberikan teladan dari tingkat pimpinan tertinggi hingga level terbawah untuk bekerja sekaligus memberikan kemanfaatan; (2) adanya keterbukaan dalam komunikasi baik vertikal maupun horizontal; (3) menerapkan pengelolaan pekerjaan melalui aplikasi IT; (4) mendorong untuk melakukan inovasi; dan (5) menekankan pelaksanaan yang efektif sekaligus efisien. Perubahan *mindset* itu dilakukan oleh semua lini, secara bertahap, dan berkelanjutan, melalui: 1) *Mind setting*, perubahan pola pikir; 2) *Strategic break trough*, membangun sistem dan mekanisme melalui terobosan, inovasi yang terukur; 3) *Strategy allignment*, menyelaraskan strategi dan program kerja pada tingkat

operasional; dan 4) *Managing beliefs and values*, menciptakan jajaran kepemimpinan yang mampu menciptakan empowering dan value (inti budaya kerja).

Penerapan *e-performance based budgeting* telah memberikan perubahan fundamental bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di DIY baik pada aspek perencanaan, penganggaran, dan monev, dengan implikasi sebagai berikut: 1) Penurunan jumlah pegawai dari 15.000 pada 2008 menjadi sekitar 7.000-an orang pada 2017; 2) Penurunan jumlah kegiatan dari 3.200 kegiatan pada 2012 menjadi 945 kegiatan pada 2018, dan diorientasikan untuk belanja investasi; 3) Penerapan pengukuran kinerja secara berjenjang dari kinerja organisasi diturunkan menjadi kinerja individu; sebagai dasar pemberian reward and punishment. Dari hasil evaluasi triwulanan diperoleh gambaran bahwa performa kinerja SKPD semakin kualitatif, yang semula terdistribusi dalam tiga kelompok besar (di atas rerata, rerata, dan di bawah rerata) menjadi terdistribusi dalam dua kelompok besar (di atas rerata dan rata-rata) dengan tingkat capaian kinerja >90%; 4) Penerapan kontrak kinerja (*contract agreement*) sebagai dasar untuk melaksanakan program/kegiatan; 5) Pelibatan tenaga ahli perguruan tinggi dalam memberikan masukan dalam proses perencanaan hingga pengendalian pembangunan daerah; dan 6) Tidak ada lagi program/kegiatan siluman karena mata anggaran sudah dikunci melalui desain program dengan sasarannya sebagaimana garis RPJMD.

Mewujudkan *Vision Driven Organization* sebagai Bentuk Reformasi Kelembagaan Daerah

Sebagaimana arahan Bapak Gubernur, dalam RPJMD 2017-2022, skema perencanaan lima tahunan yang memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah, merupakan dokumen inti dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara lebih teknis, agar sasaran pembangunan daerah bisa terukur secara berkala maka dipastikan kelembagaan yang mendukungnya juga berbasis pada sasaran tersebut. Implikasinya, penataan kelembagaan adalah proses yang harus dilalui untuk mewujudkan semangat *Vision Driven Organization*.

Kelembagaan baru akan terbentuk mengikuti cascading dalam dokumen perencanaan lima tahunan atau RPJMD yang sudah ditetapkan. Hal itu sudah sesuai dengan garis kebijakan yang memiliki dimensi istimewa, sebagaimana Perdasis Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan struktur lembaga Pemerintah Daerah yang istimewa. Secara substantif, formasi lembaga yang sudah terbentuk pada akhir 2018 itu, lebih mengedepankan aspek pencapaian sasaran daerah. Semua problem daerah yang sudah dipetakan, memiliki alur logika terhadap fungsi dan keberadaan lembaga daerah.

Kebijakan tersebut di atas berimplikasi terhadap berkurangnya atau efisiensi atas 79 struktur yang hilang atau merger. Tentunya, penataan kelembagaan yang lebih bersifat istimewa dalam struktur pemda DIY,

dimaksudkan sasaran daerah bisa lebih terkawal dan dapat dikendalikan capaiannya. Selain itu, penataan struktur kelembagaan lebih berorientasi pada kinerja yang dimonitor secara rutin setiap triwulanan oleh Bapak Gubernur secara langsung. Lembaga yang memiliki kinerja baik maupun buruk, akan dipublikasikan kepada publik sebagai bukti komitmen pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil. Ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan akuntabilitas daerah dan manifestasi janji untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukan Desa Budaya

Salah satu kebijakan yang ditempuh dalam mengupayakan peningkatan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan desa Budaya. Pembentukan desa budaya ini merupakan salah satu inovasi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam menyikapi peluang, potensi, dan isu strategis terkait sosial kemasyarakatan. Pada acara “Sopo Aruh, refleksi Sewindu Pelaksanaan Keistimewaan DIY”, Sri Sultan Hamengku Buwono X meyakini bahwa jika segala potensi “kebaikan” itu dilancarkan dari Desa dengan strategi: “Desa Mengepung Kota”, niscaya Desa akan menjadi sentra pertumbuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam konteks implementasi, pembangunan

Desa harus lebih diprioritaskan. Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan Desa dalam mengejar kemajuan perkotaan, karena sumber potensinya berada di perdesaan.

Desa Budaya adalah desa atau kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Desa/Kelurahan Budaya di DI Yogyakarta sudah sejak 1995 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DI Yogyakarta nomor 325/KPTS/1995. Pada mulanya berjumlah 32 dengan lokasi desa-desa yang ada di Kabupaten, sedangkan Kota Yogyakarta belum ada Desa Budaya. Sejak tahun 1995 sampai 2013, Desa Budaya telah mengalami perkembangan potensi dan pembangunan, begitu juga keinginan untuk menetapkan adanya Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta. Selanjutnya melalui SK Gubernur Nomor 262/KEP/ 2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya, telah terbentuk 56 Desa Budaya.

Perubahan kondisi tentunya dipicu dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta. Perkembangan munculnya UU Keistimewaan tersebut, membawa konsekuensi munculnya aturan baru tentang Desa Budaya dua tahun setelah UU Keistimewaan disahkan, muncul Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014

tentang Desa/Kelurahan Budaya. Peraturan gubernur ini secara keseluruhan mencakup aspek pengembangan, penilaian desa budaya, dan klasifikasi desa budaya.

Uraian terkait desa budaya di atas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, ditegaskan bahwa semuanya akan bermuara pada tujuan: “Mengolah Kritik dan Menata Desa sebagai Basis Kelstimewaan DIY”.

Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Sarpras Gamelan

Potensi seni budaya yang tersebar luas di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sumber daya yang tidak ternilai harganya. Seni budaya merupakan perekat persatuan dan kesatuan masyarakat. Kekayaan tersebut harus dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Seni budaya harus terus dikembangkan karena memuat nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, seperti nilai religi, toleransi, gotong royong dan lain-lain. Untuk mendorong peran serta pelaku seni budaya dalam meningkatkan kreativitas dan produktivitas perlu dilakukan pemberian fasilitasi kegiatan kesenian terhadap kelompok-kelompok seni yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fasilitas kegiatan kesenian ini meliputi 2 (dua) hal yaitu fasilitasi penyelenggaraan suatu *event* dan fasilitasi berupa bantuan sarana dan prasarana.

Dari tahun ke tahun data bersifat fluktuatif karena tergantung dari usulan proposal dari kelompok seni

yang resmi dan telah terdaftar dan memiliki Nomor Induk Kesenian (NIK). Nomor Induk Kesenian ini sangat penting dimiliki oleh kelompok seni agar mempermudah dalam melakukan monitoring dan pembinaan kepada masyarakat yang masuk ke dalam kelompok seni.

BAGIAN II

Beberapa Masukan Ide tentang Program-program dari Masyarakat

Bab 5

Pusat Studi Keistimewaan DIY

Tentang implementasi Keistimewaan DIY masa depan, beberapa pakar mengharapkan munculnya Pusat Studi Keistimewaan DIY. Tim Penulis sudah mulai membicarakan gagasan itu dengan Prof. Djagal Wiseso Marseno (Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada) dan Dr. Didik Purwadi (akademisi UGM yang pernah menjabat Kepala Asisten Keistimewaan DIY yang sekarang menjadi Paniradya Kaistimewan).

Pembicaraan tentang Pusat Studi ini masih pada tatarana awal. Pada intinya, sama seperti pusat-pusat studi yang berkembang di kampus-kampus. Pusat Studi Keistimewaan DIY diharapkan merupakan sebuah wadah kegiatan penelitian, pengkajian, dan pendidikan lintas disiplin ilmu, yang dalam hal ini berfokus pada penelitian-pengkajian-pendidikan seputar masalah-masalah Keistimewaan DIY.

Keistimewaan Lahirkan Budaya Riset

Setelah bergabung dengan RI dan menegaskan dirinya sebagai Daerah Istimewa di dalam RI melalui amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, Yogyakarta melahirkan karya-karya

besar. Karya besar yang paling menonjol tentunya adalah kontribusi DIY menjadi Ibukota Republik Indonesia (1946-1949). Selama menjadi Ibukota Republik, DIY menjadi benteng pertahanan terakhir RI. Sementara itu perjuangan Sultan HB IX dan para *founding father* mencapai tahapan di mana RI diakui kedaulatannya oleh dunia.

Namun ada satu hal yang kurang diperhatikan terkait kontribusi besar Keistimewaan DIY, yaitu melahirkan budaya riset (penelitian akademis). Perubahan dan perkembangan yang terjadi di Yogyakarta sejak dari jaman Penjajahan Belanda, jaman Pendudukan Jepang, hingga kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia telah melahirkan riset disertasi berkelas internasional. Riset itu dilakukan oleh “Bapak Sosiologi Indonesia” Selo Soemardjan dengan judul “Social Changes in Jogjakarta” sebagai disertasi yang membawanya memperoleh gelar Doktor (Ph.D in sociology) dari Cornell University Amerika Serikat pada 1959. Disertasi itu berupa penelitian kualitatif perubahan sosial di DIY sejak era Penjajahan Belanda hingga tahun 1958.

Selo Soemardjan sendiri bukan hanya akademi, tetapi orang yang terlibat langsung dalam pemerintahan di Yogyakarta dan Indonesia. Lahir pada 23 Mei 1915, Soemardjan bekerja sebagai Asisten Wedana/Camat (1935-1942), bekerja di pemerintahan Kasultanan Yogyakarta (1942-1945), bekerja di Pemerintahan Yogyakarta sebagai Ibukota RI (1945-

1950), lalu pindah ke Jakarta menjadi Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta urusan sipil (1950-1956), Sekretaris Staf keamanan Perdana Menteri, Sekretaris Wakil Perdana Menteri Bidang ekonomi, Keuangan, Pembangunan (1966), Sekretaris Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (1967-1973), dan Sekretaris Wakil Presiden RI, Sri Sultan HB IX (1973-1978). Di ranah akademis, sejak 1960 ia menjadi Guru Besar di Universitas Indonesia, SESKOAD, SESKOAL, dan juga Lemhanas RI.

Disertasi “Social Chnanges in Jogjahakarta” telah diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press dalam bahasa Indonesia dengan judul “Perubahan Sosial di Yogyakarta” (1986). Penerjemahnya adalah H.J. Koesoemanto dari Fakultas Sosial-Politik UGM dan Mochtar Pabotinggi dari Leknas-LIPI.

Riset disertasi “Social Chnanges in Jogjahakarta” adalah representasi kekuatan riset di dalam Keistimewaan DIY. Soemardjan melakukan riset itu bukan hanya sebagai akademisi namun juga sebagai priyayi Ngayogyokarto yang menghayati Keistiemwaan DIY. Kedekatan beliau dengan Sultan HB IX juga menunjukkan bagaimana seorang Selo Soemardjan menghayati visi, misi, fiosofi, sejarah, dan seluk beluk Keistimewaan DIY.

Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Keistimewaan DIY telah melahirkan budaya riset yang berkualitas akademis dan diakui dunia.

Yogyakarta adalah lahan penelitian yang sangat kaya, laboratorium sosio-kultural yang menyediakan kekayaan data yang luar biasa, Sejarah riset perubahan sosial di Yogya ini mendorong kita untuk membentuk Pusat Studi Keistimewaan DIY.

Budaya Riset dalam Pembangunan

Pembangunan harus dimulai dari kebijakan yang tepat dan pelaksanaan dengan presisi tinggi sehingga mutlak harus berbasis riset. Evaluasi pembangunan untuk melahirkan revisi-revisi juga harus berbasis riset.

Kebudayaan yang menurut Paniradya Pati Aris Ekono Nugroho adalah kembangnya Keistimewaan DIY juga harus dibangun dengan berbasis riset. Apalagi kebudayaan Yogyakarta sangat kompleks, punya akar sejarah dan filolsofi yang sangat mendalam, harus diteliti dengan sangat seris dan penuh kehati-hatian.

Pembangunan di bidang kebudayaan pada dasarnya merupakan salah satu bidang atau sektor pembangunan. Pemerintah (Pusat) telah meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang merupakan *socialent* khusus untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Berdasarkan perhitungan resmi, dari 13 provinsi yang memiliki nilai IPK di atas angka nasional (53,74), Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertinggi (73,79) melampaui Bali (65,39), Jawa Tengah (60,05), Bengkulu (59,95), dan Nusa Tenggara Barat (59,92).

Pengukuran IPK mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. Konsep ini mencakup tujuh dimensi pembangunan kebudayaan yaitu (1) dimensi ekonomi budaya, (2) dimensi pendidikan, (3) dimensi ketahanan □ocial-budaya, (4) dimensi warisan budaya, (5) dimensi ekspresi budaya, (6) dimensi budaya literasi, dan (7) dimensi kesetaraan gender. Pengukuran-pemngukuran itu mutlak harus berbasis riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Budaya Tulis

Budaya riset dan akademis memperkuat budaya tulis. Peradaban maju adalah kehidupan masyarakat berbasis budaya baca-tulis yang kuat. Leo Fay dalam Sudarman (2008) mengatakan bahwa membaca adalah jantungnya pendidikan. Masyarakat modern minimal membaca 840.000 kata per minggu. Peradaban Islam menjadi maju karena peran banyak tokoh penulis seperti Al-Farabi yang menulis 117 buku dan Ibnu Sina yang menulis 99 buku. Ekspansi bangsa-bangsa Eropa ke seluruh dunia didorong oleh surat-surat Christoper Columbus yang ditulis pada 1493 dan diterbitkan pada 1507.

Karut marut peradaban digital di negeri ini terjadi karena basis budaya baca-tulis kita sangat lemah. Masyarakat Barat relatif stabil dan semakin maju di era digital karena punya basis budaya baca-tulis. Sedangkan kita, baru mampu menerapkan budaya lisan yang serba tidak terukur ke dalam bahasa digital.

Akibatnya, bukannya informasi yang akurat, aspiratif, dan akademis. Kita malah terbenam dalam kubangan hoaks dan ujaran kebencian.

Di era digital ini semua kalangan memilih menggunakan budaya digital dengan budaya tulis yang lemah atau rendah. Pemerintah memilih melakukan sosialisasi dengan metode-metode visual digital yang jika tidak hati-hati hanya akan menjadi remeh temeh karena basisnya budaya populer. Penggunaan metode digital-populer sangat penting tetapi supaya akurat, tajam, dan terpercaya (valid), maka harus dilandasi oleh budaya riset dan budaya tulis yang kuat,

Kampus dalam Sinergi 5K

Di dalam Keistimewaan DIY terdapat lima domain yang harus berkolaborasi yaitu 5K (Kraton, Kaprajan, Kampus, Kampung, Komunitas). Kraton adalah sumber kepemimpinan dan kebudayaan,. Kaprajan adalah pelaksana pembangunan. Kampung adalah basis kehidupan masyarakat yang merupakan kekuatan sosial. Komunitas adalah keberagaman sumber daya manusia Yogyakarta yang menggerakkan perubahan peradaban, termasuk di sektor ekonomi.

Kampus harus memainkan peran yang relevan yaitu peran akademis. Selama ini peran sebagai kekuatan pendidikan di DIY sudah sangat bagus, Yang perlu dipertajam adalah peran penelitian dan pengembangan khusus untuk Keistimewaan DIY. Kampus di DIY adalah gudangnya pakar dan peneliti sehingga sangat mudah untuk mengembangkan Pusat Studi Keistimewaan DIY.

Dalam konteks pembangunan Keistimewaan DIY, pendidikan tinggi mempunyai tugas pengabdian pada masyarakat. Pada guru besar, dosen, dan peneliti dari kampus-kampus di DIY bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun kegiatan riset untuk memajukan Keistimewaan DIY.

Sudah Mulai

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) sudah merupakan undang-undang yang rinci dan lengkap tentang Keistimewaan DIY. Apalagi ketika Perdasid demi Perdasid diterbitkan dan disahkan, UUK dan Perdasid sudah secara gamblang memberikan tujuan, arah, dan strategi-strategi pembangunan Keistimewaan DIY. Adapun implementasi UUK adalah berupa program-program pembangunan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Keistimewaan DIY tersebut. Program-program pembangunan itu berkenaan dengan urusan-urusan yang menjadi Kewenangan Istimewa di dalam Keistimewaan DIY.

Dalam 5 (lima) tahun pertama pelaksanaan (implementasi) Keistimewaan DIY menurut UUK, sudah mulai kelihatan capaian-capaiannya. Namun juga masih banyak kekurangan dan tidak sedikit pula masalah dan kesulitan yang terjadi. Yang justru menjadi poin positif adalah tindakan Pemerintah Daerah DIY yang cepat melakukan evaluasi berbasis riset akademis. Upaya itu dilaporkan dalam buku "Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-

2017”, diterbitkan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2018. Harapannya, tradisi evaluasi berbasis riset akademis ini terus berlanjut di masa yang akan datang.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Keistimewaan DIY itu adalah

- 1) Memantau dan mengendalikan agar Arah Kebijakan Keistimewaan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam UU No 14 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, khususnya tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Secara teknis proses evaluasi bertujuan memetakan rangkaian proses perencanaan, implementasi, monitoring atas efektivitas program-program Keistimewaan yang telah dilaksanakan.
- 3) Mengetahui seberapa jauh dampak jangka pendek (*output*), jangka menengah (*outcome*) dan jangka panjang (*impact*) pada warga masyarakat.
- 4) Memetakan kesenjangan (*gap*) antara proses perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program-program Keistimewaan.
- 5) Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas kesenjangan yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk usulan kegiatan yang lebih sesuai,

Setelah disahkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK), DIY mendapatkan Dana Keistimewaan (Danais) dari Pemerintah Pusat guna mendukung pelaksanaan Keistimewaan DIY. Mekanisme penyaluran dana itu diatur oleh Menteri Keuangan.

Dalam buku “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017” (diterbitkan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2018, halaman 14-15), dilaporkan adanya beberapa masalah terkait implementasi Danais tersebut (perkembangan implementasi UUK sampai tahun 2017).

- 1) Masalah kesiapan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UUK. Pada awal masa implementasi UUK, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DIY mengalami persoalan rendahnya prosentase penyerapan Danais. Masalahnya terletak pada proses penyaluran dan penggunaan dana. Pada 2013, Pemda DIY menerima Danais dari Pemerintah Pusat pada bulan November, sementara Danais pada 2014 diterima pada bulan Juni. Hal itu berdampak pada minimnya waktu yang dimiliki Pemda melalui Pengguna Anggaran untuk dapat menggunakan Danais. Pada level peraturan, besaran alokasi dana untuk masing-masing Urusan Keistimewaan telah ditetapkan sejak awal periode penganggaran. Karenanya, penggunaan

dana lintas Urusan Keistimewaan tidak diperkenankan sehingga sisa anggaran dari masing-masing Urusan Keistimewaan itu harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat serta dilaporkan sebagai anggaran yang tidak terserap.

- 2) Persoalan kedua berkenaan dengan acuan kerja bagi Pengguna Anggaran sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola Danais. Dengan tujuan untuk mendorong efektivitas koordinasi seluruh PA Keistimewaan DIY, maka dalam Pergub No. 33 Tahun 2016 telah ditetapkan 3 pihak yang berfungsi sebagai PA (Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) bagi seluruh Urusan Keistimewaan. Persoalan muncul ketika penetapan ini belum diikuti dengan Perdais untuk masing-masing Urusan Keistimewaan sehingga selain Urusan Kelembagaan harus mengacu pada Perdais Induk. Sementara itu Perdais Induk belum memberikan penjelasan secara detil mengenai 5 Urusan Keistimewaan.
- 3) Persoalan ketiga terkait dengan pemaknaan terhadap Danais itu sendiri. Danais sering dimaknai sebagai fasilitas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Yogyakarta. Secara konseptual, hal ini tepat karena sesuai dengan visi dari ekonomi daerah. Namun dalam konteks Keistimewaan DIY pemaknaan Danais tidak dapat dihentikan pada dimensi perekonomian saja,

melainkan harus dipandang secara holistik. Karena itu akan lebih tepat jika Danais dilihat sebagai sebuah konsekuensi atau dukungan terhadap upaya pembangunan di Yogyakarta dalam lima Urusan Keistimewaan.

Dalam buku “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017”, diterbitkan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2018 (halaman 204-208) dilaporkan masalah-masalah implementasi di Urusan Kebudayaan (perkembangan implementasi UUK sampai tahun 2017).

- 1) Selama implementasi mencuat pandangan umum yang mengidentikkan pembangunan kebudayaan dengan hanya pada kesenian dan romantisme masa lalu, sehingga menghambat kebijakan pembangunan kebudayaan yang holistik, dinamis, dan progresif.
- 2) Aktivitas atau kegiatan “pelestarian kebudayaan” terpeleset menjadi aktivitas “Event Organizer”. Sementara itu banyaknya atraksi kesenian justeru tidak terkoordinir, tidak terkonsolidasi, dan tidak terintegrasi dengan baik.
- 3) Aktivitas kepariwisataan oleh masyarakat cenderung hanya berorientasi keuntungan (*profit oriented*) dan kurang mempertimbangkan pelestarian kekayaan kebudayaan secara holistik. Komodifikasi kebudayaan dalam pariwisata melampaui daya dukung ekologi cenderung tidak

berkelanjutan. Sementara itu kesejahteraan warga masyarakat di seputar kawasan wisata tidak merata.

- 4) Dalam pembangunan pendidikan, produksi pengetahuan untuk mendukung pelestarian kebudayaan masih kurang. Belum berkembang pendidikan berbasis budaya sebagai akibat dari kurangnya produksi pengetahuan untuk mendukung pelestarian kebudayaan. Belum terumuskannya formulasi habitus Keistimewaan DIY yang tersistematisasi dan terlembagakan.
- 5) Dalam pengembangan aspek ekonomi dari kebudayaan DIY, belum ada program Keistimewaan yang secara optimal mengakselerasi pencapaian kesejahteraan warga. Positifnya, ditemukan *best practice* terkait peningkatan kesejahteraan warga yaitu program “Lumbung Mataraman” yang telah diinisiasi oleh Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Namun di sisi lain sinergitas dan keberlanjutan tatakelola program “Among Tani Dagang Layar” masih belum optimal.
- 6) Pemberdayaan dan keterlindungan warga masih lemah. Pertama, belum optimalnya program “Jaga Warga”. Kedua, masih ada kerentanan warga akibat implementasi kebijakan yang bias pertumbuhan ekonomi.

Dalam buku “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017”, diterbitkan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2018 (halaman 208-212) dilaporkan implementasi UUK yang membawa perubahan (kemajuan) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (perkembangan implementasi UUK sampai tahun 2017).

- 1) Implementasi UUK merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) dalam kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Beberapa OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) mengalami perubahan STOK, antara lain Diskominfo dan Badan Perpustakaan Daerah. Kemudian dikembangkan pula OPD baru yaitu Sekretariat Parampara Praja.
- 2) Implementasi UUK berimplikasi pada perubahan tugas, fungsi, dan kewenangan beberapa OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). Misalnya, Dinas Pariwisata bertambah tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pemanfaatan budaya untuk promosi wisata. Biro Hukum mendapat tugas baru menyusun regulasi Keistimewaan.
- 3) Implementasi UUK berimplikasi pada perubahan pola hubungan antar OPD (Organisasi Pemerintah Daerah).
- 4) Implementasi UUK berimplikasi pada perubahan koordinasi antara OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). Intensifikasi pola koordinasi terjadi di

Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

- 5) Implementasi UUK berimplikasi perubahan pola hubungan OPD Pemda DIY dengan OPD Kabupaten Kota. Misalnya, Diskominfo setelah UUK berkewenangan untuk mengkoordinasikan OPD lain di lingkup kabupaten/kota di DIY terutama dalam integrasi data dan infrastruktur telematika.
- 6) Implementasi UUK berimplikasi perubahan hubungan OPD Pemda DIY dengan Kasultanan dan Kadipaten. Misalnya, Diskominfo sekarang menjadi penyedia infrastruktur jaringan komunikasi di Kasultanan dan Kadipaten.
- 7) Implementasi UUK memunculkan beberapa kendala kelembagaan di antaranya adalah (1) belum optimalnya pengintegrasikan dan sinergitas lintas OPD, (2) masalah Sumber Daya Manusia, (3) masalah mekanisme pertanggungjawaban keuangan, (4) masalah kesulitan memaknai konsep “istimewa”, misalnya konsep tentang “Sumber Daya Aparat yang Istimewa”,

Dalam buku “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017”, diterbitkan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2018 (halaman 212-218) dilaporkan tentang perkembangan implementasi UUK di bidang pertanahan (perkembangan implementasi UUK sampai tahun 2017).

- 1) Dalam implementasi, regulasi-regulasi pelaksana urusan pertanahan masih belum sinkron.
- 2) Tidak terselesaikannya regulasi urusan pertanahan berdampak pada terganggunya penghidupan warga. Dalam riset evaluasi yang dilakukan Pemda DIY ini, ditemukan fakta bahwa beberapa warga yang menempati dan menggarap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menyatakan bahwa mereka membutuhkan jaminan kepastian hukum tentang tanah itu, karena hal itu berdampak langsung pada penghidupan mereka.
- 3) Ditilik dari aspek historis, berkaitan dengan dasar hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, tidak terdapat alat bukti tertulis.

Dalam buku “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017”, diterbitkan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2018 (halaman 219-222) dilaporkan perkembangan implementasi UUK dalam urusan tata ruang (perkembangan implementasi UUK sampai tahun 2017).

- 1) Belum optimalnya pelibatan warga dalam proses perencanaan tata ruang DIY.
- 2) Terbatasnya akses warga terhadap penghidupan baru setelah terjadinya perubahan tata ruang.

Dalam buku “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017”, diterbitkan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2018 (halaman 169-175) ada beberapa keberhasilan (*best*

practices) selama implementasi UUK sejak 2013 hingga 2017 yaitu sebagai berikut.

- 1) Bantuan alat musik gamelan di SMP Negeri 1 Pakem
- 2) Kerjasama lintas agama dalam kegiatan Bersih Kali di Desa Bejiharjo
- 3) Perkembangan Desa Budaya dan Ekonomi Desa
- 4) Munculnya kembali artefak budaya yang terlupakan.
- 5) Berkembangnya komunitas film maker
- 6) Baku rekognisi Raja-Warga dalam kemudahan akses pemanfaatan Tanah Kasultanan
- 7) Muncul gagasan-gagasan genuine pengembangan kebudayaan
- 8) Pariwisata baru berkembang misalnya wisata Gunung Nglanggeran
- 9) Revitalisasi wisata Tebing Breksi, Prambahan.

Bab 6

Sekolah Pembangunan Keistimewaan

Tim penulis berdiskusi dengan beberapa pemerhati dunia pendidikan dan para pendidik itu sendiri. Dalam beberapa perbincangan muncul ide-ide tentang pendidikan atau sekolah tentang Keistimewaan DIY. Sebagai contoh, akademisi UGM Dr. Didik Purwadi yang berpengalaman menjadi Kepala Asisrten Keistimewaan DIY menyampaikan gagasan tentang kemungkinan diadakan program KKN (Kuliah Kerja Nyata) tematik Keistimewaan DIY. Para mahasiswa yang berminat pada Keistimewaan DIY bisa saja didorong untuk melakukan riset atau menulis skripsi tentang masalah-masalah Keistimewaan DIY.

Mengenai pembelajaran Keistimewaan DIY, di Yogyakarta telah ada upaya-upaya untuk mengintensifkan hal itu. Pendidikan “Pawiyatan Pamong” misalnya, sejauh ini telah memberikan banyak pendidikan tentang Keistimewaan DIY untuk banyak kalangan, bahkan diikuti oleh para pelaku pariwisata,

Pendidikan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di DIY juga sudah maju. Badan Diklat (Bandiklat) DIY pernah meraih peringkat ketiga dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN) Award 2019 untuk kategori Instansi Pemerintah Daerah Penyelenggara Pelatihan Kepeimpinan dan Latsar CPNS. Bandiklat DIY sebagai lembaga pelatihan berprestasi dalam *“Training Center fot the 4t.0 Industrial Revolution”*.

Dari sharing tentang keunggulan dan prestasi DIY tentang pendidikan di berbagai level dan bidang pendidikan, Tim Penulis mendukung penuh jika dalam pembangunan jangka panjang Keistimewaan DIY periode 2022-2042 perlu didukung oleh sekolah atau pendidikan khusus tentang Keistimewaan DIY.

Keistimewaan DIY Lahirkan Pendidikan Berkualitas

Satu hal yang perlu disadari dan menjadi penyemangat adalah fakta sejarah bahwa Keistimewaan DIY telah melahirkan pendidikan berkualitas. Sejarawan UGM Bahauddin mengatakan bahwa lahirnya Universitas Gadjah Mada pada 19 Desember 1945 itu menjadi momen kebangkitan pendidikan Yogyakarta dan Indonesia. Itu menjadi pembalikan keadaan dari buruk ke baik sebab setahun sebelumnya (19 Desember 1948) Yogyakarta porak-poranda karena diserang Belanda (Agresi Militer II).

Dari Keistimewaan DIY-lah UGM lahir, bahkan perkuliahan dimulai dari Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan beberapa ruang di Kraton sebagai ruang kuliah yaitu di ruang-ruang Pagelaran, Siti Hinggil, dan Mangkubumen. Pada saat pendiriannya, UGM mempunyai 6 fakultas yaitu (1) Fakultas Kedokteran, termasuk di dalamnya jurusan farmasi, kedokteran gigi, dan ada Akademi Pendidikan Guru Bagian Kimia dan Ilmu Hayati, (2) Fakultas Hukum, di dalamnya ada Akademi Keahlian Hukum,

Keahlian Ekonomi, Notariat, Akademi Ilmu Politik, Akademi Pendidikan Guru Bagian Tata Negara, Ekonomi, dan Sosiologi, (3) Fakultas Teknik, termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Ilmiah Alam dan Ilmu Pasti, (4) Fakultas Sastra dan Filsafat, ada Akademi Pendidikan Guru Bagian Sastra, (5) Fakultas Pertanian yang di dalamnya ada Akademi Pertanian dan Kehutanan, (6) Fakultas Kedokteran Hewan.

Cerdas Ber-Keistimewaan

Dalam curah gagasan tentang pendidikan Keistimewaan DIY, Tim Penulis menekankan pentingnya proses belajar yang harus meningkat. Pembelajar bukan hanya tahu tentang apa itu Keistimewaan, tahu apa itu UUK, dan seterusnya. Tetapi, level belajar kita harus meningkat ke level yang lebih tinggi.

Tentang level belajar, teori tentang taksonomi tujuan instruksional di ranah kognitif dan afektif ini dipelopori oleh B. S. Bloom (1956 dan 1964). Taksonomi itu merupakan sebuah klasifikasi yang menunjukkan tingkatan-tingkatan pembelajaran dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Taksonomi tujuan instruksional di ranah kognitif meliputi kategori-kategori: (1) pengetahuan (*knowledge*), (2) pemahaman (*comprehension*) (3) penerapan (*application*), (4) analisis (*analysis*), (5) sintesa (*synthesis*), (6) evaluasi (*evaluation*).

Dalam sebuah FGD yang diselenggarakan Paniradya Kaistimewan, Nara Sumber Bambang Wisnu mempertanyakan apakah ASN sudah mengetahui dengan benar Keistimewaan DIY. Jika dicek secara jujur, menurutnya belum tentu semua ASN mengetahui apakah Keistimewaan itu, apakah isi UU Keistimewaan DIY, apakah sejarah Keistimewaan DIY dan seterusnya. Sedangkan menurut taksonomi Bloom itu, hal “mengetahui” itu barulah level paling bawah dari proses belajar. Artinya, betapa pendidikan Keistimewaan itu diperlukan supaya ASN dan masyarakat menjadi cerdas ber-Keistimewaan DIY.

Pendidikan Progresif-Transformatif

Dalam diskusi tentang pendidikan Keistimewaan DIY, Tim Penulis juga menampung kritik tentang pola pendidikan kita yang belum mencerdaskan. Pola pendidikan kita tentang Keistimewaan DIY masih “tradisional” dalam arti “mendikte” dan membuat pembelajar pasif.

Sudarminto dalam kata pengantar buku karya John Dewey (2004) menyimpulkan bahwa pendidikan tradisional adalah pola pendidikan lama yang memahami materi pelajaran sebagai sesuatu yang sudah baku dan pendidikan merupakan pengalihan seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang wajib dikuasai oleh subyek didik dari generasi ke generasi. Konsekuensi dari konsep pendidikan seperti itu, sekolah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang sama sekali terpisah dari kehidupan masyarakat dan

pendidikan merupakan kegiatan mempersiapkan subyek didik untuk dapat memainkan perannya dalam masyarakat di masa depan. Pendidikan tradisional bersifat kaku, menuntut disiplin ketat, dan membuat subyek didik menjadi pasif.

Pendidikan Keistimewaan DIY yang mencerdaskan seharusnya merupakan jenis “pendidikan progresif”. Menurut John Dewey (2004), pendidikan progresif adalah pola pendidikan yang menekankan kebebasan si pelajar. Pola pendidikan baru ini merupakan produk ketidakpuasan terhadap pola pendidikan tradisional yang begitu mengekang ketat dan otoriter terhadap subyek didik. Dengan kebebasan itu maka subyek didik bebas untuk belajar dan juga belajar mandiri serta bebas menemukan sendiri pengetahuan yang dibutuhkannya tanpa tekanan dan kekangan dari pendidik dan lembaga pendidikan.

Pendidikan Keistimewaan DIY yang mencerdaskan seharusnya merupakan jenis “pendidikan transformatif”. Menurut Darmaningtyas sebagaimana dikutip Ma’arif (2005) pendidikan transformatif adalah model pendidikan yang bersifat kooperatif terhadap segenap kemampuan anak untuk mengembangkan proses berpikir yang lebih bebas dan kreatif. Dalam hal ini, potensi-potensi individual tidak dimatikan dengan bentuk pendidikan yang bersifat penyeragaman dan pemberian sanksi-sanksi. Anak didik dibiarkan berkembang secara wajar dan manusiawi. Pendidikan harus bebas dari penindasan, ketimpangan, dominasi,

eksploitasi. Pendidikan harus menekankan kesetaraan, saling memahami, memiliki kepekaan, dan kebebasan. Tujuan akhirnya adalah supaya anak didik mempunyai pengetahuan yang kritis (*critical knowledge*).

Pendidikan Berbasis Kebudayaan

Karena kebudayaan merupakan “kembangnya” Keistimewaan DIY, maka pendidikan berbasis kebudayaan harus dikembangkan di DIY. Ke depan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan berbasis kebudayaan harus lebih diintensifkan.

Sejak UU Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, curah gagasan tentang pendidikan berbasis kebudayaan menghangat di Yogyakarta. Berikut ini adalah salah satu pemikiran dari Haryadi Baskoro yang telah dibuat di rubrik Opini Harian Kompas (8 November 2014) dengan judul “Pendidikan Berbasis Kebudayaan”.

Dalam rangka revolusi mental, tugas Mendikbud Anies Baswedan semestinya mengembangkan pendidikan berbasis kebudayaan. Saat diumumkan, disebut bahwa tugas Anies adalah sebagai ‘menteri kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah’, menunjukkan komitmen pemerintahan Jokowi untuk menjadikan kebudayaan sebagai basis pendidikan. Hal itu sejalan dengan pemikiran Bung Hatta sebagaimana dikutip Yudi Latif (*Kompas*, 21/8), bahwa yang diajarkan dalam proses pendidikan adalah kebudayaan, dan pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan.

Secara antropologis, Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah sistem gagasan, sistem perilaku, dan budaya materi yang menjadi milik diri melalui proses belajar. Artinya, manusia menjadi makhluk yang berbudaya melalui proses belajar. Tidak ada yang instan, sehingga ketika proses belajar kebudayaan (enkulturasi) itu diformulasikan maka lahirlah sistem-sistem pendidikan berjenjang yang kompleks..

Kebudayaan, entah yang bernilai positif atau negatif, menjadi milik diri melalui proses belajar. Perilaku (budaya) korupsi tidak muncul begitu saja. Kebiasaan mencontek sejak duduk di bangku SD, misalnya, adalah proses belajar awal dari perilaku korup tersebut. Apalagi kebudayaan yang mulia dan luhur, yang kini menjadi sesuatu yang langka, tidak bisa dimiliki tanpa belajar keras dalam waktu lama.

Anak dan remaja

Dalam proses pembudayaan, apa yang dipelajari oleh manusia pada awal proses sosialisasinya dalam kehidupan bermasyarakat akan begitu tertanam dalam jiwa sehingga sulit diubah. Sebagai contoh adalah budaya makan nasi, kita susah mengubahnya karena itulah yang pertama-tama kita pelajari.

Karena itu tepat jika pembudayaan harus dimulai pada masa kanak-kanak dan remaja, yaitu masa-masa sekolah di bangku pendidikan dasar dan menengah. Revolusi mental pada dasarnya sulit ketika mentalitas

buruk sudah terbentuk sejak kanak-kanak seperti pada kasus mental korup yang berakar pada mental mencontek sejak anak-anak. Itulah sebabnya mental korup bangsa ini tidak mudah dihapuskan sekalipun dengan ancaman dan hukuman yang mengerikan. Mentalitas sebuah bangsa akan kuat jika ditanamkan sejak masa kanak-kanak.

Orang Jawa punya ungkapan yang mengatakan bahwa menyembuhkan penyakit batuk (*watuk*) itu mudah, dua tiga hari sembuh, tetapi menyembuhkan penyakit karakter (*watak*) tidak bisa dalam setahun atau dua tahun. Oleh sebab itulah revolusi dalam konteks perubahan rezim yang bobrok sering terpaksa menjadi sebuah upaya perubahan radikal dengan kekerasan. Alasannya sederhana, karena merubah mental para pemimpin sangat tidak mudah sehingga pembaruan lebih cepat terjadi bila dilakukan penggulingan kekuasaan secara paksa.

Masa kanak-kanak dan remaja merupakan masa emas sekaligus periode rentan yang sangat kritis. Salah didikan, fatal akibatnya. Itulah sebabnya gerakan terorisme mengkader anak-anak belia karena mudah diindoktrinasi. Radikalisme dan sikap ekstrim, intoleransi, dan perilaku kekerasan mudah diajarkan pada diri anak-anak.

Anies Baswedan dituntut untuk bisa mengemas pendidikan moral, budi pekerti, Pancasila, pendidikan damai (*peace education*), pendidikan pluralisme-multikulturalisme untuk para pelajar kita. Revolusi

pada dasarnya adalah pembaruan yang radikal, meski tidak selalu terjadi dalam waktu cepat. Jika pembudayaan Indonesia intensif dilakukan sejak kanak-kanak, niscaya gerakan revolusi mental bangsa akan berbuah lebat pada masa 20 atau 30 tahun yang akan datang.

Kebudayaan itu bersifat kreatif. Kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang dinamis. Para pemimpin masa silam harus memiliki kualifikasi '*narendra sudibyo*', yaitu sebagai para penggagas, pencipta, dan pengembang peradaban. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk kreator budaya karena menghadapi alam tempat berpijak yang selalu menantanginya untuk bertahan hidup.

Dengan demikian kebudayaan (mental dan perilaku) kreatif itulah yang harus ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Sebab pada dasarnya, sifat kreatif yang asli juga muncul pada periode perkembangan psikologis anak-anak, seperti yang terjadi pada anak-anak yang kesukaannya adalah bertanya (periode bertanya). Pendidikan tradisional yang hanya bersifat mencekoki anak dengan seabreg pengetahuan terbukti justru menumpulkan mental bertanya dan jiwa kritis anak-anak kita.

Pendidikan berbasis budaya untuk pelajar sekolah dasar dan menengah haruslah pendidikan transformatif yang mencerdaskan. Menurut Darmaningtyas sebagaimana dikutip Ma'arif (2005), pendidikan transformatif adalah model pendidikan

yang bersifat kooperatif terhadap segenap kemampuan anak untuk mengembangkan proses berpikir yang lebih bebas dan kreatif. Dalam hal ini, potensi-potensi individual tidak dimatikan dengan bentuk pendidikan yang bersifat penyeragaman dan pemberian sanksi-sanksi. Anak didik dibiarkan berkembang secara wajar dan manusiawi. Pendidikan harus bebas dari penindasan, ketimpangan, dominasi, eksploitasi. Pendidikan harus menekankan kesetaraan, saling memahami, memiliki kepekaan, dan kebebasan. Tujuan akhirnya adalah supaya anak didik mempunyai pengetahuan yang kritis (*critical knowledge*).

Tantangannya, kecerdasan (sifat kritis dan kreatif) anak-anak kita harus dipadukan dengan mentalitas idealis. Sebab, meski metode-metode pembelajaran masa kini bersifat mencerdaskan, namun cenderung pragmatis. Metode '*quantum teaching*' yang tekenal itu misalnya, substansinya pragmatis. Kita membutuhkan kebangkitan generasi yang idealis, namun idealisme itu sendiri harus diajarkan secara atraktif dan menyenangkan bagi anak-anak kita tanpa merenggut kebahagiaan mereka.

Bab 7

Pengkaderan Milenial Keistimewaan DIY

Keistimewaan Yogya masa depan berada di tangan generasi milenial masa sekarang. Kesadaran akan hal ini telah mendorong lembaga khusus untuk pembinaan Keistimewaan Yogya yang bertajuk “Pawiyatan Pamong Jogja Istimewa untuk Indonesia” melakukan kaderisasi generasi muda. Pada Sabtu, 23 Maret 2019 lalu, lembaga ini melantik duta-duta muda yang sudah ada di DIY menjadi duta-duta khusus untuk Keistimewaan DIY. Pelantikan langsung oleh GKR Hemas menunjukkan keseriusan niatan ini.

Pelantikan duta-duta Keistimewaan oleh GKR Hemas itu perlu ditindaklanjuti dengan pengkaderan yang sistematis. Sejauh ini sudah ada beberapa generasi milenial yang mengikuti pengkaderan Pawiyatan Pamong dan mereka merasa dibekali dengan baik.

Duta Keistimewaan

Dalam dikusi dengan komunitas milenial Yogyakarta, Tim Penulis mendapatkan masukan aspiratif yang penting terkait pengkaderan generasi muda milenial. Ayuningtyas Rachmasari, Diajeng Bantul dan Duta Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pernah menjadi peserta pelatihan Pawiyatan Pamong 2019, mengusulkan supaya ke depan dibentuk paguyuban khusus Duta atau Ambassador Keistimewaan Yogya.

Menurut Ayun, pembentukan kader Duta Keistimewaan itu sangat mungkin sebab bisa diampu bersama-sama oleh lembaga-lembaga seperti Paniradya Keistimewaan, Pawiyatan Pamong, Dinas Kebudayaan, dan sebagainya. Di Yogyakarta sendiri ada banyak paguyuban duta-duta dan semua berkegiatan secara aktif.

Paguyuban Duta-duta di DIY

Nio	Nama Paguyuban	Instansi yang Menaungi
1	Dimas-Diajeng Jogja	Dinas Pariwisata Provinsi DIY
2	Dimas Diajeng Bantul	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
3	Kota Yogya	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
4	Sleman	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
5	Kulon Progo	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo
6	Gunungkidul	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
7	Duta Museum	Badan Musyawarah Museum (Baramus) DIY
8	Duta HIV AIDSS	BKKBN
9	Duta Budaya	Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia
10	Duta Bahasa	Balai Bahasa DIY
11	Duta Damai	BNPT RI
12	Ako Anoi Hakka	Paguyuban Hakka Yogya

	Jogja	
13	Koko Cici Yogya	Jogja Chinese Art and Culturte
14	Duta Genre	BKKBN
15	Duta Kopma UNY	Kopma UNY
16	Duta UNY	UNY
17	Duta Poltekes	Poltekes
18	Putera Putri Bahari	Ikatan Putar Purtri Bahari Indonesia
19	Putri Adana	LPK Adana Yogya
20	The Best Muslimah Model	Farahadi Center Yogya
21	Mister & Miss Grand Tourism DIY	Pratama Group
22	Miss Bantul	Bayu Kuntani
23	Duta UIN Sunan Kalijaga	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
24	Duta Koperasi Sleman	Dinas Koperwan UMKM Sleman

Duta-duta itu dipilih melalui proses kompetisi dan pembinaan secara ketat. Dimulai dari pembukaan kesempatan untuk ikut berkompetisi dan terbukti banyak kaum muda yang meminatinya. Proses penyaringan pun dilakukan dan para finalis diberi pembekalan khusus. Para finalis dilombakan dalam pertandingan final untuk memilih para pemenangnya.,

Kompetensi yang diajarkan beragam sesuai dengan visi-misi paguyuban duta yang bersangkutan. Duta pariwisata misalnya, diberi pembinaan untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepariwisataan. Duta bahasa diberi kompetensi tentang misalnya bagaimana menjadi penyuluh penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Salah satu yang menarik bagi generasi muda adalah “branding” dari kegiatan duta-duta ini. Melalui kegiatan ini generasi muda se-DIY bahkan se-Indonesia terhubung satu sama lain. Kompetensi duta-duta ini juga menantang kemampuan untuk berpenampilan menarik seperti *public speaking*, *fashion*, dan penampilan panggung lainnya. Pencapaian sebagai duta juga meningkatkan portofolio untuk pengembangan diri selanjutnya. Pencitraan tentang kegiatan duta-duta ini sangat positif karena mereka bukan hanya dituntut untuk berpenampilan bagus tetapi juga memiliki prestasi berbasis talenta masing-masing.

Kebutuhan

Pembinaan kader-kader milenial untuk Keistimewaan DIY merupakan kebutuhan sangat penting. Pertama, generasi muda DIY masih banyak yang belum memahami Keistimewaan DIY. Salah seorang pendidik Pawiyatan Pamong, KPH Yuda Hadiningrat merasa prihatin dengan lemahnya wawasan generasi muda

tentang Keistimewaan DIY. Ketika ditanya soal di mana letak keistimewaan Yogya, banyak tokoh muda Yogya yang menjawab tidak akurat. Ada yang menjawab Yogya istimewa karena pariwisatanya, karena menjadi pusat pendidikan, atau karena kulinernya. Tidak sepenuhnya salah, namun jawaban seperti itu sama sekali tidak tepat untuk menjelaskan status Keistimewaan DIY yang berbasis sejarah dan konstitusi.

Kedua, pembinaan generasi muda masa kini akan menghasilkan para pemimpin di masa depan. Jika Grand Design Keistimewaan DIY periode 2022-2042 menghadapi keberhasilan pencapaiannya di akhir periode maka sejak sekarang harus dipersiapkan para pemimpin visioner dan berkompeten terkait Keistimewaan DIY. Para Duta Keistimewaan yang terkaderisasi dengan baik yang hari ini berusia 20-an tahun, di tahun 2042 ketika mereka berusia 40-an tahun akan menjadi pemimpin-pemimpin Keistimewaan DIY yang kuat.

Ketiga, sejarah mencatat bagaimana Keistimewaan DIY dimulai dari kepemimpinan “generais milenial” di masa lalu, yaitu sosok Sri Sultan Hamengku Buwono yang lahir pada 12 April 1912. Pada tahun 1945 beliau baru berumur 33 tahun saat mengambil keputusan penting untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Belum genap umur 40 tahun beliau melakukan tindakan-tindakan kenegarawanan untuk menyelamatkan-

kan RI dari penjajahan sampai kedaulatan RI diakui. Saat itu Soekarno dan Hatta sudah berumur lebih tua, sekitar usia 40-an,

Keempat, kehadiran dan peran duta-duta milenial akan sangat membentuk proses sosialisasi dan menumbuhkan gerakan kaum muda untuk Keistimewaan DIY.

Kelima, Duta-duta Keistimeaan akan berperan mensinergikan berbagai sumber daya kaum muda di seluruh DIY, Setidaknya Duta-duta Keistimewaan DIY akan mensinergikan semua duta-duta yang sudah ada di DIY.

Kaderisasi Keistimewaan DIY

Diskusi tentang kaderisasi kaum muda untuk Keistimewaan DIY sudah menghangat sejak terbitnya UU Keistimewaan DIY pada 2012. Berikut adalah salah satu aspirasi pemikiran mengenai hal itu yang dirangkum dan disharingkan oleh Haryadi Baskoro dalam rubrik ANALISIS KR Harian Kedaulatan Rakyat 27 Februari 2017.

Ketika polemik soal Undang-Undang Keistimewaan DIY (UUK) sampai di Mahkamah Konstitusi (MK) berarti masalah Keistimewaan Yogya kembali menjadi isu nasional. Positifnya, menunjukkan dinamika pelaksanaan UUK itu sendiri serta tumbuhnya sikap kritis

evaluatif. Negatifnya, wibawa Yogya termasuk Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi taruhannya.

Yang jadi persoalan, seperti publik telah paham, adalah pada Pasal 18 ayat (1) huruf m di mana kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Hal itu dipandang diskriminatif karena mengindikasikan bahwa kandidat yang bersangkutan harus punya istri, yang berarti adalah pria. Bagian ini menjadi masalah ke depan karena, seperti publik telah paham, kandidat Sultan yang berarti juga kandidat Gubernur DIY masa depan adalah bergender perempuan.

Namun jikalau melihat Pasal 18 ayat (1) itu secara menyeluruh, substansinya lebih kepada soal kapasitas diri (SDM) dari kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Syarat-syarat seperti bertaqwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi, NKRI dan pemerintah, serta berpendidikan minimal SMA, lebih menunjuk pada kapasitas dan kompetensi diri. Artinya, tanpa mengecilkan persoalan gender, yang dibutuhkan di masa depan adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berkapasitas dan berkompeten.

Dalam sistem politik meritokrasi (*merit system*), posisi dan jabatan pemimpin diberikan kepada orang-

orang yang berkapasitas. Faktor latar belakang suku, agama, ras, gender, dan tingkat usia tidak lagi menjadi penghalang jika memang memiliki kecakapan yang terukur dan teruji. Dalam hal inilah *mindset* kita masih terbelakang.

Orientasi pada meritokrasi inilah yang seharusnya juga menjadi fokus Yogya, khususnya Kraton sebagai pensuplai para pemimpin dalam Keistimewaan Yogya. Dulu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meragukan konsep Keistimewaan Yogya, alasannya adalah meragukan monarki yang tidak secara otomatis mampu menghasilkan pemimpin berkualitas. Dalam kearifan Jawa pun ada ungkapan *tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati*. Artinya tidak selamanya keturunan bangsawan akan hebat, sementara keturunan orang biasa justru bisa hebat.

Karena itu, komitmen pada Keistimewaan Yogya yang berbasis pada pelembagaan peran kepemimpinan Kraton harus fokus pada pengkaderan. Dan sejarah telah mencatat keberhasilan pengkaderan Kraton Yogya. Sebagai contoh adalah bagaimana Sri Sultan HB VIII mempersiapkan putranya, Henky, yang kemudian naik tahta sebagai Sultan HB IX hingga benar-benar siap menerima tongkat estafet kepemimpinan dan bahkan muncul sebagai tokoh nasional juga.

Menurut Purwadi (2007), seorang raja (*ratu binathara*) harus mempunyai tiga macam wahyu.

Pertama, *wahyu nubuwah*, yaitu wahyu yang mendudukkan raja sebagai seorang wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, *wahyu hukumah*, yaitu wahyu yang menempatkan raja sebagai sumber hukum dan wewenang dari Tuhan. Ketiga, *wahyu wilayah*, yaitu wahyu yang mendudukkan raja sebagai pemimpin yang memberi penerangan dan perlindungan bagi rakyatnya. Artinya, dalam bahasa modern, seorang pemimpin harus punya multi inteligensi, dari IQ sampai SQ, dari *intrapersonal intelligence* sampai *interpersonal intelligence*.

Monarki Inggris tetap berjaya karena pemimpin yang muncul adalah raja atau ratu yang berkapasitas dan berkompeten. Kerajaan Inggris sangat mengkader para kandidat raja dan ratunya. Ambillah contoh rekam jejak prestasi Pangeran William, putra Pangeran Charles bersama mendiang Diana Spencer. William meniti karir dari menjadi kadet (2006), Letnan di Blues and Royals (2006), petugas penerbagan Royal Airforce (2008-2009), sub-Letnan di Royal Navy (2009). dan Kapten di Blues and Royals serta Kapten penerbang Royal airforce (sejak 2009). Ia pun mendapat tanda jasa Royal Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter (2008) dan Extra Knight of the Ancient and Most Noble of the Thistle (2012).

Begitu pula dengan Negeri Belanda, suksesi sukses menampilkan ratu dan raja baru yang berkualitas dan

dipercaya rakyat. Pada 30 April 2013 lalu, selain berpesta memperingati Hari Ratu, negeri kincir angin itu bersukaria menyambut pergantian pucuk pimpinan kerajaan dari Ratu Beatrix kepada sang putra mahkota, Raja Willem. Pada tahun itu, menurut jejak pendapat IPSOS, sebanyak 78 persen warga Belanda mendukung penuh monarki, naik 4 persen dari tahun sebelumnya.

Dalam Kitab Pararaton (1600-an) yang merupakan kidung dan cerita prosa diceritakan bagaimana raja-raja dan para bangsawan di Jawa saling membunuh demi berebut harta, tahta, dan wanita. Fokus pada kekuasaan membuat kita terpecah dan terjajah. Fokus pada pengkaderan akan melahirkan pemimpin berkapasitas.

Segera Merangkul Generasi Muda

Selama penulisan buku ini, Tim Penulis mendapat masukan dari generasi muda berupa aspirasi supaya generasi muda segera dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042. Berikut adalah rangkuman masukan-masukan itu yang ditulis oleh Haryadi Baskoro dengan judul “Pemuda dan Jangkauan Implementasi Keistimewaan” dimuat di Harian Kedau;atan Rakyat edisi 28 Oktober 2021, sebagai berikut.

Dalam Dokumen “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017” yang diterbitkan Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada 2018

dilaporkan bahwa implementasi Keistimewaan DIY masih belum maksimal dalam menjangkau generasi muda. Padahal, setelah momentum Sumpah Pemuda 1928, gerakan-gerakan pemuda berskala nasional dan internasional langsung berkembang luar biasa di Yogya.

Dalam buku “Republik Indonesia: Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diterbitkan oleh Djawatan Penerangan DIY pada 1953 dilaporkan gerakan-gerakan pemuda di Yogya setelah Nagari Yogya bergabung dengan Negara RI. Sebelum Ibukota RI dipindah ke Yogya, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia di Yogya pada 10-11 November 1945. Raja Yogya Sultan HB IX tampil sebagai “tokoh milenial”. Dalam pidatonya ia berkata, “Pada waktu ini pemuda Indonesia mempunyai tempat yang istimewa di tengah-tengah bangsanya, oleh karena perjuangan kemerdekaan sekarang ini terutama pada pemudanya!”

Pada hari kedua kongres itu, ribuan pemuda bergabung dalam rapat raksasa di Alun-alun Utara Kraton Yogya. Selain pemuda-pemudi Yogya, hadir utusan-utusan dari berbagai daerah: Jawa (400 orang), Kalimantan (11 orang), Sulawesi (9 orang), Maluku (25 orang), Sunda Kecil (18 orang), dan Sumatera (166 orang). Api nasionalisme bertambah berkobar karena pada saat itu juga terjadi pertumpahan darah di Surabaya (peristiwa 10 November 1945). Bung Karno berpidato berapi-api tentang lima prinsip dalam

Pancasila. Di tengah sorak-sorai massa “milenial” itu, di atas alun-alun itu melintas pesawat udara yang dikemudikan pemuda Indonesia, terbang rendah menyebarkan palflet-pamflet bertuliskan “Indonesia, Indonesia, Tanah Airku, Aku sungguh membelamu, sampai tewas jiwaku!”

Setelah Yogya menjadi Ibukota RI sejak 4 Januari 1945, pada 9 Juni 1946 diadakan Kongres Pemuda Indonesia II di Yogya. Dalam kongres itu, Presiden Soekarno menandakan bahwa tegaknya Negara RI sangat tergantung pada rakyat dan pemudanya. Menteri Pertahanan Mr Amir Syarifuddin mengatakan bahwa karena revolusi kemerdekaan sudah dimulai dari pemuda maka pemuda adalah yang harus menyelesaikannya. Semua yang hadir secara spontan mengumpulkan uang sampai Rp 15.000 yang kemudian ditetapkan sebagai “Pinjaman Nasional” untuk mendukung revolusi Kemerdekaan RI. Salah satu keputusan Kongres yang radikal saat itu adalah tekad pemuda untuk berjuang melawan penjajah sampai titik darah penghabisan.

Tak lama sesudah itu, pada 3-6 Oktober 1946 di Yogya diadakan event pertemuan pemuda berbagai bangsa dan golongan. Wakil dari India, Gishkenchan, menyampaikan kabar bahwa Nehru sudah bersedia mengakui Kemerdekaan RI dan menyerukan supaya Indonesia dan India bersatu melawan imperialisme

Barat. Wakil pemuda Filipina, Estrada, memberi dukungan penuh pada perjuangan pemuda-pemuda Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Utusan dari Malaysia, Kamaruddin bin Abdul Rahim mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia harus bersatu untuk memenangkan kawasan Timur dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Pertemuan akbar itu juga diikuti oleh wakil-wakil etnis yang ada di Indonesia. Tonny Wea yang mewakili etnis Cina di Indonesia menyatakan bahwa pemuda-pemuda Tionghoa di Indonesia siap menjunjung tinggi perjuangan bangsa Indonesia. Wakil dari etnis Arab di Indonesia, Hadi, juga menegaskan persatuan pemuda Indonesia yang heterogen.

Dari sekelumit sejarah Yogya itu, dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa Yogya istimewa karena gerakan pemudanya yang berdampak nasional dan internasional. Sultan HB IX sendiri yang lahir pada 1912, pada 1945 baru berumur 33 tahun. Pada 1945 itu banyak pemimpin nasional masih belia seperti Muh Natsir (37 tahun), Sutan Sahrir (36 tahun), Mr Muh Roem (37 tahun), KH Wahid Hasim (31 tahun). Spirit kepemudaan harus direvitalisasi secara berkelanjutan dalam implementasi Keistimewaan DIY masa kini.

Aspirasi Generais Milenial untuk Keistimewaan DIY

Pada 2019, Dinas Sosial Provinsi DIY bersama para pakar dari Universitas Gadjah Mada menyusun Naskah

Akademik Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk KGPAА Paku Alam VIII. Disamping naskah akademik, waktu itu juga diluncurkan buku-buku pendukung, salah satunya berjudul “Sang Adipati” dengan editor Untung Sukaryadi (waktu itu Kepala Dinas Sosial DIY) dan Haryadi Baskoro. Dalam buku bunga rampai itu dimuat juga artikel karya Ayuningtyas Rachmasari yang adalah Diajeng Bantul dan Duta Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, peserta pelatihan Pawiyatan Pamong 2019. Artikel itu merepresentasikan pengetahuan dan kepedulian seorang duta milenial DIY terhadap Keistimewaan Yogya, Berikut adalah tulisannya yang diberi judul “Sosok KGPAА Paku Alam VIII dalam Sanibari dan Pikiran Saya”.

Saenipun kito bergabung mawon kaliyan Republik. Kalimat esensial inilah yang mengevokasi sanubari saya untuk pertama kalinya tertarik mengenal Paduka Sri Paku Alam VIII. Kalimat lembut nan sakti magis penuh aura tulus ikhlas itu diucapkan beliau pada diskusi pribadi dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX saat masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Hingga kalimat itu menjadi salah satu bagian dari historis lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai generasi milenial pribadi saya pernah mendengar nama beliau, tetapi tidak lebih dari pengetahuan bahwa beliau pernah menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Artinya sekadar hafalan sebagai konsekuensi bagian dari soal tanya jawab pelajaran di sekolah. Ucapan berkharisma dari sosok berkharisma, “Saenipun kito bergabung mawon kaliyan Republik,” menjadi pintu masuk bagi saya memasuki lorong inspirasi yang tadinya masih remang-remang, sayup-sayup. Lebih memasuki lorong inspirasi itu, saya menemukan pijar terang benderang keteladanan dan komitmen cinta tanah air. Hanya sedikit tokoh yang dituliskan ke dalam sebuah buku. Sri Paku Alam VIII merupakan salah seorang dari yang sedikit itu. Menelusuri jejak pengabdian sosok Paduka Sri Paku Alam VIII, kita mendapatkan bahwa beliau merupakan figur istimewa.

Defenisi istimewa tersebut lebih terkonfirmasi tatkala beliau bersikap dalam peran proses lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paku Alam VIII merupakan pribadi yang pendiam, tekun, dan sabar. Bagaimana beliau dapat tenang santun dalam mengambil sikap ketika akan dihapuskannya keistimewaan DIY. Sikap ini dapat menjadi keteladanan inspiratif untuk generasi muda sekarang. Kebanyakan generasi muda sering bersikap reaksioner, instan berpikir, instan bersikap, tanpa memikirkan dengan hati yang tenang dalam menanggapi suatu permasalahan. Sebagai figur pemilik sah masa depan bangsa, bersikap reaksioner bukanlah pilihan yang bijak. Maka alangkah arif bijaksanalah apabila kawula muda anak bangsa memiliki sebanyak-banyaknya sosok teladan, supaya

semenjak usia muda keteladanan tersebut menjadi pupuk organik mujarab yang menjaga tumbuh berkembangnya generasi muda berkualitas tanggon, trengginas, dan tanggap.

Kualitas manusia memang harus dibentuk sejak kita kecil, lewat lingkungan keluarga dan masyarakat. Layaknya Sri Paku Alam VIII yang telah mendidik anaknya dengan baik dan menyesuaikan kebutuhan non materi untuk anaknya. Sri Paku Alam VIII sangat mengerti akan generasi muda. Sebagai ayah, beliau memberikan ruang ekspresi dan tidak memaksa putra-putrinya untuk menjadi apa selama hal tersebut masih positif. Ini contoh sikap Sri Paku Alam VIII senantiasa *full open minded* mendukung gerak bebas anak muda dalam berekspresi dan memutuskan keinginannya

Bukan saya mau meninggikan Sri Paku Alam VIII, tapi begitulah adanya Sri Paku Alam VIII. Toh beliau tetap rendah hati dan dekat kepada masyarakat. Jasa Sri Paku Alam VIII dan kehadirannya sebagai figur inspiratif bagi generasi muda patut diapresiasi dan layak menjadi pahlawan nasional.

Pahlawan nasional itu bukan hanya sebuah status, bukan juga sekadar seremonial pengalungan medali dan pemberian sertifikat kepada perwakilan ahli warisnya. Saat masih hidup maupun sesudah wafat, sosok pahlawan nasional tetap memiliki kontribusi untuk ikut merawat tanah air. Tidak hanya berjasa pada

saat masih masa perjuangan, tapi juga amat berjasa sebagai *role model* generasi yang lahir pada zaman setelahnya. Sri Paku Alam VIII adalah Pahlawan pada masa perjuangan dan Pahlawan sebagai *role model* generasi muda untuk ikut mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI!!!

Bagi generasi muda seperti saya, mengenal sebanyak-banyaknya figur inspiratif adalah sebuah kebutuhan. Anak-anak muda, generasi Y & Z, kini telah dikelilingi oleh kemajuan teknologi digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Sayangnya, tak melulu kemudahan dalam hal yang positif, tapi banyak dampak negatif yang mempengaruhi generasi muda. Bahkan, generasi sekarang juga cukup jauh dan hanya sayup-sayup mengenal pahlawan nasional sebagai *role model*. Diperlukan sikap sadar sengaja untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya *role model* tersebut agar generasi muda ikut berkontribusi dan peduli kepada tanah air.

Generasi muda yang baik dan benar adalah generasi yang menganggap penting membaca masa lalu, meminjam inspirasi tokoh-tokoh panutan dari masa lalu, dan ini pun masih berpotensi sebagai inspirasi pasif. Mengapa? Karena inspirasi aktif adalah ketika inspirasi dari para guru bangsa, dari para pahlawan, dari para *role model* bisa *menggugah* generasi muda *menggubah* dan *mengubah* peradaban, berhasil

sebagai inspirasi yang ‘benar’ bila inspirasi aktif berpijar menyinari masa depan tatkala mereka membaca dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari inspirasi sebagai kata kerja, bukan kata benda. Sosok Paduka Sri Paku Alam VIII tepat sebagai salah satu inspirasi aktif tersebut. Keberadaan beliau sebagai Pahlawan Nasional tepat, bukan sebagai simbol status, gengsi, dan bentuk penghormatan saja melainkan bermanfaat untuk pijar di hati pikiran generasi muda. Saat itulah kehadiran sosok Pahlawan Nasional menemukan hakekatnya. Merdeka!

Bab 8

Digitalisasi Keistimewaan DIY

Tim Penulis berdiskusi dengan beberapa pegiat digital yang menyampaikan aspirasi agar Keistimewaan DIY masa depan dibangun berbasis digital. Mereka antara lain Guntur dan Nindi Kusuma. Pembahasan mengenai digitalisasi Keistimewaan DIY berlanjut dengan diskusi bersama Kepala Dinas Kominfo Provinsi DIY Rony Primanto. Tim Penulis juga berkonsultasi lebih lanjut dengan Staf Khusus Kementerian Kominfo RI Dr. Dedi Permadi yang ternyata sangat mendukung digitalisasi Keistimewaan DIY.

Gagasan Jogja Ibukota Digital

Dalam diskusi soal digitalisasi Keistimewaan DIY muncul gagasan tentang Jogja Ibukota Digital. Gagasan ini mengarah pada pengembangan DIY dengan keistimewaannya sebagai pusat kegerakan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi digital. Hal ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X jauh sebelum UU Keistimewaan DIY disahkan. Dalam buku beliau karya berjudul “Merajut Kembali Keindonesiaan Kita” (Gramedia, 2007), beliau menulis gagasan tentang “Teknologi bagi Pemberdayaan Ekonomi (halaman 107-127).

Teknologi untuk kemajuan ekonomi yang dimaksudkan oleh Sultan HB X adalah teknologi digital. Teknologi informasi harus dimaksimalisasi untuk

pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan, keunggulan, dan kemandirian ekonomi daerah dan bangsa. Beliau kemudian membeberkan perkembangan menuju masyarakat informasi (*information society*) di mana kemenangan dalam sistem dan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan pembangunan di semua sektor.

Menurut Guntur dalam diskusi dengan Tim Penulis, pembangunan DIY sebagai Ibukota Digital pada saat ini dan ke depan sangat mempunyai peluang besar. Sekarang momentum untuk membangun gagasan itu sangat kuat karena adanya kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Perkembangan perusahaan *start up* di Yogyakarta meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 telah terdapat beberapa perusahaan yang memiliki omzet lebih dari Rp. 5 miliar per tahun. Hal ini menunjukkan pesatnya kemajuan ekonomi berbasis digital di Yogyakarta.
- Beberapa perusahaan unicorn digital dalam negeri telah memindahkan beberapa divisi yang sifatnya padat karya (*customer service*, logistik, pengembangan dan riset) ke Yogyakarta.
- Beberapa perusahaan internasional di bidang teknologi informasi telah memiliki unit usaha di Yogyakarta, antara lain perusahaan pengembangan *games* dan perangkat lunak.

- Perkembangan tersebut didukung oleh tumbuhnya ekosistem digital di Yogyakarta yang berpusat pada kluster-kluster perguruan tinggi yang terkoneksi dengan industri digital maupun industri konvensional.
- Indonesia menjadi daya tarik investasi baru di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan Asia pada umumnya. Arus investasi ke Indonesia pasca pandemi Covid-19 diperkirakan akan naik pesat.
- Di Indonesia saat ini perusahaan digital baik *start up* maupun *unicorn* masih bersifat sporadis, Sekarang belum terbentuk satuan kawasan khusus untuk pengembangan ekosistem digital, padahal masa depan ada di tangan mereka yang menguasai teknologi digital.

Bertolak dari kondisi-kondisi itu, sekarang adalah momentum yang tepat bagi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tuan rumah bagi pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Yogyakarta telah memiliki segala yang dibutuhkan untuk *mangku* masyarakat digital (1) lahan yang representatif, (2) suasana yang nyaman, (3) sumber daya manusia yang mumpuni dan kreatif, (4) perguruan tinggi yang jumlahnya tidak sedikit dan berkualitas, (5) biaya hidup yang rendah, (6) biaya operasional perusahaan yang jauh lebih rendah dibanding dengan daerah lain semisal Jakarta, (7) akses yang mudah dari daerah lain, dan (8) tentunya kepemimpinan yang mendukung.

Konsep Jogja Ibukota Digital merupakan Kawasan Ekonomi Khusus - Ekosistem Digital Jogja (KEK-ED Jogja). Ini merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi ekosistem digital mulai dari *start up* hingga *unicorn*. Ekosistem ini mencakup (1) masyarakat, (2) pengusaha, (3) UMKM.(4) perguruan tinggi, (5) pemerintah, (6) para pemangku lainnya.

Kawasan yang disediakan akan mendapat fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus dengan pemberian dukungan dari pemerintah untuk pengembangan ekosistem digital. Dengan dukungan ini, diharapkan akan terbentuk ekosistem industri digital.

Dukungan yang antara lain berupa dukungan insentif, regulasi, dan infrastruktur yang tentunya akan menjadi daya pacu untuk meningkatkan semangat pelaku usaha untuk bersama-sama membangun ekosistem digital di kawasan tersebut. Dengan terbentuknya ekosistem ini, maka Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan digital beserta perusahaan yang berbasis dukungan terhadap bisnis digital dan menjadi pusat pengembangan teknologi tidak hanya di Indonesia kawasan Asia.

Kawasan Ekonomi Khusus - Ekosistem Digital Jogja (KEK-ED Jogja) memiliki akses mobilitas yang baik dengan pusat Kota Yogyakarta, perguruan tinggi, kawasan hunian, layanan transportasi publik seperti bandara dan stasiun, serta kawasan rekreasional.

Dengan demikian KEK-ED Jogja menjadi episentrum pembangunan baru di Yogyakarta.

Pengembangan kawasan akan dilakukan dengan konsep pembangunan hijau (ramah lingkungan). Kawasan itu juga perlu memanfaatkan energi terbarukan dan tidak meninggalkan kebudayaan Yogyakarta.

Kawasan KEK-ED Jogja bisa menjadi titik curah investasi dari perusahaan-perusahaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka akan berinvestasi untuk bidang teknologi maupun dan investasi di bidang industri yang berbasis teknologi.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus - Ekosistem Digital Jogja (KEK-ED Jogja) terkait dengan Keistimewaan DIY. Pembangunan Jogja Ibukota Digital adalah revitalisasi Jogja Ibukota Republik di mana dalam sejarah DIY pernah menjadi Ibukota RI sejak 1946 hingga 1949.

Jogja Smart Province (JSP)

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus - Ekosistem Digital Jogja (KEK-ED Jogja) sangat terdukung oleh sistem-sistem digital yang sudah berkembang di DIY, salah satunya adalah Jogja Smart Province (JSP) Pada intinya JSP adalah “kolaborasi kewilayahan berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis dan pengembangan potensi-potensi di Daerah Istimewa Yogyakarta”. JSP telah dibuat masterplannya di mana salah seorang Tim Penulis

(Haryadi Baskoro) menjadi salah satu tenaga ahli Dinas Kominfo DIY untuk pembuatan masterplan JSP itu. Setelah masterplan itu diresmikan oleh Gubernur DIY, lalu diregulasikan menjadi Pergub Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province 2019-2023.

Beberapa poin penting dalam konsep Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province 2019-2023 itu adalah sebagai berikut:

- Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province Tahun 2019-2023 adalah pendekatan kreatif dan inovatif Pemerintah Daerah dan kelompok pemangku kepentingan dalam penyelesaian isu strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan provinsi melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah untuk tercapainya kehidupan masyarakat Yogyakarta yang sejahtera, sehat, nyaman, dan aman.
- Masyarakat Cerdas (Smart Society) adalah upaya mewujudkan ekosistem sosial, ekonomi, dan teknis yang bersifat humanis demi terwujudnya masyarakat yang produktif dengan literasi digital dan adaptabilitas yang tinggi.
- Kehidupan Cerdas (Smart Living) adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan komponen utama pendukung aktivitas masyarakat.

- Kebudayaan Cerdas (Smart Culture) adalah penumbuhan dan pengembangan kebudayaan melalui penguatan ekosistem budaya berbasis masyarakat.
- Lingkungan Cerdas (Smart Environment) adalah upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
- Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) adalah upaya mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan yang efektif, efisien, dan komunikatif melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta karena dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di masa yang akan datang.
- Arah Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengarahkan rasionalitas pilihan rumusan strategi agar lebih terarah dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 (lima) tahun.

- Strategi adalah rangkaian tahapan atau langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Solusi Indikatif adalah suatu rancangan awal program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Aspek Perubahan adalah sumber daya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa struktur, suprastruktur, dan infrastruktur Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Digitalisasi Aksara Jawa

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus - Ekosistem Digital Jogja (KEK-ED Jogja) akan tetap berbasis kebudayaan. Jogja Smart Province (JSP) didisain khusus konteks Keistimewaan DIY sehingga di dalam *smart cycle* ditambahkan dimensi khusus bernama “*Smart Culture*” (Budaya Cerdas). Dimensi ini memberi ruang untuk digitalisasi kebudayaan dan digitalisasi urusan-rusam Keistimewaan DIY.

Salah satu yang dikembangkan dalam digitalisasi di DIY adalah digitalisasi Aksara Jawa dalam Gerakan Yogya Kota Hanacaraka. Hal itu dibahas dalam *podcast*

Rembag Kaistimewan Paniradya Kaistimewan tangga; 3 September 2021. *Podcast* berjudul “9 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY”,

Dalam *podcast* itu, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY Tri Agus Nugroho menjelaskan bahwa saat menginjak usia 9 tahun UUK, DIY melakukan langkah besar yang menasional dan mendunia. Langkah itu berupa tindakan membangun peradaban luhur Yogyakarta dan Jawa dengan memperkuat eksistensi aksara Jawa.

Dengan dukungan Danais DIY, Gerakan Jogja Kota Hanacaraka. Dinas Kenudayaan bersama para pendidik Bahasa Jawa dan berbagai elemen pecinta dan pendukung Bahasa Jawa berjuang untuk mendigitalisasi aksara Jawa. Gerakan yang mendorong seluruh masyarakat pengguna digital untuk memakai aksara Jawa ini telah didukung lebih dari 4.000-an partisipan.

Menjadikan aksara Jawa diakui dunia tidak mudah sebab hal itu membutuhkan adanya para penggunanya dalam jumlah besar yang signifikan. Aksara Jawa sekarang masih pada tahapan *limited use* karena belum digunakan sebagai teks dalam penggunaan sehari-hari, Aksara Jawa sudah banyak dipakai tetapi masih bersifat dekoratif seperti dalam gambar, poster, logo, dan belum dalam penggunaannya sebagai teks. Aksara Jawa masih harus diperjuangkan untuk mencapai tingkatan *recommended use* dimana aksara

itu digunakan dalam bentuk teks untuk berbagai urusan dan keseharian.

Dinas Kebudayaan DIY sangat serius mengakselerasi Gerakan Jogja Kota Hanacaraka itu. Digitalisasi aksara Jawa sudah dilengkapi dengan ketersediaan tutorial pengaktifan *Javanese Font*. Untuk masyarakat juga disediakan blog di internet yang dapat digunakan dengan mudah untuk berkarya tulis dengan aksara Jawa. Digitalisasi aksara Jawa terus menerus disempurnakan hingga nantinya akan ada konverter dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa dan kemudian ke aksara Jawa.

Menurut Agus, digitalisasi aksara Jawa bukan sekadar membangun keunggulan komparatif namun memacu semangat kompetitif. Artinya aksara Jawa bukan hanya menjadi ciri pembeda Yogyakarta dibanding daerah atau masyarakat-masyarakat lain. Namun digitalisasi itu mendorong kompetisi kita untuk menggunakan aksara itu. Sebab, digitalisasi itu menyebabkan aksara Jawa dikenal dunia dan semua orang berpeluang untuk menggunakannya. Justeru karena itulah orang Jawa dan Yogyakarta harus waspada sebab bukan tidak mungkin orang asing lebih tekun mempelajarinya. Bukan hal baru jika kita menemukan fakta tentang adanya orang-orang Barat yang justeru lebih peduli dan mencintai budaya Jawa, bahasa Jawa, dan aksara Jawa.

Fasilitas Internet

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus - Ekosistem Digital Jogja (KEK-ED Jogja) sangat prospektif karena Keistimewaan DIY melalui Paniradya Kaistimewaan dan Dinas Kominfo DIY mendukung pembangunan fasilitas internet di DIY. Dalam *podcast* Rembag Kaistimewaan Paniradya Kaistimewaan tanggal 14 Oktober 2021 dengan tema “Penyediaan Akses Internet bagi Warga DIY” membahas bagaimana progres pembangunan fasilitas digital di DIY.

Dalam *podcast* itu dibahas bagaimana Dinas Kominfo memilih lokasi-lokasi di seantero DIY untuk dibangun fasilitas internet. Dalam implementasi Keistimewaan DIY sejak terbitnya UUK, pembangunan digital mendapat perhatian penting. Dana Keistimewaan (Danais) pun dikucurkan sebagian untuk mendukung program penyediaan akses dan infrastruktur digital untuk masyarakat dan para petugas pelayanan publik yang salah satunya adalah penyediaan WiFi gratis untuk masyarakat. Lokasi-lokasi yang diberi pancaran WiFi gratis antara lain adalah:

- Tempat-tempat dilakukannya kegiatan pelayanan publik seperti di kantor-kantor Pemerintah. Dengan demikian kinerja para pelayan publik dipercepat dan masyarakat terbantu akses informasinya, Menurut Rony sudah ada 438 kantor desa yang diberi fasilitas WiFi gratis oleh Dinas Kominfo DIY.

- Tempat-tempat wisata publik yang menjadi sasaran kunjungan masif. Disamping memberikan layanan kepada masyarakat, fasilitas WiFi ini akan meningkatkan kualitas destinasi wisata.
- Tempat-tempat yang menjadi pusat-pusat kegiatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) agar dapat mendukung pengembangan usaha. Menurut Rony, sampai Oktober 2021 sudah ada di 71 titik.
- Tempat-tempat yang merupakan ruang-ruang publik (*public spaces*) yang banyak dikunjungi, dijadikan tempat kegiatan sosial, dan tempat belajar masyarakat. Ini bukan hanya di perkotaan tetapi juga di daerah yang minus. Se jauh ini sudah tersedia di 51 lokasi.
- Tempat-tempat pendidikan formal khususnya SMA dan SMK, sejauh ini sudah ada di 118 titik.
- Pelayanan WiFi gratis ini dirancang mudah diakses oleh masyarakat, Untuk mendapatkannya, tinggal *log in* saja tanpa *password*. Rony Primanto menambahkan bahwa kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu hingga Alun-alun Selatan sudah sepenuhnya didukung oleh layanan WiFi gratis ini.

Digitalisasi Sistem Ekonomi

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus - Ekosistem Digital Jogja (KEK-ED Jogja) semakin sangat prospektif karena Pemerintah Daerah DIY sudah memiliki upaya untuk membangun ekonomi digital. Hal itu dibahas dalam *podcast* Rembag Kaistimewan Paniradya Kaistimewan pada 12 Agustus 2021 dengan tema “HUT UMKM ke-6 Go Digital, Go Global”.

Dalam *poscast* ini dibahas tentang program digital bertajuk “SiBakul” yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dalam rangka mewujudkan tatakelola data Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpadu, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah DIY membuat sebuah Sistem Informasi Pendataan dan Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha di wilayah Yogyakarta berbasis website bernama SiBakul Jogja. Laman web Sibakul.Jogja dapat diakses pada alamat: <https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id>

Sibakul Jogja saat ini memiliki keuntungan free ongkir saat minimal pembelian Rp.50.000 dalam radius 30 km. Syarat mendaftar program adalah (1) terdaftar di Si Bakul Jogja, (2) punya aplikasi Grab dan Geogle Maps, (3) memiliki stok barang harian, (4) produk makanan menyertakan tanggal pembuatan dan tanggal kadaluwarsa, (5) kemasan memenuhi standar.

Sistem digital SiBakul terus berkembang dan dipertajam kemampuan fungsinya. Berikut adalah

liputan harian jogja.com berjudul “Aplikasi SiBakul Jogja Tambah Fitur Layanan Data dan Informasi”. (18 Agustus 2021).

Aplikasi Pembinaan SiBakul Jogja Dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) DIY terus berinovasi menambah fitur-fitur layanan yakni penyediaan data UMKM sebagai bentuk layanan informasi bagi publik.

“Data di SiBakul Jogja tidak lagi terbatas untuk acuan dalam pembinaan koperasi dan UMKM DIY namun juga untuk pelayanan data bagi masyarakat umum dalam bentuk informasi yang bisa diakses publik,” jelas Kepala Diskop UKM Srie Nurkyatsiwi.

Fitur ini menyediakan sistem bagi data dalam bentuk pemberian akses maupun integrasi dengan aplikasi data yang dikembangkan Pemerintah selaku pembina koperasi dan UMKM. Mekanismenya, ada surat resmi permintaan data dari pemohon yang menunjukkan kebutuhan jenis data yang diminta, disertai dengan surat pernyataan agar data tidak disebarluaskan. “Misalnya suatu instansi membutuhkan data nama UMKM, jenis usaha, alamat usaha di Kota Yogyakarta, kepada instansi tersebut akan diberi akses sesuatu kebutuhan dalam jangka waktu tertentu,” kata Siwi.

Akses data ini dapat dilihat pada laman web <https://sibakuljogja.jogjaprovo.go.id>. Layanan pemberian akses ini bisa membuka peluang kolaborasi pembinaan koperasi dan UMKM antar multipihak dari sejumlah

pemangku kepentingan di DIY. Namun demikian keleluasaan dalam mendapatkan data ini masih dibatasi mengingat adanya informasi yang dikecualikan seperti NIK, NIB, dan sebagainya.

Menurut Siwi, penyediaan fitur informasi UMKM untuk publik ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini yaitu percepatan peningkatan perekonomian. Dengan integrasi data ini diharapkan pembinaan dari berbagai pihak pada UMKM tidak tumpang-tindih namun saling mendukung agar UMKM naik kelas.

Penyediaan fitur ini juga sekaligus menyokong aplikasi IDMC (*Integrated Development Management Center*) dan juga Jogja Center yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY. IDMC merupakan aplikasi pengintegrasian dari beberapa aplikasi yang sudah tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Aplikasi ini berfungsi sebagai *Decision Support System*. Data dan informasi di dalamnya akan digunakan untuk mempermudah pengambilan kebijakan di lingkungan Pemda DIY agar lebih cepat dan tepat. “Fitur baru kami ini seperti gayung bersambut, sehingga data koperasi dan UMKM DIY serta kegiatan-kegiatannya bisa diintegrasikan dengan IDMC maupun Jogja Center tersebut,” kata Siwi.

Aplikasi SiBakul Jogja tahun ini diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 dengan judul “Rajutan SiBakul” akronim dari “Cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Inovasi Dekstop UKM ini muncul

sebagai pemenang di Top 45 Inovasi pada halatan yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dengan menyingkirkan 1.500 inovasi lainnya.

Sistem digital Sibakul Jogja yang berprestasi di tingkat nasional terus menerus dikembangkan. Sekarang SiBakul Joga telah menjadi markethub sebagaimana diulas oleh jogja.com dengan judul V(20 Oktober 2021) sebagai berikut.

Sistem Infomasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Pemda DIY atau yang dikenal dengan SiBakul Jogja kini telah bertransformasi menjadi markethub seiring dengan adanya pandemi Covid-19. Kehadiran SiBakul Jogja Markethub ini merupakan bagian dari stimulus dari Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa memasarkan produknya dengan difasilitasi pemasarannya melalui daring.

“Bahkan UMKM yang produknya terbeli dibantu dengan keringanan bebas ongkos kirim (ongkir) yang biayanya ditanggung oleh Pemda DIY. Intinya SiBakul Jogja didisain sebagai media UMKM, membantu pemasaran produk-produk yang layak. Sehingga skema free ongkir adalah bentuk investasi Pemda DIY guna lebih membedakan UMKM, dalam rangka pemulihan ekonomi dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat DIY,” tutur Kepala Dinkop UKM DIY Srie Nurkyatsiwi.

Siwi menjelaskan bahwa SiBakul Jogja merupakan pusat data Koperasi dan UMKM DIY di mana seluruh kegiatan pembinaan Koperasi dan UMKM di wilayah DIY wajib berintegrasi dengan sistem data SiBakul Jogja. Upaya ini bertujuan agar dapat menjaga soliditas, keterbaruan, akurasi dan integritas data Koperasi dan UMKM yang sangat membantu memberi gambaran yang tepat postur kekuatan Koperasi dan UMKM di DIY sehingga dapat diarahkan secara tepat, efektif, dan berdampak.

“Sistem manajemen kegiatan pembinaan Koperasi dan UMKM di DIY ini diharapkan secara efektif mampu memandu Koperasi dan UMKM dalam menentukan langkah modernisasi cara pengelolaan dan memajukan lembaganya. Dengan demikian Koperasi dan UMKM betul-betul menjadi tulang punggung roda ekonomi yang tangguh, efektif, dan modern,” ujarnya.

SiBakul Jogja menghadirkan tatakelola UMKM modern berbasis data yang valid dalam memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan, integrasi aplikasi dan kolaborasi optimasi potensi Koperasi dan UMKM DIY. Secara garis besar UMKM yang ikut markethub bebas ongkir jumlahnya sudah 2.000 UMKM pada pertengahan 2021. Sementara UMKM yang sudah terdaftar lewat SiBakul Jogja sudah mencapai 300.000 UMKM.

“SiBakul Jogja sebenarnya sudah ada sejak 2019 lalu, namun pada saat diluncurkan masih dalam skema pendataan UMKM yaitu proses mendata dan membina

klaster UMKM. Sebab awalnya ratusan ribu UMKM belum berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan adanya SiBakul Jogja maka UMKM Jogja sudah berbasis NIK sehingga tiap NIK dapat diketahui jenis usahanya, punya sertifikasi atau tidak dan punya daya saing atau tidak,” papar Siwi.

Siwi menambahkan bahwa transaksi SiBakul Jogja Markethub mencapai 150 transaksi per hari pada tahun 2021. Sedangkan total ongkir yang digulirkan telah mencapai Rp. 1,5 miliar sejak awal 2020 sampai Agustus 2021. Stimulus ini memberikan dampak terhadap ekonomi yang digerakkan atau volume pembelian yang terjadi di UMKM sekitar Rp. 10,5 miliar atau hampir tujuh kali lipat ongkir yang digerakkan berdampak pada perputaran roda perekonomian daerah. Demikianlah sistem digital memacu perkembangan ekonomi di DIY.

“Layanan bebas ongkir SiBakul Jogja Markethub sudah menjajaki pasar ekspor luar negeri. Artinya komitmen SiBakul Jogja terhadap pemberdayaan UMKM yang tangguh sudah sangat serius. Kami sangat berharap SiBakul Jogja menjadi rumah bagi UMKM, tempat berkonsultasi terkait dengan tatakelola bisnis ke depannya sebagai wujud komitmen dan kesungguhan Pemda DIY,” pungkasnya.

Pemikiran-pemikiran dari Jogja

Sejak digulirkannya gagasan tentang Jogja Smart Province, banyak pemikiran-pemikiran tentang budaya digital lahir dari kalangan cendekiwan Yogya. Berikut ini dilampirkan empat artikel opini Haryadi Baskoro yang adalah salah seorang anggota Tim Perumus Masterplan Jogja Smart Province Dinas Kominfo Provinsi DIY, semuanya telah dimuat di Harian KOMPAS yaitu: “Kota Cerdas Berbasis Kebudayaan” (6 Agustus 2018), “Kota Cerdas Vs Manusia Cerdas” (25 Januari 2019), “Agenda Literasi Digital dalam Nawa Cita Jilid II” (4 Juni 2019), dan “Quo Vadis Gerakan Literasi Digital?” (27 Maret 2021).

“Kota Cerdas Berbasis Kebudayaan”

Kota-kota di nusantara dan di seluruh dunia telah berlomba-lomba mengelola perikehidupan urban secara cerdas. Apalagi setelah Kemenkominfo RI menggulirkan Gerakan Menuju 100 Smart City, tak kurang dari 50 wali kota dan bupati menyatakan dukungan,

Dalam pembangunan *smart city*, Menkominfo RI Rudiantara menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk melayani masyarakat. Menurutnya, kita harus mendefinisikan dulu manfaat-manfaat apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat dan baru mencari teknologi informasi yang relevan. Gerakan *smart city* di satu sisi mendorong kota-kota menyelesaikan berbagai persoalan urban secara

cerdas dan di sisi lain memajukan potensi daerahnya secara cerdas pula.

Pengelolaan komunitas cerdas (*smart city, smart regency, smart province*) yang telah menjadi tren sejak 2000-an terbukti berhasil memajukan kualitas kehidupan masyarakat. Riset McKinsey Global Institute (MGI) misalnya, menunjukkan bahwa sistem *smart city* terbukti menjadi solusi digital (*digital solution*) efektif di berbagai kota di seluruh dunia. Sistem *smart city* terbukti berdampak, misalnya mengurangi insiden kriminalitas hingga 30-40 persen, mengurangi pemborosan waktu dalam sistem transportasi hingga 15-20 menit, mengurangi pemborosan pemakaian air hingga 25-28 liter per orang per hari.

Secara antropologis, *smart city* adalah sebuah kebudayaan. Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks sistem gagasan, sistem perilaku, dan benda-benda hasil karya manusia (budaya material) yang menjadi milik diri melalui proses belajar. Perilaku serba digital dalam *smart city* ditopang oleh budaya material berupa teknologi informasi dengan multi aplikasinya yang semakin canggih. Namun sejauh ini, sistem gagasan yang melandasi perilaku digital dan memotivasi penciptaan teknologi digital itu bersifat pragmatis. Alam pikir pragmatis menekankan pengutamakan kebermanfaatan segala sesuatu, yaitu kebergunaan secara praktis semata. Manusia pragmatis tak mau repot-repot memikirkan masalah-masalah kebenaran, sistem nilai, dan filsafat, apalagi hal-hal yang bersifat metafisis.

Pragmatisme dalam pembangunan *smart city* terlihat dari orientasinya untuk membuat hidup masyarakat semakin mudah, nyaman, senang, nikmat, sejahtera, dan bahagia. Jika pencapaian-pencapaian itu saja yang menjadi parameter keberhasilan, *smart city* hanya akan menjadikan kota berteknologi cerdas tetapi tidak berpenduduk cerdas. Sebab cerdas itu lebih dari sekedar fasih menggunakan *smartphone*. Semakin canggih (cerdas) IT yang diciptakan, penggunaanya justru semakin tidak perlu mengurus otak karena beragam surplus kemudahan teknis yang diberikan.

Mari kita renungkan ulang. Salah satu aplikasi *smart city* mungkin akan sangat memudahkan penduduk sehingga tidak perlu pusing dan repot saat mengurus urusan-urusan kependudukan. Semua proses rumit berjenjang cukup dilakukan melalui *smartphone* dalam genggaman tangan kita. Lantas, apakah hal itu membuat penduduk lebih cerdas? Dulu, kita harus mencari Pak RT. Pak RW, lalu antre di kelurahan, berdialog dengan Pak Lurah, dan melewati beragam interaksi sosial lainnya saat mengurus ini dan itu. Bukankah hal itu justru membuat kita punya kecerdasan sosial (*social intelligence*)? Bukankah hal itu melatih kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan adversity (AQ) kita? Digitalisasi bukan hanya disruptif bagi sistem pekerjaan yang dulu melibatkan aktivitas banyak orang, tetapi juga mengganggu proses belajar masyarakat untuk memiliki kecerdasan interpersonal dan intrapersonal.

Faktanya, kehadiran teknologi cerdas terkadang justru membuat manusia berpikir dan berperilaku tak cerdas. Dulu pada awal-awal teknologi internet diciptakan, umat manusia memanfaatkannya untuk membangun interaksi sosial yang relatif positif. Sekarang manakala teknologi media digital begitu canggih, medsos dan media online justru menyuburkan hoaks, ujaran kebencian, *cyber bullying*, *cyber radicalism*, dan *cyber terrorism*. Dulu internet membangun interaksi di dalam keberagaman. Sekarang internet jadi alat eksklusi sosial dan sarana provokasi konflik sosial.

Manusia ternyata lebih bodoh dari laba-laba, sebab tak pernah ada laba-laba membuat jaring namun terjatuh dalam jaringnya sendiri. Adapun manusia menciptakan jejaring budaya yang disebut Clifford Geertz sebagai jejaring makna (*web of significance*) yang jadi bumerang karena menghegemoni dirinya.

Karena itu para peneliti budaya mengembangkan istilah “peradaban” (*civilization*). Arnold Toynbee (1965) mendefinisikan peradaban sebagai kebudayaan yang memiliki dimensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Kita membutuhkan kota-kota berperadaban tinggi yang canggih dalam teknologi informasi namun penduduknya berbudaya luhur. Adapun pragmatisme yang berorientasi pada kenikmatan hidup pada waktunya akan memerosotkan kualitas kebudayaan kita di tengah kemajuan iptek.

Supaya *smart city* berbasis kebudayaan, sejarawan UGM Joko Suryo mengingatkan pepatah lama “*man behind the gun*”. Teknologi informasi adalah alat, senjata, budaya materi yang harus dikendalikan oleh manusia. Hanya manusia berbudaya luhurlah yang alam pikirnya diliputi gagasan-gagasan mulia – sistem nilai, filosofi, ideologi – yang arif dalam menciptakan, memilih, dan menggunakan senjata itu dengan baik. Senjata yang sederhana sekalipun, jika berada di tangan penjahat akan menjadi pemicu petaka yang besar. Apalagi, senjata canggih yang bernama teknologi digital itu.

Pembangunan *smart city* semestinya sejak awal memposisikan kebudayaan sebagai panglima dan teknologi sebagai alat. Kebudayaan membuat kita cerdas dalam mencipta, memilih, dan menggunakan teknologi digital yang tidak sekedar memberi kenikmatan publik (pragmatis) namun mencerdaskan (kultural) masyarakat/bangsa.

Sebagai contoh, dengan bantuan aplikasi digital seperti yang tengah marak sekarang ini, kita dengan mudah menemukan arah dan lokasi. Di kota Yogya misalnya, aplikasi memudahkan kita menemukan Jalan Malioboro yang berlokasi di pusat kota. Tetapi, *smart city* berbasis kebudayaan semestinya bukan hanya memberi kemudahan navigasi, tetapi juga memberi petunjuk yang lebih mencerdaskan lagi. Sebab, nama Jalan Malioboro adalah bagian integral tata kota “sumbu filosofi” Yogya yang mengandung pesan moral

yang sudah diapresiasi oleh UNESCO. Malioboro bukan hanya nama jalan tetapi nama ajaran supaya manusia membuang kejahatan “*ma lima*” yaitu *madat* (mencandu narkoba), *madon* (seks bebas), *main* (berjudi), *minum* (kemabukan), dan *maling* (mencuri, korupsi). Turis asing pun akan tertarik jika mendapat informasi kultural edukatif seperti itu, sebab mereka tak berkunjung sekedar mencari kemudahan.

Pembangunan *smart city* berbasis kebudayaan semestinya bercirikan edukasi. Negara tidak hanya bertugas mensejahterakan tetapi juga mencerdaskan bangsa. Jika sejahtera berarti hidup mudah dan nyaman maka cerdas berarti terus meningkatnya kompetensi berpikir kritis, progresif, dan transformatif. Teknologi digital memberi banyak alternatif inovasi kreatif untuk mengembangkan pendidikan kultural bagi masyarakat.

Dengan demikian *smart city* membuka jalan untuk revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dan mengajarkannya secara kreatif-atraktif kepada generasi masa kini. Untuk itu aplikasi *e-learning* perlu diintegrasikan bahkan menjadi basis dalam sistem *smart city*. Sistem *smart city* yang berfokus pada pencerdasan justeru akan mengakselerasi revolusi pendidikan yang progresif dan transformatif. Melalui *e-learning* masyarakat menjadi pembelajar aktif, bisa meneliti sendiri, mempelajari materi lewat *website*, bahkan mengakses langsung para ekspert yang ada di kotanya. Materi pelajaran yang diperoleh selalu di-

update dan di-*upgrade*. Dalam edukasi era “4.0”, pembelajar adalah konektor, kreator, dan konstruktor dalam proses belajar-mengajar. Murid berpeluang menjadi pencipta dan pembagi informasi (*learner as content producer and sharer*). Masyarakat jadi cerdas dan bisa mencerdaskan orang lain (*learner as teacher*).

Jika tidak berbasis kebudayaan, pembangunan *smart city* di Indonesia hanya akan mengantarkan kota-kota menjadi pusat-pusat modernitas global. Digitalisasi malahan berpotensi melemahkan dan menyalahkan keaslian dan keunggulan kebudayaan kita sendiri. Sitem *smart city* berbasis kebudayaan bukan hanya mencerdaskan penduduk urban tapi mentransformasi kota-kota kita menjadi pusat-pusat peradaban yang melalui teknologi informasi mampu berdampak global.

“Kota Cerdas Vs Manusia Cerdas”

Penghargaan *KOMPAS* kepada kota-kota cerdas di seluruh Indonesia disertai pesan penting: bahwa manusia harus tetap menjadi pusat pembangunan (*Kompas*, 14/1/2019).

Penekanan pada aspek manusia itu terlihat dari indikator penilaian dalam Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018 yang diajukan Kompas mengacu pada model lingkaran kota cerdas menurut pegiat kota cerdas internasional Boyd Cohen. Dimensi masyarakat cerdas (*smart people*) diberi bobot paling tinggi (29 persen). Persentase dimensi lainnya adalah 20 persen

untuk kualitas hidup (*smart living*), 16 persen untuk lingkungan (*smart environment*), 12 persen untuk pemerintahan (*smart government*), 12 persen untuk ekonomi (*smart economy*), dan 11 persen untuk mobilitas (*smart mobility*).

Penekanan pada aspek manusia sangat penting oleh sebab kecerdasan sebuah kota terletak pada kecerdasan masyarakat atau penduduknya. Penggunaan teknologi informasi supercerdas tidak otomatis menjadikan para penggunanya juga cerdas. Manusia adalah subyek dan bukan obyek dari setiap dimensi kota cerdas itu.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Indra Yasmine juga menekankan bahwa roh kota cerdas bukan pada seberapa gampang dan masifnya koneksi internet, penerapan berbagai aplikasi, dan aneka platform berbasis digital (*Kompas*, 14/1/2019). Kota cerdas adalah kota yang berhasil membangun kebersamaan komunitas secara cerdas.

Rumusan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Artinya, sejak awal bangsa Indonesia sebagai entitas manusia setanah-air itu diposisikan sebagai subyek. Pembangunan, termasuk pembangunan berbasis teknologi digital, adalah dalam rangka memajukan bangsa.

Jika konsisten dengan tujuan mencerdaskan bangsa, entitas-entitas bangsa yang lebih kecil, seperti kota, perlu dibangun sebagai komunitas manusia (masyarakat perkotaan) yang cerdas. Manusia cerdas dibedakan dengan teknologi cerdas, dalam hal manusia adalah pencipta dan pengguna (subyek) teknologi dan bukan sebaliknya.

Adapun konsep kota cerdas (*smart city*) yang sekarang mengglobal cenderung dimaknai sebagai penekanan pada maksimalisasi dan intensifikasi penggunaan teknologi informasi untuk memecahkan masalah-masalah di perkotaan. Itulah sebabnya, pemerintah-pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) berlomba-lomba membangun digitalisasi demi meraih predikat cerdas itu.

Karut marut di media sosial – mulai dari hoaks, ujaran kebencian, *cyber bullying*, *cyber radicalism* – semestinya membuat kita bertanya kembali tentang makna cerdas itu sendiri. Peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai telah terjadi perubahan yang bersifat degeneratif dalam media digital (*Kompas*, 15/4/2017). Media sosial (medsos) yang dulu jadi media perekat sosial kini cenderung menjadi alat eksklusi sosial yang hegemonik dalam dunia maya dan dunia nyata. Gerakan radikal dan anarkis dikembangkan dari isu-isu artifisial yang direkayasa di dunia maya. Media sosial direkayasa menjadi alat penyugesti gerakan-gerakan radikal, karena itu harus dibedakan antara *smart city* dan *smart citizen* – warga (negara) cerdas.

Konsep baru kota cerdas jangan mengabaikan sekian banyak teori dan konsep kecerdasan manusia yang telah kita pelajari sekian lama. Ambil contoh yang paling simpel. Kalau telepon pintar hanya membuat kita jadi sibuk sendiri dengan gawai tersebut (*phubbing*), bukankah kita telah kehilangan kecerdasan sosial (*social intelligence*)? Kalau medsos dipakai untuk menyebarkan pornografi dan radikalisme SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), bukankah kita telah kehilangan kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual? Kalau medsos membuat kita berperilaku narsis dan tanpa berpikir panjang menyebarkan kabar bohong, bukankah kita telah kehilangan kecerdasan intrapersonal (*intrapersonal intelligence*)? Jika kota cerdas berorientasi pada semata-mata kemudahan dan kenyamanan masyarakat berbasis digital, bukankah itu sekadar menciptakan manusia-manusia pragmatis?

Keprihatinan akan degenerasi dalam media digital itu telah meresahkan kaum budayawan di Yogyakarta (DIY). Apalago Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY 2017-2022 mengangkat visi “memuliakan martabat manusia Jogja”. Seruan kaum budayawan tentang pengutamaan tentang pembangunan manusia berbudaya telah mendorong tim ahli dan tim perumus rencana induk Jogja Smart Province (JSP) memodifikasi model lingkaran kota cerdas dengan menaruh sistem nilai filosofi budaya (kearifan lokal) di pusat lingkaran itu.

Bagan lingkaran provinsi cerdas dalam rencana induk JSP yang diresmikan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X pada Agustus 2018 itu menjadikan tiga nilai filosofi Yogyakarta pada bagian sentral. Pertama, filosofi *hamemayu hayuning bawana* yang bermakna kultural bagi setiap insan untuk memperindah kehidupan dunia. Kedua, filosofi *sangkan paraning dumadi* yang bermakna keutamaan membangun sumber daya manusia yang berkepribadian, berkarakter, intelek, dan spiritual (multikompetensi holistik). Ketiga, filosofi *manunggaling kawula lan gusti* yaitu keutamaan kesatuan pemimpin dan rakyat dalam demokrasi gotong-royong dan kepemimpinan “tahta untuk rakyat”.

Bagan atau model lingkaran provinsi cerdas ala Yogyakarta inilah yang dipromosikan sebagai pembangunan kawasan (kota, kabupaten, provinsi) cerdas berbasis budaya. Pembangunan manusia bermartabat menjadi fokus dan sentralnya. Kemajuan multikecerdasan manusia menjadi tujuan utama digitalisasi.

Kecuali itu, rencana induk JSP juga unik dalam pengembangan dimensi-dimensinya. Disamping punya dimensi-dimensi yang sudah umum seperti *smart government*, *smart living*, *smart society* dan *smart environment*, JSP punya tambahan satu dimensi lagi yaitu *smart culture* (budaya cerdas). Dimensi itu mencakup solusi-solusi indikatif digital untuk memajukan kualitas hidup sumber daya manusia

Yogyakarta yang bermartabat, berkearifan lokal, berbhinnekatunggalika, ber-Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam UU Keistimewaan DIY (UU Nomor 13 Tahun 2012).

Dimensi budaya cerdas rupanya memberi ruang aksi dan aktualisasi bagi masyarakat Yogyakarta. Pada 11 Januari 2019, segenap elemen masyarakat meluncurkan ensiklopedia digital jogjapedia, difasilitasi Dinas Kominfo DIY. Ensiklopedia digital itu merupakan upaya membangun wahana kohesi sosial dan edukasi kolektif. Sistem informasi digital ini memberikan kesempatan kepada semua pihak, kelompok kepentingan, lembaga lintas disiplin ilmu dan lintas budaya untuk saling berbagi informasi dan ilmu.

Dalam konteks revolusi pendidikan 4.0, ensiklopedia digital yang bersifat *open content* ini memungkinkan masyarakat luas sebagai jejaring pembelajar menjadi kreator materi pembelajaran (*learners as content producer and sharer*). Dengan demikian semua pembelajar cepat bertumbuh tidak hanya dalam belajar tetapi juga dalam mengajar (*learner as teacher*).

Manusia cerdas di dalam kota cerdas bukan sekedar penikmat kemudahan dan kenyamanan hidup berbasis digital. Manusia disebut cerdas jika mampu menciptakan, mengendalikan, serta menggunakan teknologi digital untuk sebesar-besar kemajuan multikecerdasan dirinya. Dengan demikian kemajuan multikecerdasan warga (*smart citizen*) menjadi parameter keberhasilan pembangunan kota cerdas.

“Agenda Literasi Digital dalam Nawa Cita Jilid II”

Pemblokiran sementara sebagian fitur aplikasi *chatting* untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan 22 Mei 2019 efektif membendung hoaks dan provokasi.

Pemerintah menegaskan bahwa pemblokiran itu bukan tindakan sewenang-wenang. Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa tindakan itu terpaksa diambil demi mengamankan negeri. Menkominfo Rudiantara lebih memakai istilah pembatasan akses yang bersifat sementara dan bertahap atas platform media sosial dan sebagian fitur-fiturnya itu, dilakukan dalam rangka menghindari penyebaran hoaks dan provokasi. Menurut Rudiantara, modus penyebaran kabar bohong itu berawal dari tangkapan layar di medsos yang lalu disebar dan menjadi viral di aplikasi perpesanan *What's App* (WA).

Di satu sisi, pemerintah tampak terlalu sensitif dengan penyebaran informasi publik, yang digeneralisirnya sebagai rawan ancaman hoaks. Lalu pemerintah mengendalikan distribusi informasi dengan memposisikan media-media mainstream sebagai produsen utama konten-konten positif. Hal itu mirip situasi menjelang lengsernya Soeharto di mana media-media mainstream pro-pemerintah diarahkan (dikendalikan) untuk hanya menyiarkan dan menayangkan konten-konten positif.

Namun di sisi lain, seperti juga diamanatkan oleh UU ITE, pemerintah wajib melindungi masyarakat dan berkewenangan melakukan pembatasan-pembatasan informasi. Apalagi mulai terkuak adanya antek-antek

pihak asing yang memancing di air keruh dalam rangka mendestruksi bangsa dan negara. Diperlukan politik digital koversif-antisipatif, daripada kecolongan bencana sosial yang lebih besar.

Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (2014-2019), literasi digital telah mendapat perhatian khusus. Pendekatannya lebih bersifat kultural edukatif, berupa gerakan mengatasi gejala degenerasi fungsi media digital – hoaks, ujaran kebencian, *cyber bullying*, *cyber radicalism* dan pornografi. Menurut Wasisto Jati (*Kompas*, 15/4/2017), media sosial dan media daring telah merosot hingga menjadi alat eksklusi sosial hegemonik baik di dunia maya maupun dunia nyata. Medsos disalahgunakan untuk mengelola isu politis dengan mensugesti kaum radikal, memicu gerakan sosial artifisial yang hegemonik.

Kemenkominfo sejak akhir 2017 kemudian menginisiasi gerakan yang lebih masif dengan tajuk Gerakan Nasional Literasi Digital “Siberkreasi”. Mengacu pada konsep UNESCO, gerakan ini bersifat gerakan edukatif, didiskripsikan sebagai “upaya penyebaran pengetahuan dan etika digital secara masif dan luas dalam format populer dan menarik” (Profil GNLD Siberkreasi, 2018).

Gerakan literasi digital bersifat kultural edukatif ini berkembang pesat. Kiprahnya mendapatkan penghargaan sebagai “Indonesia Brand of Endorsement of the Year 2018” dan penghargaan sebagai Champion dalam WSIS Prizes 2018 oleh International Telecommunication Union (ITU) PBB.

Namun ternyata, kejahatan hoaks semakin menjadi-jadi. Bukan lagi sekedar penyimpangan sosial (*social delinquency*) dan epidemi penyakit sosial. Hoaks sudah menjadi rezim kejahatan global yang didukung oleh jejaring penguasa hoaks yang bergerak sangat sistematis dengan dukungan dana dan infrastruktur sangat kuat. Indonesia dan bangsa-bangsa sedang dijajah oleh kolonialisme hoaks. Artikel di *Kompas* (28/3/2019) berjudul "Perlu Total Mengatasi Hoaks" mengisyaratkan bahwa kejahatan dan penjajahan oleh para penjahat hoaks tidak cukup hanya dilawan dengan edukasi namun dengan perlawanan yang lebih taktis.

Kemenangan melalui Pilpres 2019 membuka jalan bagi rezim Jokowi untuk melanjutkan Nawa Citanya di periode kedua kepemimpinannya (2019-2024). Seperti telah ditegaskan ketika berbagi visi-misi saat kampanye, Nawa Cita jilid II nantinya akan lebih menekankan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Ancaman kejahatan digital dan kemerosotan budaya digital seyogyanya menjadikan literasi digital sebagai salah satu agenda utama dalam Nawa Cita jilid II. Menurut penulis, agenda literasi digital berbasis pembangunan SDM yang relevan untuk lima tahun ke depan harus koheren dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam preambule UUD 1945.

Pertama, literasi digital perlu diagendakan dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan digital menjadi penting sebab telah nyata bahwa kejahatan digital masa kini sudah mengarah pada perang siber yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara.

Namun upaya perlindungan itu jangan dimaknai sedangkal tindakan pemblokiran atau pembatasan media sehingga masyarakat mengalami penundaan informasi. Soal menunda untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tentang realitas, seperti dikatakan Edmund Husserl, adalah soal kompetensi fenomenologis individu pembelajar. Kompetensi berpikir cerdas dan kritis seperti itulah yang melindungi masyarakat dari hoaks - tidak mudah percaya, tidak mudah berteori, selalu meneliti, cek dan ricek, menyaring sebelum *sharing*. Yang perlu adalah mencerdaskan pola pikir masyarakatnya, bukan mengkebiri teknologinya yang cerdas.

Upaya perlindungan digital juga berimplikasi pada pengembangan konsep kedaulatan digital. Paradigma Wawasan Nusantara yang sudah ada perlu dikolaborasi dengan konsep kekinian tentang kedaulatan digital tersebut.

Kedua, literasi digital perlu diagendakan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini kita merespon revolusi industri 4.0 dengan semangat gotong-royong (kewirausahaan sosial) sebagaimana

telah ditegaskan dalam Nawa Cita jilid I. Pemerintah perlu menambah keberpihakan kepada segenap elemen masyarakat dan juga generasi muda untuk mewujudkan kemakmuran berbasis digital. Termasuk pembangunan kota-kota cerdas (*smart cities*) diseluruh nusantara, yang telah dicanangkan pada periode pertama pemerintahan Jokowi, dilanjutkan dengan berorientasi pada keadilan dan pemerataan kemakmuran yang lebih terukur

Ketiga, literasi digital perlu diagendakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Teknologi digital menjadi landasan bagi tumbuhnya paradigma baru pendidikan cerdas (*heutagogis*). Berbeda dengan pedagogi dan andragogi, *heutagogi* berbasis digital memungkinkan semua pembelajar menjadi pengajar (*learners as teachers*) sebab semua pembelajar berpeluang memproduksi dan membagikan konten pengetahuan (*learners as content producer and sharer*).

Dalam paradigma *heutagogis*, kebenaran tidak bisa dihegemoni namun juga tidak dinihilkan seperti dalam provokasi aliran *post truth*. Kebenaran harus terus didiskusikan dengan perdebatan argumentatif dan akademis. Pemerintah sebagai pengelola informasi harus sangat transparan dan akuntabel, terbuka dalam berdialog. Semua pihak berhak bersuara kritis dengan cerdas, bukan dengan modus hoaks.

“Quo Vadis Gerakan Literasi Digital?”

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) akan naik kelas jika berfokus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada Oktober 2017, Kemenkominfo RI yang waktu itu dipimpin Rudiantara bersama multistakeholder meluncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) “Siberkreasi”. Menurut buku profilnya, GNLD didisain dengan *roadmap* periode 2017-2020. Gerakan ini cepat direspon dan didukung sehingga dalam setahun saja sudah ada 75 institusi menjadi mitra gerakan. Pengakuan internasional pun datang, sebagai Champion pada WSIS Prizes – PBB pada Maret 2018 di Jenewa.

Di satu sisi, GNLD didisain untuk percepatan pembangunan digital. Sebagai upaya literasi berskala nasional, kegiatan-kegiatannya mencakup *curriculum development, collaborative engagement, community empowerment, dan cyber governance*. Kemenkominfo saat itu juga mensinergikan gerakan ini dengan proyek-proyek percepatan pembangunan kota-kota cerdas (*smart cities*) dalam rangka merespon revolusi industri 4.0 yang bergulir cepat di Indonesia.

Di sisi lain, GNLD nampak didisain untuk memperkuat dan menstabilkan kekuasaan pemerintah Presiden Joko Widodo. Hal itu terjadi karena karut marutnya jagat digital dan juga gencarnya serangan siber: hoaks, *fake news*, ujaran kebencian, perundung-

an, *cyber radicalism*, *cyber terrorism*, dan sebagainya. Sebetulnya pemerintah cukup kreatif, serangan siber tidak dilawan dengan serangan siber, tetapi dilawan dengan kreativitas sehingga GNLD diberi nama “Siberkreasi”.

Serangan siber dilawan dengan “Siberkreasi”, itu seperti etika melawan kejahatan dengan kebaikan. Di masa-masa itu Presiden Jokowi juga pernah mengumandangkan ungkapan “*surodiro jayaningrat, lebur dening pangastuti*”. Artinya, semua kekuatan manusia yang destruktif (arogansi, angkara murka, kelicikan, kejahatan, pengrusakan) harus dikalahkan oleh kebijaksanaan, kasih sayang, dan kebaikan yang konstruktif.

Meskipun dicitrakan sebagai gerakan etis, GNLD dan kolaborasinya pada dasarnya merupakan upaya melakukan serangan balik. Hal itu terlihat dari isu-isu yang digulirkan seperti konten negatif versus konten positif, radikalisme versus deradikalisme, dan hoaks versus konten kreatif. Yang terjadi tetaplah perang siber antar para pemengaruh (*influencer*) dan akhirnya perang siber antar para pendengung (*buzzer*). Pemerintah, bertolak dari logika GNLD yang dikalim serba positif itu, jadi punya alasan untuk mengerahkan para pemengaruh untuk memberi pengaruh positif, dan mungkin juga para pendengung untuk mendengungkan hal positif.

Menurut buku profilnya yang lama, *roadmap* GNLD “Siberkreasi” direncanakan untuk periode 2017-2020. Di awal 2021, meskipun tidak menyerang langsung ke GNLD, mulailah muncul beberapa keberatan. Tak tanggung-tanggung, salah satu keluhan itu terlontar dari ekonom senior dan mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Seperti dilansir *tribunnews.com* (6/2/2021). Kwik berkomentar, “Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saya di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil.” Dalam akun *Twitter*-nya (Sabtu. 6/2/2021), Kwik menulis secara lugas, “Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh *Kompas*, Kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah”, tulis Kwik di akun *Twitter*nya (Sabtu, 6/2/2021).

Secara umum, gerakan-gerakan sosial (*social movement*) cenderung menurun (*decline*) setelah mencapai kesuksesan besar. Gerakan sosial biasa dimulai dari fase kemunculannya (*emerge*) yang inspiratif, lalu berkembang dalam sinergi dan kolaborasi (*coalasce*), dan keterlibatan aktif pemerintah (*bureaucratize*). Ketika kemudian bola gerakan beralih dari masyarakat (rakyat) ke pemerintah, di satu sisi akan cepat meraih sukses besar karena dukungan dan legitimasi. Namun di sisi lain berpotensi menurun (*decline*) karena kepentingan kekuasaan mulai mengedepan.

Perang antar pemengaruh dan antar pendengung itu sudah biasa di jagat digital. Meskipun demikian perlu kita hormati pernyataan Juru Bicara Presiden, Fadjoel Rochman yang menegaskan bahwa pemerintah tidak memakai pendengung (*buzzer*) untuk meredam dan melawan para pengkritik. Pemerintah hanya bekerjasama dengan para pemengaruh yang merupakan para KOL (*key opinion leader*) dalam sosialisasi program-program tertentu seperti promosi pariwisata dan kesehatan.

Namun pembelaan seperti itu tidak cukup dan sejatinya tidak perlu jika GNLD akan direvitalisasi. GNLD anak naik kelas jika ditingkatkan level target pencerdasannya. Dalam hal ini Jokowi sudah membuka kran pencerdasan tahap lanjut saat mendorong rakyat untuk mengkritik pemerintah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bahkan mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari media. Menurutnya kritik semacam itu ibarat jamu yang pahit namun menyehatkan.

GNLD pada dasarnya adalah gerakan pencerdasan yang sudah sejalan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (amanat Prerambul UUD 1945). GNLD “Siberkreasi” yang digawangi oleh tokoh-tokoh muda seperti Dedi Permadi, Donny BU, dan kawan-kawan milenial kreatif telah sukses besar dalam memberi pencerdasan digital tahap awal. Dalam taksonomi belajar Bloom (1964), tahap awal belajar

adalah penguasaan pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), dan penerapan (*application*). GNLD periode 2017-2020 telah menyadarkan supaya kita semakin menguasai teknologi digital, memahaminya, tidak menyalahgunakannya, dan memanfaatkannya untuk kebaikan dan kemajuan peradaban.

Adapun tahap lanjut dalam proses belajar menurut Bloom adalah berpikir analitis, sintesis, dan evaluatif. Di sinilah pemelajar dituntut untuk berpikir kritis, bisa dan berani berbeda pendapat, mendiskusikan titik temu, dan mengevaluasi pengetahuan untuk membarui teori. Pendidikan tidak bisa hanya bersifat mencekoki dan mendiktekan pengetahuan. Proses belajar-mengajar harus progresif-transformatif dalam hal mana pembelajar bebas berpikir, bersikap kritis, mandiri dalam belajar, tidak dikekang dan ditindas. Proses pencerdasan “*heutagogis*” inilah yang sebenarnya menjadi ruh dari revolusi industri 4.0. Sebab, teknologi digital memungkinkan semua pembelajar menjadi guru (*learner as teacher*) karena semua orang bisa memproduksi dan berbagi pengetahuan (*learner as content producer and sharer*).

Dalam proses belajar baru berbasis digital itu tetap diperlukan GNLD. Sebab, kemerdekaan belajar di era digital itu harus dikelola agar terarah, visioner, etis, dan konstruktif. Dalam hal ini, platform filosofis pemerintah Joko Widodo perlu dinaikkan juga dari “*surodiro*

jayingrat, lebur dening pangastuti” menjadi “*duphak bujang, esem bupati, sasmita narendra*”. Ini adalah filosofi budaya kritis yang meningkat. Istilah “*duphak bujang*” menunjuk pada cara mengkritik atau menegur keras, kasar, dan dengan hukuman fisik (*duphak*) karena yang disasar adalah orang yang tidak berpendidikan (*bujang, kuli*). Inilah yang terjadi sekarang, kritik bernuansa ujaran kebencian, perundungan, caci maki, umpatan, dan angkara murka. Kaum *buzzer* adalah para pelaku budaya kritik level *duphak bujang* seperti itu.

Ketika masyarakat dan pemerintah lebih intelek, budaya kritiknya *esem bupati* (senyum sang bupati). Mengkritik tak harus anarkis namun santun, menyenangkan, simbolik termasuk dengan berkesenian. Tetapi mekanisme kritik *esem bupati* ini baru berjalan jika sang bupati (pejabat, pemimpin, pemerintah) peka terhadap kritik. Jadi kalau sekarang rakyat sering men-*duphak* penguasa, mungkin hal itu terjadi karena rakyat sudah berulang kali memberi *esem* tetapi para *bupati* tidak peduli.

Di level pemimpin tinggi seperti raja (*narendra*), budaya kritiknya adalah “*sasmita*”. Ini berbicara tentang kecerdasan intrapersonal (*interpersonal intelligence*), yaitu pemimpin yang selalu introspektif, mawas diri, dan selalu mengevaluasi diri sehingga belum sampai dikritik sudah sadar, paham, dan berubah. Pemimpin harus bisa “*seprapat tamat*”,

meskipun masukan berupa kritik baru diterimanya 25 persen (*seprapat*) saja, ia sudah langsung tamat memahaminya dan bertindak memperbaiki diri. Dalam konteks kekinian hal itu berbicara tentang evaluasi diri berbasis riset.

Sayangnya, kekuatan digital sering hanya dipakai oleh penguasa atau kandidat penguasa untuk menyelidiki elektabilitasnya, serta menghitung peluang, dan ancaman terhadap keberlanjutan kekuasaannya. GNLD harus dinaikkan kelasnya menjadi gerakan pencerdasan supaya masyarakat (rakyat) semakin kritis dan pemerintah semakin giat melakukan otokritik.

Bab 9

Inovasi Keistimewaan DIY

Keistimewaan DIY bukan hanya melestarikan kebudayaan peninggalan sejarah masa silam tetapi juga pengembangan kebudayaan di masa depan. Karena itulah, maka inovasi-inovasi teknologi yang lahir di Yogyakarta mendapat tempat dalam Keistimewaan DIY. Apalagi dinamika pembangunan daerah masa kini sangat menuntut adanya inovasi pembangunan.

Inovasi teknologi yang didedikasikan untuk mendukung Keistimewaan DIY. Inovasi teknologi ini harus dikembangkan berlandaskan nilai-nilai dan filosofi ke-Yogya-an. Diperlukan kurasi yang ketat untuk memvalidasi apakah suatu inovasi layak didedikasikan bagi peradaban Keistimewaan DIY.

Keistimewaan DIY mendukung pengembangan inovasi teknologi karena (1) kebudayaan di dalam Keistimewaan DIY ditekankan sebagai proses belajar yang berkelanjutan, (2) kebudayaan di dalam Keistimewaan DIY didefinisikan luas mencakup pengetahuan dan teknologi, (3) pembangunan kebudayaan di dalam Keistimewaan DIY bukan hanya mencakup pemeliharaan budaya tradisional tetapi juga pengembangannya, (4) pembangunan kebudayaan di dalam Keistimewaan DIY memberikan peluang untuk melakukan “rekayasa” secara inovatif dan kreatif, (5) tujuan pengaturan Keistimewaan DIY adalah untuk memajukan kesejahteraan dan ketenteraman

masyarakat, (6) pembangunan kebudayaan dalam Keistimewaan DIY mendorong tumbuhnya kearifan lokal terhadap alam.

Keistimewaan DIY mendukung pengembangan inovasi teknologi karena kebudayaan di dalam Keistimewaan DIY didefinisikan luas mencakup pengetahuan dan teknologi, Menurut Pasal 5 ayat (1) Perdas No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, Obyek Kebudayaan itu meliputi (1) nilai-nilai budaya, (2) pengetahuan dan teknologi, (3) bahasa, (4) adat istiadat, (5) tradisi luhur, (6) benda, (7) seni. Pada Pasal 5 ayat ((2) ditulis bahwa obyek-obyek kebudayaan itu bersumber pada dari Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat di Yogyakarta.

Yang jelas teknologi mendapat tempat di dalam Keistimewaan DIY. Hal itu menjadi peluang bagi inovasi teknologi kekinian yang dikembangkan dengan tetap memelihara nilai-nilai asli kebudayaan Yogyakarta, Tentu tidak semua inovasi teknologi modern terkait dengan Keistimewaan DIY. Yang perlu dikembangkan adalah inovasi teknologi yang berbasis Keistimewaan DIY dan yang berkontribusi untuk Keistimewaan DIY.

Keistimewaaan untuk Kesejahteraan

Keistimewaan DIY mendukung pengembangan inovasi teknologi karena tujuan pengaturan Keistimewaan DIY adalah untuk memajukan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.

Dalam Pasal 5 UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dijelaskan bahwa pengaturan Keistimewaan DIY dilakukan untuk 5 tujuan khusus. Pada pasal ini juga dijelaskan garis-garis besar cara mewujudkan tujuan-tujuan itu.

Tabel
Tujuan Keistimewaan DIY dan Cara-cara
Mewujudkannya

No	Tujuan	Tujuan diwujudkan melalui:
1	Mewujudkan pemerintahan yang demokratis	pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur; pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum; pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD DIY; mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY; dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
2	Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat	kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.

3	Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan social yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah DIY; pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah DIY dan masyarakat DIY.
4	Menciptakan pemerintahan yang baik	pelaksanaan prinsip efektivitas; transparansi; akuntabilitas; partisipasi; kesetaraan; penegakan hukum
5	melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.	pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Dari tabel di atas, jelas bahwa tujuan kedua dari pengaturan Keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Cara

mewujudkannya adalah dengan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.

Pengembangan kebudayaan dalam Keistimewaan DIY harus berorientasi pada tujuan itu dan dilakukan dengan cara tersebut. Inovasi teknologi misalnya, jika dalam rangka memajukan Keistimewaan DIY maka harus bertujuan mensejahterakan masyarakat. Cara memajukan inovasi itu juga harus dengan mengembangkan kemampuan masyarakat. Artinya masyarakat bukan hanya menjadi pengguna dan penerima manfaat inovasi teknologi itu, tetapi juga menjadi inovatornya.

Salah satu inovasi teknologi yang setelah Tim Penulis konsultasikan dengan beberapa pakar, adalah inovasi teknologi Rumah Ajisaka RISBA sebagai berikut.

Gambaran Umum Inovasi Teknologi

Rumah Ajisaka RISBA

Dasar Hukum

Sesuai Amanat Konstitusi, tujuan NKRI alenia keempat adalah “..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Urgensi

1. Penyusunan dokumen perencanaan (RPJMN, RKP, Renstra KL, RPJMD, RKPD dan Renstra OPD) harus memperhitungkan pencegahan korban dan kematian, dan pencegahan kerugian ekonomi sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
2. Berdasarkan angka kematian dan kerugian ekonomi, dokumen perencanaan harus memperhitungkan literasi, pendidikan kebencanaan; pengembangan budaya sadar bencana; penerapan standar bangunan, jalur evakuasi, tempat penampungan pengungsi; penguatan layanan dasar dan peningkatan standar mutu kesehatan; penyediaan perumahan, air bersih dan sanitasi sebagai landasan pemulihan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi yang aman, lebih baik dan berkelanjutan;
3. Dalam merumuskan perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana, salah satu persyaratan adalah pengembangan dan penguatan manajemen pengetahuan kebencanaan;
4. Kunci keberhasilan manajemen pengetahuan kebencanaan adalah kemitraan dan kolaborasi yang solid dengan pendekatan pentahelix antara pemerintah (Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pusat) bersama pelaku usaha, perguruan tinggi termasuk lembaga riset dan pengembangan; organisasi masyarakat, dan media; serta dukungan pendanaan terintegrasi.

Ajisaka RISBA, Teknologi Rumah Tahan Gempa & Tsunami

Rumah Ajisaka RISBA (Rumah Instan Struktur Baja) merupakan gagasan yang muncul dari pemikiran Dr. Ashar Saputra, yang kemudian diujicobakan dan disempurnakan dengan masukan dari Tim Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ajisaka RISBA dibuat agar masyarakat terdampak gempa dan tsunami dapat segera membangun dan menempati kembali rumahnya. Dengan banyaknya jumlah rumah rusak akibat bencana, maka diperlukan teknologi pembangunan rumah yang tahan gempa dan tsunami, awet, dan bisa cepat dibangun.

Kementrian PUPR melalui surat keterangan Kepala Harian Satgas Pelaksana Penanggulangan Gempa Lombok No: UM.03.04/SATGASLAK/LB/078/2018, menerangkan bahwa Rumah Instan Baja (RISBA) memenuhi kriteria rumah tahan gempa dan dapat diterapkan dalam rangka pembangunan kembali perumahan rakyat yang terdampak gempa di suatu daerah. Surat keterangan ini tentu sudah menyiapkan dokumen perhitungan struktur untuk menahan beban normal, beban angin, dan beban gempa. Selain itu, RISBA juga memberikan informasi tentang mutu bahan baja yang akan digunakan disertai dengan hasil uji laboratoriumnya. RISBA pada perkembangannya diharapkan menjawab kebutuhan pembangunan rumah, bangunan dan pencakar langit tahan gempa dan tsunami di Indonesia.

RISBA memiliki berbagai keunggulan. Bahan untuk membangun RISBA mudah dijumpai di toko bahan bangunan. Materialnya menggunakan bahan-bahan hasil produksi industri masal yang sudah umum dijumpai. Dengan bahan yang sudah memenuhi standar SNI, maka kualitas bahan bisa lebih terjamin dan bisa relatif seragam. Selain itu, penggunaan struktur baja memiliki sifat yang liat, tidak mudah patah putus. Filosofi kinerja strukturnya adalah sambungan pada kondisi elastis harus memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan kapasitas penampang balok dan kolom dalam kondisi plastis.

Untuk perakitan dan penyambungan menggunakan cara pengelasan yang cukup sederhana, sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Struktur baja bisa awet dengan cara diberi lapisan anti karat yang dilakukan diawal proses pembangunan, dengan cara pelapisan yang mudah dan cepat. Karena metode pembangunannya sederhana, maka RISBA bisa dibangun dengan cepat. Struktur bangunan dari baja yang ringan, akan menurunkan resiko munculnya korban karena tertimpa bahan bangunan. Desain RISBA dapat digunakan oleh siapapun yang membutuhkan, terutama yang terdampak gempa bumi dan tsunami. Pembangunannya bisa dilakukan mandiri atau oleh aplikator yang sudah diberi pelatihan dengan tetap mengedepankan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Konsep RISBA diaplikasikan pertama kali pada akhir Agustus 2018 dalam bentuk rumah induk yang berukuran 3x6 sebanyak 50 unit rumah. Pengembangan RISBA mendapatkan sambutan dari berbagai pihak, termasuk apresiasi penuh semangat dari Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Nizam, Ph.D.

Keunggulan RISBA (Rumah Instan Struktur Baja) ada 4 yaitu (1) Cepat, mampu selesai dalam 5 hari. Berdasarkan simulasi riil di lapangan, bangunan rumah RISBA dengan ukuran 6m x 6m selesai dalam waktu 5 hari dengan jumlah tenaga kerja 5 orang per hari. Untuk menunjang kecepatan pembangunan, RISBA diprioritaskan dibangun pada bekas bangunan rumah lama yang rusak karena gempa. Struktur RISBA yang ringan tidak memerlukan pondasi sebagaimana struktur bangunan yang berat.

(2) Awet, bertahan sampai 40 tahun. Struktur utama RISBA yang dibuat dari baja CNP bisa awet karena dalam pelaksanaannya akan dilapisi dengan bahan lapisan anti karat minimal 2 lapis. Berdasarkan pengalaman, baja CNP yang telah dilapisi minimal 2 lapisan bahan anti karat dapat bertahan selama 40 tahun.

(3) Aman, tahan gempa. Rumah RISBA adalah struktur yang aman dan mengurangi potensi timbulnya korban jiwa pada kejadian gempa. Baja bersifat liat dan ulet, tidak getas, sehingga tidak mudah patah akibat beban gempa. Dalam perhitungan secara numerik dengan pemodelan komputer, rumah RISBA akan

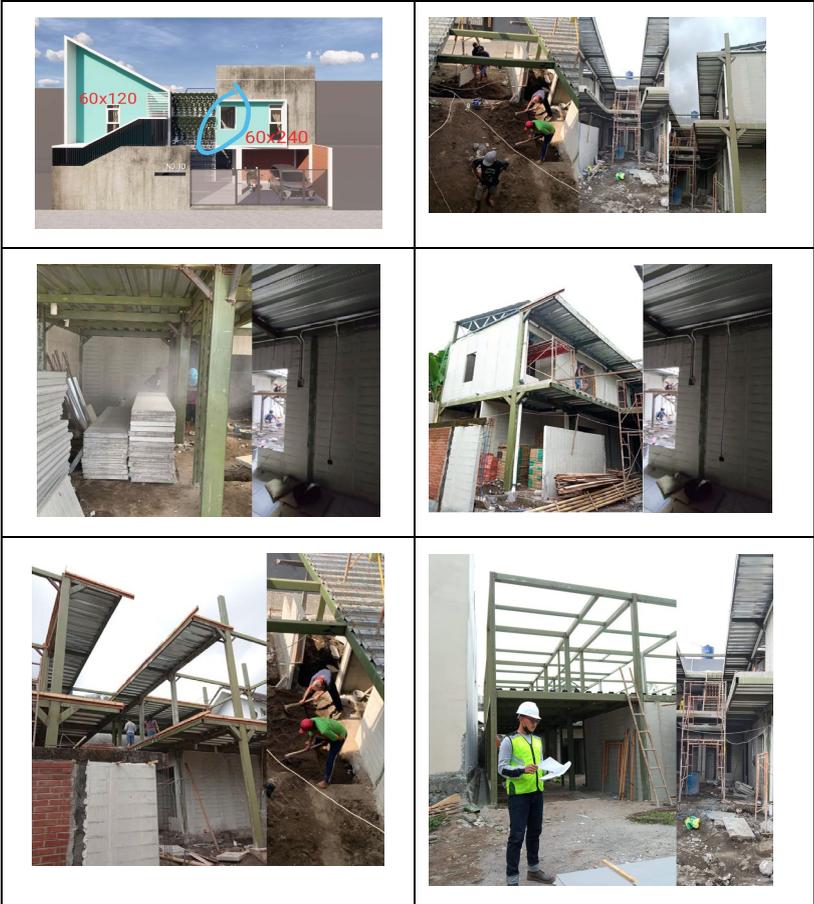
bertahan ketika menerima beban gempa berupa percepatan tanah lebih dari 1 g. Hal ini karena selain bahan baja yang bersifat ulet, rumah RISBA merekomendasikan penggunaan bahan dinding yang ringan serta rangka dan penutup atap yang ringan.

(4) Nyaman, tidak panas. Salah satu ukuran kenyamanan pada rumah adalah suhu ruangan yang tidak terlalu panas. Untuk mencapai kondisi itu, RISBA menggunakan atap dengan sudut kemiringan atap yang besar sehingga ruang udara dibawah penutup atap cukup besar dan bisa menahan panas dari atap.



Gambar x. Ajisaka RISBA (Rumah Instan Struktur Baja)

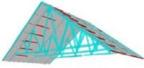
Sumber: Saputra, 2020, data dioah



Gambar x. Rumah Contoh 3 Lantai Ajisaka RISBA, Jln. Kaliurang, KM. 11, DIY

Sumber: Data Primer, 2021

Hasil Pengujian Struktur RISBA di Laboratorium Struktur UGM

		
	<p>ROOF COLD FORM STEEL (C7) Cover Galvalum 55 Area</p>  <p>FRAME BEAM-COLUMN: DUBLE (CNP) 33 x 33 x 18 SLOOF CNP 33 x 33 x 18</p>	
<p>Fig. 18. RISBA Performance Point at Pahu</p>		<p>Fig. 19. RISBA Performance Point at Lombok</p>
<p>Langkah-langkah Membangun RISBA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material utama baja CNP 2. Pelapisan PL dengan cat anti karat 3. Perekitan profil baja CNP 4. Pemasangan struktur baja CNP 5. Pemasangan rangka atap baja ringan 6. Pemasangan dinding, pintu dan jendela 		
		

Spesifikasi Ajisaka RISBA, hanya Rp 50 juta:

1. Struktur baja CNP dilapis zat anti karat 2x;
2. Rangka dan penutup atap Galvalum;
3. Rangka dinding baja ringan;
4. Dinding pasangan batako 60 cm diplester;
5. Dinding kalsiplank 6mm 1 lapis luar;
6. Pintu pabrikan panel kayu;
7. Lantai rabat plester;
8. Instalasi listrik dan lampu;
9. Struktur fondasi direkomendasikan menggunakan bekas fondasi bangunan lama;
10. Pintu dan jendela direkomendasikan menggunakan pintu dan jendela dari rumah lama yang masih bisa digunakan.

Penerapan RISBA di NTB:

Pada survei awal, masyarakat bisa menerima penggunaan dinding, kombinasi pasangan bata dan GRC. Aplikasi bisa sesuai dengan desain awal;

Penerapan RISBA di Sulteng:

Masyarakat lebih memilih penggunaan dinding pasangan bata, bata ringan, batako;

Modifikasi dengan penambahan kawat anyam untuk menambahkan perilaku daktil dan fungsi *safety net*.

Penerapan RISBA di NTB dan Sulteng mendapatkan apresiasi kemudahan dan kecepatan pelaksanaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat banyak.

Ajisaka RISBA sebagai usulan alternative dengan peluang pemberdayaan masyarakat:

Terhadap kebutuhan dinding pasangan bata

Tembok pasangan, meskipun bersifat getas dan berat, masih banyak dipilih oleh masyarakat dengan alasan:

- i. Harga yang lebih terjangkau;
- ii. Teknik pemasangan yang mudah dan sederhana;
- iii. Dinding pasangan memiliki thermal absorbtan yang baik, sehingga di dalam rumah lebih terasa sejuk;
- iv. Lebih memberikan perasaan aman.

Untuk aspek-aspek tersebut, penggunaan dinding tembokan bisa difasilitasi dengan teknologi tepat guna.

1. Konduksi Panas Area Masif (Q_w)

$$Q_w = ((1 - WWR) \times \alpha \times U_w \times TD_{ek})$$

WWR = Perbandingan luas area bukaan terhadap area selubung bangunan (Window to Wall Ratio)
 α = Nilai absorbtans thermal
 U_w = Transmittans termal area masif.....W/m².K
 TD_{ek} = Beda temperature ekuivalen.....K

Nilai Absorbtans bahan		Nilai Absorbtans warna cat	
Bahan dinding luar	α	Cat permukaan dinding luar	α
Bata merah	0.89	Hitam merata	0.95
Beton migan	0.86	Pemis hitam	0.92
Kayu permukaan halus	0.79	Abu-abu tua	0.91
Beton ekpos	0.61	Pemis biru tua	0.91
Ubin putih	0.58	Cat minyak hitam	0.90
Bata kuning tua	0.56	Coklat tua	0.88
Atap putih	0.5	Abu-abu / biru tua	0.88
Seng putih	0.26	Biru / hijau tua	0.88
Bata gelazur putih.	0.25	Coklat medium	0.84
Lembaran aluminium	0.12	Pemis hijau	0.79
		Hijau medium	0.59
		Kuning medium	0.58
		Hijau / biru medium	0.57
		Hijau muda	0.47
		Putih semi kilap	0.30
		Putih kilap	0.25
		Perak	0.25
		Pemis putih	0.21

Sumber : SNI 03-6389-2011

Penggunaan Pasangan Bata, Metode *Ferrocement* (Tedy Boen)

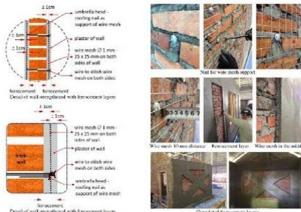
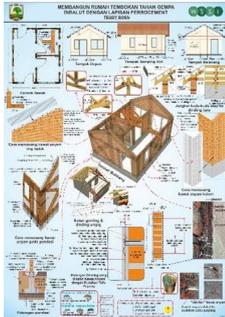


Fig. 6. Construction process for masonry, masonry and plastering, (Tedy, 2014).



Fig. 9. Collapse of Model A due to 1975 JSA, Kufu, Model B (no test)

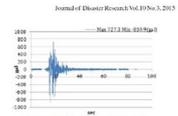
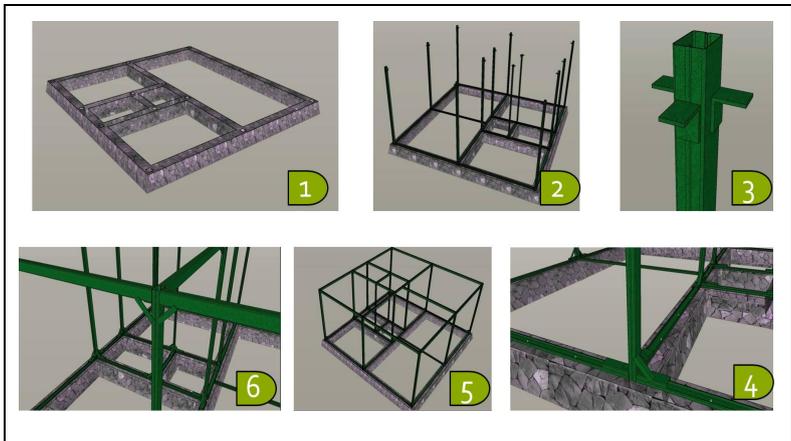
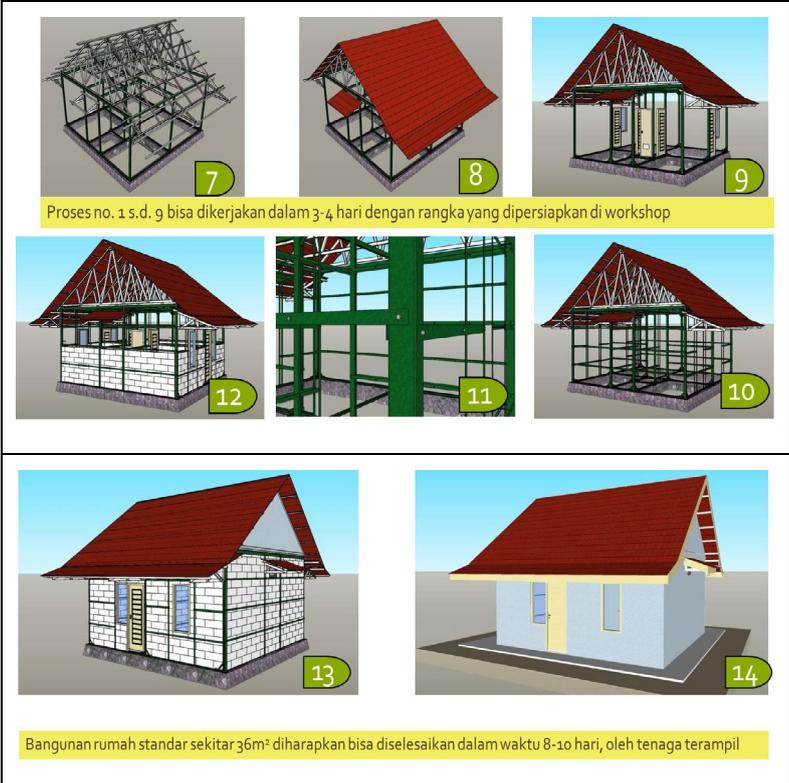


Fig. 7. Input motion of JSA Kufu NS 1005.

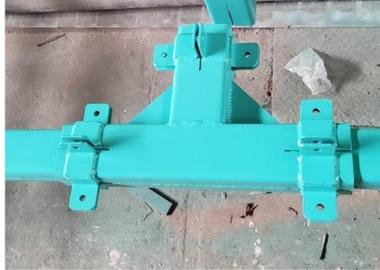
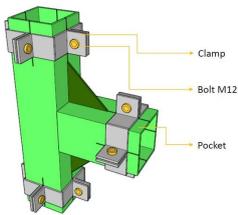
Catatan:
Metode ini masih memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya

Pengembangan Ajisaka RISBA dengan Mengakomodasi Dinding Tembokan Penuh





Peningkatan metode penyambungan, untuk meningkatkan kinerja, kemudahan pelaksanaan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat:



Sambungan dengan sistem *mechanical lock* sudah sampai prototype, siap diimplementasikan

Catatan yang penting dalam hal ini adalah: (a) Strategi dan tantangan pelaksanaan kebijakan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah di daerah pascabencana diharapkan dapat dijawab dengan pendekatan penyediaan teknologi tepat guna, *delivery system*, dan pemberdayaan masyarakat; (b) Teknologi tepat guna diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan (tahan gempa), keawetan (permanen), kecepatan; (c) *Delivery system* yang tepat diperlukan untuk menjamin bangunan; (d) Rumah stimulant dapat diterima dengan baik oleh penyintas; (e) Untuk menjaga nilai kebersamaan, gotong royong, pencapaian kualitas yang baik, dapat ditunjang dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunannya.

Mengapa Bangunan Rumah yang Rusak Jumlahnya Besar?

Karena Kualitasnya Rendah

1. Bangunan rumah sederhana (*Non engineered housing*);

2. Menggunakan material yang berat dan struktur bangunan getas:
 - a. Berat; beton, bata, batako;
 - b. Getas; detail penulangan tidak mengikuti standar, pemenuhan standar detail penulangan tidak mudah dicapai oleh tukang yang tidak terlatih. Bagaimana ketersediaan tukang terampil/terlatih?



Gambar x. Bangunan Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Lombok dan Palu

Sumber: Saputra, 2020, data diolah

Tantangan Rekonstruksi Hunian Pasca Bencana



Built back better, membangun kembali dengan lebih baik.

Tantangan Teknologi



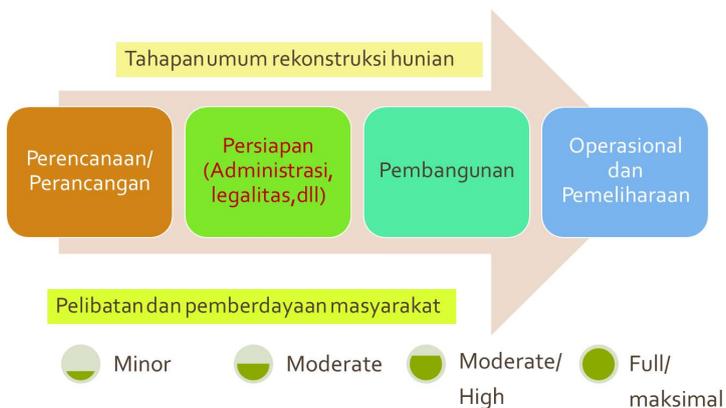
Tantangan *Delivery System*

1. Kencenderungan pilihan masyarakat (bangunan tembokan lebih dipilih);
2. Aspek legalitas;
3. Aspek administrasi;
4. Aspek pembiayaan;
5. Dokumen standard penerimaan mutu;
6. Kondisi geografis.

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

1. Masyarakat harus terlibat agar tumbuh rasa kepemilikan, menunjang pencapaian mutu yang baik;
2. Budaya kebersamaan dan gotong royong harus bisa terbina;
3. Masyarakat penyintas harus diberi peran yang sesuai dalam proses rekonstruksi.

Komponen Pembangunan dan Potensi Pemberdayaan Masyarakat



Catatan Khusus Berkaitan Dengan Proses Pemberdayaan Masyarakat

1. Rekonstruksi Aceh 2004-2006

- Banyak donor menyulitkan kordinasi, penyintas kurang diposisikan sebagai subyek. Magnitudo bencana yang sangat masif membawa kesulitan tinggi;
- Kualitas hasil rekonstruksi kurang bagus, setelah rekonstruksi bangunan mengalami kerusakan kembali karena gempa.



Reconstruction of houses



Simeulue eq, February 20, 2008



Reconstruction of houses

Lesson learned rekonstruksi
(Boen, 2008)



2. Rekonstruksi Yogyakarta 2006-2008

- Banyak diacu sebagai contoh baik dalam pelibatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Donor lebih terkendali, masyarakat dilibatkan dalam proses rekonstruksi melalui skema Pokmas (kelompok masyarakat);

- c. Temporary shelter dibangun di halaman atau dekat rumah sehingga fungsi social kultural kampung bisa dipelihara;
- d. Kualitas hasil rekonstruksi bagus, didukung dengan ketersediaan material yang baik dan mencukupi, tenaga teknis pendamping yang banyak dan social cohesiveness yang tinggi.

Bab 10

Desa Keistimewaan DIY

Tim Penulis berdiskusi dengan beberapa akademisi, tokoh profesional dan tokoh masyarakat tentang desa, antara lain Octo Lampito dan Prof. Sutrisno Wibowo, Ada pula tokoh perempuan Idha Jacinta dan tokoh profesional muda Tyo Moko. Dalam perbincangan-perbincangan yang mengalir, semua mendukung Keistimewaan DIY yang memberi perhatian khusus untuk membangun desa-desa. Program desa wisata dan desa mandiri budaya sangat tepat menjadi basis Keistimewaan DIY,

Desa dapat menjadi pusat edukasi Keistimewaan DIY. Bukan hanya menjadi tempat untuk melakukan pendidikan itu seperti sekolah yang gedungnya atau pelaksanaannya di adakan di sebuah desa. Namun kehidupan di desa itu bertumbuh sedemikian sehingga menjadi laboratorium hidup atau proyek percontohan Keistimewaan DIY. Kebudayaan khas DIY hidup dan terus dipraktekkan di desa itu. Sementara para pemimpin di desa itu adalah tokoh-tokoh yang menguasai seluk beluk Keistimewaan DIY dan khususnya budaya Jawa.

Desa dalam Keistimewaan

Diskusi tentang gagasan Desa Keistimewaan semacam itu telah lama berlangsung dan terus menghangat. Apalagi setelah Pemda DIY memberi prioritas untuk membangun desa-desa mandiri budaya. Berikut adalah

rangkuman diskusi tentang desa Keistimewaan yang ditulis oleh Haryadi Baskoro dalam analisis berjudul “Desa dalam Keistimewaan”, dimuat di rubrik ANALISIS KR Harian Kedaulatan Rakyat edisi 23 Nov 2018.

Perhelatan musik Ngayogjazz di Desa Budaya Gilangharjo di Kabupaten Bantul DIY berjubel penonton. Tak kurang dari 30 ribu pengunjung hadir, menciptakan antrean mengular yang menurut penduduk setempat panjangnya 3 kilometer. Ekonomi rakyat pun terimbas berkah, jajanan dan jualan mereka laris manis laku habis.

Yang menarik, perhelatan ini didisain untuk menjadikan desa sebagai subyek. Seperti dijelaskan Ketua Penyelenggara Ngayogjazz 2018 Novindra Diratara, Ngayogjazz bukan sebuah pagelaran musik yang kapitalistik, namun menjadikan desa sebagai subyek dan bukan obyek (KR, 16/11/2018). Pendekatan ini di satu sisi menjadi kunci keberhasilan di dalam proses membumikan jazz dan di sisi lain mengangkat desa sebagai mitra mutual. Desa yang ketempatan terpromosikan secara ekonomi dan kultural.

Perhelatan Ngayogjazz 2018 di desa Gilangharjo itu menjadi salah satu model pendekatan untuk merevitalisasi desa di dalam Keistimewaan Yogya. *Pertama*, event itu berhasil mengangkat martabat desa sebagai subyek di dalam berkarya seni-budaya yang berdampak lokal, nasional, dan internasional. Sebagai subyek, desa harus mempunyai posisi tawar

(*bargaining position*) yang kuat. Inilah yang terjadi dalam Ngayogjazz 2018 di mana Kepala Desa Gilangharjo Pardiyo menegaskan bahwa desanya adalah desa budaya sehingga hanya mau mewadahi kegiatan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mau mengapresiasi budaya asli atau lokal bersangkutan.

Kedua, berkat posisi Desa Gilangharjo sebagai subyek maka event itu berkontribusi mengangkat nilai sejarah dan kebudayaan setempat. Menurut budayawan Desa Gilangharjo Mas Bekel Jaya Supriyanto, desa ini terbentuk dari penggabungan dari 3 kelurahan lama pada 14 Oktober 1946, yaitu (1) Kelurahan Krekah yang waktu itu dijabat Lurah Imo Ijoyo [1934-1946], (2) Kelurahan Bantulan, Lurah Bapak Atmo Sumarto [1933-1946], (3) Kelurahan Jodoglegi, Lurah Bapak Darmo Rejo [1930-1946]. Adapun nama “Gilang” itu terkait dengan nama situs budaya peninggalan zaman Mataram Islam yang terdapat di Janggan Kauman, yakni Selo Gilang. Situs yang diyakini merupakan “batu hidup” berwujud persegi panjang merupakan tempat pasujudan Kanjeng Panembahan Senopati saat pertama kali mendapatkan wahyu “Lintang Johar”. Wahyu itulah yang menjadi landasan visi dan misi pendirian Kerajaan Mataram Islam yang berkelanjutan sampai sekarang ini.

Di DIY banyak desa memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang sangat signifikan. Dalam UUK DIY dijelaskan bahwa Keistimewaan Yogya adalah

keistimewaan berbasis sejarah dan kebudayaan. Oleh karena itu, fondasi dan pilar-pilar sejarah dan kebudayaan lokal, yang eksis di setiap desa, harus direvitaliasi, diaktualisasi, dan disosialisasikan terus.

Ketiga, event Ngayogjazz adalah bentuk pendekatan dinamis untuk membangun kebudayaan hibridal Yogya. Sejak awal perkembangannya, kebudayaan Yogya dan Indonesia adalah kebudayaan kombinasional karena pada dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai unsur kebudayaan dan juga keagamaan, Kita tidak bisa terlalu "etnosentris" dengan memandang rendah budaya-budaya lain. Antropolog Lono Lastoro Simatupang menegaskan bahwa tidak pernah ada kebudayaan yang berdiri sendiri, semuanya hibridal.

Kraton Kasultanan Yogya telah banyak menunjukkan sikap terbuka terhadap kebudayaan lain dan globalisme. Pada 1993 yang lalu misalnya, penyanyi Cekoslovakia Vera Soukupova dan pianis Trisutji Julianti menggelar konser opera musik di Bangsal Sri Manganti Kraton Yogya. Keterbukaan dan dinamika kebudayaan adalah keniscayaan, hanya yang penting adalah posisi tawar kita sebagai subyek kebudayaan. Itu terjadi pada Ngayogjazz Gilangharjo, menjadi sebuah kebudayaan hibrid Yogya yang berbasis kearifan lokal kita.

Keempat, perhelatan Ngayogjazz Gilangharjo 2018 menjadi model pengembangan jejaring sosial untuk pembangunan desa. UU Desa telah memberi ruang bagi berkembangnya demokratisasi ekonomi dan politik di pedesaan, serta memberi kewenangan seluas-luasnya

bagi pemerintah desa untuk membangun dan memberdayakan desa. Karena itu, desa berpeluang mengembangkan jejaring sosial (*social network*) yang menjadi modal sosial (*social capital*) penopang pembangunan desa.

Kelima, karena memposisikan desa sebagai subyek dan mempromosikan sejarah dan kebudayaan lokal, perhelatan seni modern ala Ngayogjazz Gilangharjo 2018 adalah model "*edutainment*" efektif untuk mensosialisasikan Keistimewaan Yogya itu sendiri. Sebab, untuk menjangkau generasi milenial perlu dipakai cara-cara populer (*pop culture*) yang bercitarasa global (*global sense*). Ngayogjazz unik karena mampu mengolah kebudayaan populer global untuk membudayakan nilai-nilai filosofi asli milik kita sendiri.

Demplot Keistimewaan

Pada awal 2021, diskusi-diskusi tentang penguatan desa-desa sebagai "lahan percontohan sosiak-budaya" Keistimewaan DIY semakin menguat. Hasil diskusi-diskusi kemudian dituliskan oleh Haryadi Baskoro dengan judul "Demplot Keistimewaan" dimuat di rubrik ANA:LISIS KR Harian Kedaulatan Rakyat edisi 11 Februari 202, sebagai berikut.

Keistimewaan Yogya mempunyai lima pilar yaitu kepemimpinan Sultan dan Adipati yang bertahta, pemerintahan, kebudayaan, tata ruang, dan pertanahan (Pasal 7 UUK). Implementasi Keistimewaan

di level penyelenggaraan pemerintahan daerah (*kaprajan*) sudah *on the track*. Pemda DIY bertumbuh asimetris dengan perangkat-perangkat khasnya seperti “*Parampara Praja*” dan “*Paniradya Kaistimewan*”. Tetapi bagaimana implementasinya di level masyarakat? Desa istimewa itu yang seperti apa? Bagaimanakah kampung istimewa itu? Kampus yang istimewa itu seperti apa? Bagaimana pula dengan komunitas istimewa?

Keistimewaan DIY baru akan benar-benar berakar kuat manakala masyarakat hingga level akar rumput benar-benar menghayati dan mempraktekkan Keistimewaan tersebut dalam kehidupan nyata sehari-hari. Keistimewaan tidak hanya menjadi elitis dan artifisial, namun bersifat otentik dan faktual. DIY semestinya merupakan sebuah entitas masyarakat yang istimewa seperti syair lagu karya Jogja Hip Hop Foundation itu: “istimewa negerinya, istimewa orangnya”.

Dari kelima pilar Keistimewaan itu, pilar kebudayaan menjadi penyangga pembentukan atau pembangunan masyarakat istimewa. Kebudayaan bukan hanya soal seni dan bangunan. Antropolog Koentjaraningrat (19

81) menyodorkan konsep tentang “pranata kebudayaan” yang menunjuk pada tatanan sosial yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pranata terdiri dari unsur-unsur (1) sistem nilai dan norma, (2) sumber daya manusia, (3) ilmu pengetahuan dan teknologi. Pranata itu menunjuk pada semua

sistem sosial, baik yang terorganisir formal maupun tidak. Pertanian dan industri misalnya, adalah bentuk pranata sosial yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan mata pencaharian.

Berangkat dari perspektif itu, masyarakat istimewa menunjuk pada tatanan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan visi-misi Keistimewaan DIY. Koentjaraningrat (1981) mengatakan bahwa pranata itu lebih luas dari lembaga atau organisasi formal. Kampung, kampus, dan komunitas adalah pranata-pranata sosial. Sedangkan lembaga formalnya adalah organisasi RT atau RW, kampus X, dan organisasi Y. Pranata kebudayaan lebih bersifat organik dan substansif, sedangkan organisasi dan lembaga lebih bersifat artifisial.

Desa istimewa dengan demikian adalah tatanan sosial masyarakat di desa yang berbasis nilai-norma Keistimewaan. Mereka terdiri dari sumber daya manusia-manusia yang menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai ke-Yogya-an seperti "*hamemayu hayuning bawana*". Mereka mengembangkan iptek untuk mewujudkan visi-misi Keistimewaan DIY. Kampus istimewa adalah tatanan sosial yang terdiri dari SDM civitas akademika yang berjiwa ke-Yogya-an untuk mewujudkan Keistimewaan DIY di bidang pendidikan.

Untuk men-diseminasi-kan Keistimewaan DIY hingga terbangun pranata-pranata sosial yang istimewa, kita membutuhkan contoh atau model. Meminjam istilah dalam pertanian, diperlukan penyuluhan dengan metode demonstrasi. Demplot (demonstrasi plot) adalah metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara

membuat lahan percontohan agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap obyek yang didemonstrasikan. Kita membutuhkan “demplot kampung istimewa”, “demplot kampus istimewa”, dan juga “demplot komunitas istimewa”.

Sebagai contoh, sejak 2017 di Kabupaten Gunungkidul telah ada pranata kerjasama lintas agama berwujud “Sekolah Kebhinnekaan”. Sistem pendidikan informal ini diampu oleh beberapa komunitas agama yang berbeda-beda. Sekolah ini mendidik pemuda lintas agama dengan cara belajar sambil tinggal (*live in*) di berbagai rumah ibadah yang berbeda-beda. Ini barulah salah satu contoh demplot Keistimewaan DIY di bidang agama. Sebuah ‘lahan percontohan’ pranata pendidikan lintas agama. untuk mewujudkan ke-bhinneka-tunggal-ika-an yang merupakan tujuan dari Keistimewaan DIY (UUK Pasal 5 ayat [1] huruf c).

Bab 11

Syiar Global Keistimewaan DIY

Akhirnya, Yogya Istimewa bukan untuk dirinya. Yogya Istimewa untuk Indonesia dan untuk Dunia. Visi global sudah selalu dicanangkan oleh Gubernur DIY, Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Misalnya Visi untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY periode 2005-2025, adalah Yogyakarta menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara. Sedangkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY periode 2017-2022 adalah Abad Samudera Hindia yang mengaitkan Keistimewaan DIY dengan gerakan budaya dan ekonomi negara-negara berpesisir Samudera Hindia di seluruh dunia.

Visi global Keistimewaan DIY bukan isapan jempol dan bukan pula halusinasi. Sebab banyak prestasi DIY yang sudah mendunia. Di antaranya pada 2014 Yogyakarta ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia oleh Dewan Kerajinan Sedunia (World Craft Council). Hal itu menunjukkan pengakuan dunia akan pamor kebudayaan DIY.

Yogya Istimewa Mendunia

Tim Penulis mendiskusikan visi global Keistimewaan DIY ini bersama beberapa tokoh dan beberapa komunitas di antaranya, komunitas Gerakan Cinta Batik Mahakarya Indonesia (GCBM), komunitas usaha KALU,

dan komunitas usaha KYOOT. Semua berharap muncul gerakan untuk mensharingkan Keistimewaan DIY kepada dunia. Selama ini tentu sudah banyak misi seni dan budaya dari Yogyakarta yang berkiprah dan berkarya di luar negeri. Yang perlu dikembangkan sekarang dan ke depan adalah Misi Global Keistimewaan Yogya, yang secara spesifik menyiarkan pesan-pesan, karya, dan kiprah Keistimewaan DIY untuk memperbarui peradaban global.

Momen bersejarah Indonesia ditunjuk menjadi Presidensi G20 untuk periode 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022 semestinya memotivasi Yogya untuk juga berkiprah, berkarya, dan berdampak mendunia. G20 itu sendiri adalah jejaring 20 negara yang merepresentasikan kekuatan perekonomian dunia dan menjadi forum yang sangat strategis. Negara-negara yang tergabung di dalam G20 menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia.

Sejalan dengan cakupan visi NKRI yang berkarya ke dalam dan keluar, demikian pula dengan cakupan visi Yogya sebagai daerah istimewa di dalam NKRI. Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan RI adalah berkarya ke dalam (melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan bangsa) dan berkarya keluar (menjaga ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan). Adapun Yogya istimewa bukan hanya untuk mensejahterakan dirinya, tetapi juga untuk memajukan peradaban Indonesia dan dunia.

Keistimewaan Yogya jangan malah membuat Yogya hanya terkurung dalam “box” urusan-urusannya sendiri. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) memang mengatur 5 urusan Keistimewaan (pengisian jabatan gubernur, pemerintahan daerah, kebudayaan, pertanahan, tata ruang) yang semuanya merupakan urusan-urusan internal DIY. Namun, UUK dari awal (Bagian Menimbang) juga menegaskan bahwa Yogya istimewa karena “berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan NKRI”.

Dari sejak menjadi Ibukota Republik (1946-1949) hingga menjadi barometer dan generator Gerakan Nasional Reformasi (1998), Yogya istimewa karena kontribusi besarnya bagi NKRI. Bahkan ekspansi untuk merebut Irian Barat pun digerakkan dari Yogya pada 1961. Seperti syair lagu “Jogja Istimewa” karya Marjuki Mohammad: “Yogya istimewa bukan untuk dirinya, Yogya istimewa untuk Indonesia”.

Yogya istimewa mendunia, itu sama sekali tidak berlebihan. Sejarah masa lalu dan fakta eksisting hari ini membuktikan hal itu. Wibawa, kiprah, karya, dan dampak Keistimewaan Yogya telah diakui secara internasional. Ketika Sultan HB IX wafat pada 1988 di Amerika Serikat, beliau sangat dihormati sebagai pahlawan. Jenazahnya diusung oleh para prajurit Angkatan Udara AS dan diterbangkan dengan Pesawat Kepresidenan AS dari Lapangan Udara Militer Andrews (Tempo, 1988).

Yogya adalah produsen dan eksportir SDM yang giat berkiprah, berkarya, dan berdampak global. Banyak seniman dan budayawan Yogya telah mendunia. Para ilmuwan dan pendidik asal Yogya pun tak sedikit yang diakui secara internasional. Para pemimpin negara-negara dan raja-ratu dari berbagai belahan bumi berkunjung ke Yogya. Jika batik, keris, dan wayang kulit diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia, Yogya adalah pusatnya.

Jika tema Peringatan Sewindu UUK pada 2020 adalah “Yogya Istimewa untuk Indonesia” maka tema satu dasawarsa UUK pada 2022 tepat jika “Yogya Istimewa Mendunia”. Disamping bertepatan dengan era Presidensi Indonesia di G20, juga dalam rangka mengejar target visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025. Pada 2025 diharapkan Yogya menjadi pusat pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan terkemuka di ASEAN dengan masyarakatnya yang sejahtera (Perda DIY No 2 Tahun 2009).

Ketika pada 2017 Gubernur DIY Sultan HB X menyampaikan visi “Abad Samudera”, substansinya adalah semangat dan orientasi agar Yogya berkarya peradaban. Dalam pidato visi-misi RPJMD DIY Periode 2017-2022 waktu itu, HB X menegaskan supaya kita jangan sekedar bekerja kantoran dan bekerja proyekan dalam mengimplemantasikan Keistimewaan Yogya. Pidato itu menyadarkan bahwa Yogya dan Indonesia adalah bagian dari jejaring kawasan dunia yang berpesisir Samudera Hindia yang kini sedang bangkit.